

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL, GAMBAR, BAGAN DAN GRAFIK.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	9
1.4. Isu Strategis	10
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1. Uraian Singkat Renstra	11
2.1.1. Visi dan Misi	12
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	13
2.1.3. Program dan Kegiatan	15
2.2. Perjanjian Kinerja	17
2.3. Metode Pengukuran	18
2.4. Target Tahun Ini Menurut Renstra	21
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI	24
3.1. Sumber Daya Manusia (SDM)	24
3.2. Sarana dan Prasarana	31
3.3. DIPA	35
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA	37
4.1 Capaian Kinerja	37
4.2 Perbandingan Kinerja	80
4.3 Analisis Kinerja Organisasi	81
4.4 Efisiensi dan Efektivitas	107
BAB 6 PENUTUP	109
5.1 Permasalahan	109
5.2 Langkah Ke Depan	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi	viii
Gambar 2. Hubungan Empat Perspektif <i>Balanced Scorecard</i>	30
Gambar 3. Contoh Sasaran Kerja Pegawai Ditjen Bina Konstruksi	31
Gambar 4. Pemetaan Sebaran Target Satker Tertib Penyelenggaraan.....	61
Gambar 5. Capaian Target Tertib Penyelenggaraan Konstruksi TA 2016	62
Gambar 6. Penyerahan Sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer dan ASEAN Architect secara Simbolis	64
Gambar 7. Pemaparan Materi tentang Penggunaan Aplikasi E-monitoring	82
Gambar 8. Dirjen Bina Konstruksi dan Ary Ginanjar pada Kegiatan ESQ.....	83
Gambar 9. Presiden Indonesia dalam Pembukaan Konstruksi Indonesia 2016.....	85
Gambar 10. Pameran BAUMA di Munich, Jerman.....	86
Gambar 11. Rapat Paripurna DPR RI sekaligus Pengesahan UU Jasa Konstruksi.	92
Gambar 12. Kegiatan MTU di Daerah.....	101
Gambar 13. Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Nasional.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Jangka Menengah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.....	16
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016.....	17
Tabel 3. Subkomponen Pencapaian Komponen Outcome.....	20
Tabel 4. Target dan Baseline Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016.....	20
Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja Program berdasar Renstra.....	21
Tabel 6. Sasaran dan Indikator Program berdasar Perjanjian Kinerja	22
Tabel 7. Target Pencapaian Indikator Kinerja pada Rencana Strategis 2015-2019..	22
Tabel 8. Jumlah Pegawai DJBK per Unit Kerja	24
Tabel 9. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Golongan dan Ruang.....	25
Tabel 10. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
Tabel 11. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Jenis Kelamin	27
Tabel 12. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Usia.....	28
Tabel 13. Luas Tanah dan Bangunan Kantor Direktorat Jenderal Bina Konstruksi..	32
Tabel 14. Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016.....	35
Tabel 15. Range Pengukuran Kinerja	37
Tabel 16. Realisasi Target Outcome DJBK TA 2016	39
Tabel 17. Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi dalam e-monitoring.pu.go.id	41
Tabel 18. Capaian PK Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016	42
Tabel 19. Target <i>Outcome</i> Antara Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.	43
Tabel 20. Perbandingan Nilai LaKIP TA 2014 dan TA 2015 Ditjen Bina Konstruksi	44
Tabel 21. Capaian Kegiatan Kerjasama dan Pemberdayaan dalam e- monitoring.pu.go.id	44
Tabel 22. Capaian Output Kegiatan Substansi pada emonitoring.pu.go.id	47
Tabel 23. Komponen Outcome 1 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	50
Tabel 24. Komponen Outcome 2 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	53
Tabel 25. Komponen Outcome 3 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	56
Tabel 26. Capaian Pembinaan Penyelenggaraan.....	58
Tabel 27. Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi terkait SMK3 dan SMKK per Wilayah di Indonesia	60
Tabel 28. Realisasi Target Indikator Program Outcome 3 Ditjen Bina Konstruksi....	62

Tabel 29. Komponen Outcome 4 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	63
Tabel 30. Jumlah SDM Berkompeten Tahun 2014 dan 2015.....	67
Tabel 31. Komponen Outcome 5 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	69
Tabel 32. Nilai Ekspor Konstruksi Indonesia TA 2016.....	73
Tabel 33. Selisih Realisasi terhadap Target Renstra Tahun 2019	74
Tabel 34. Indikator Sasaran Strategis Berdasarkan Unit Kerja Pelaksana.....	74
Tabel 35. Realisasi Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	75
Tabel 36. Selisih Capaian target Sasaran Strategis DJBK TA 2016 terhadap Target Renstra Kementerian PUPR Tahun 2019.....	76
Tabel 37. Capaian Target RPJMN Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitas Pengusahaan Infrastruktur TA 2016.....	77
Tabel 38. Daftar Instansi Penyelenggara Pelatihan bersama Ditjen Bina Konstruksi TA 2016.....	78
Tabel 39. Perbandingan Capaian Kinerja TA 2015-2016.....	80
Tabel 40. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016	81
Tabel 41. Capaian Kinerja Direktorat Bina Investasi Infrastruktur TA 2016.....	86
Tabel 42. Capaian Kinerja Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi TA 2016	88
Tabel 43. Capaian Kinerja Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi TA 2016	90
Tabel 44. Capaian Kinerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi TA 2016.....	95
Tabel 45. Capaian Kinerja Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan TA 2016	96
Tabel 46. Capaian Kegiatan Sertifikasi Massal	103
Tabel 47. Alokasi Anggaran dan Realisasi pada Unit Kerja di lingkungan DJBK TA 2016	104
Tabel 48. Alokasi Anggaran dan Realisasi Pada Setiap Sasaran Program DJBK TA 2016	106

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Komposisi Outcome Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.....	19
Diagram 2. Jumlah Pegawai DJBK Per Unit Kerja	24
Diagram 3. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Golongan dan Ruang	25
Diagram 4. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	26
Diagram 5. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Jenis Kelamin	27
Diagram 6. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Usia	28
Diagram 7. Diagram SDM vs Anggaran DJBK	29
Diagram 8. Sebaran Neraca Aset Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.....	34
Diagram 9. Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016	36
Diagram 10. Capaian Kegiatan Uji dan Pelatihan MTU	101
Diagram 11. Capaian Training of Trainer MTU	102
Diagram 12. Alokasi Anggaran dan Realisasi pada Unit Kerja.....	106

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	9
Bagan 2. Pemetaan Klasifikasi Barang Milik Negara	32
Bagan 3. <i>Family Tree</i> Undang-Undang Jasa Konstruksi.....	93
Bagan 4. Struktur Organisasi LPJK Nasional Periode 2016-2020	94
Bagan 5. Sapta Agenda Percepatan Sertifikasi Kompetensi Konstruksi.....	97

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Perjanjian Kinerja
- Lampiran 2.** Rencana Aksi
- Lampiran 3.** Laporan Bulanan
- Lampiran 4.** Hasil Review LaKIP Tahun 2015 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
- Lampiran 5.** Surat Penyesuaian Perjanjian Kinerja Eselon I TA 2016 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
- Lampiran 6.** Matriks Program dan Kegiatan Tujuan I Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019
- Lampiran 7.** DIPA
- Lampiran 8.** DIPA APBN-P
- Lampiran 9.** Dokumentasi
- Lampiran 10.** Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- Lampiran 11.** Penghargaan
- Lampiran 12.** Daftar Satker Tertib Penyelenggaraan
- Lampiran 13.** Daftar BUJK Kualifikasi B2

KATA PENGANTAR



Gambar 1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2016" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam melaksanakan berbagai kewajibannya secara transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pengganti Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dan dalam rangka pelaksanaan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Permen PAN & RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pedoman dalam penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2016.

LaKIP ini juga merupakan perwujudan kewajiban Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban untuk periode TA 2016.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan LaKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016 ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Ir. Yusid Toyib, M. Eng. Sc
NIP 195708311986031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melaksanakan berbagai program melalui unit kerjanya untuk mencapai sasaran serta mewujudkan visi dan misi Presiden yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi. Adapun visi dan misi Direktorat Jenderal Konstruksi yang selaras dengan NAWACITA antara lain: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Hal-hal tersebut akan diwujudkan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019 terkait Bina Konstruksi yaitu: “Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan pedesaan, dalam kerangka NKRI”.

Beberapa hal yang dapat disampaikan terkait program pembinaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

A. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung program pembinaan konstruksi. Adapun tujuan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang tertuang dalam Renstra DJBK 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi dan investasi yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
2. Berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang produktif, efisien dan efektif, serta berkelanjutan;

3. Berperan aktif dalam menciptakan pelaku, SDM, dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, profesional, dan berdaya saing tinggi;
4. Memelopori penciptaan informasi konstruksi dan terpenuhinya sumber daya konstruksi; dan
5. Mempelopori pengkajian, penyebarluasan, dan penerapan inovasi teknologi, investasi dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh DJBK tersebut telah mengacu kepada sasaran strategis Ditjen Bina Konstruksi yang tertuang di dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 yaitu **“Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional”**.

B. Kinerja Sasaran

Pencapaian sasaran strategis Ditjen Bina Konstruksi didukung oleh pencapaian sasaran-sasaran program yang telah dilaksanakan selama 1 tahun ini. Adapun pencapaian sasaran program Ditjen Bina Konstruksi TA 2016 adalah sebagai berikut:

1. Terhadap sasaran *Meningkatnya Kapitalisasi Konstruksi oleh Investor Nasional* telah tercapai peningkatan nilai konstruksi yang diselesaikan se Indonesia dari 574 Triliun pada tahun 2015 menjadi 636 Triliun pada tahun 2016 atau meningkat sebanyak 12,18%.
2. Terhadap sasaran *Meningkatnya Persentase BUJK yang Berkualifikasi Besar* telah tercapai peningkatan jumlah BUJK berkualifikasi B2 dari 184 BUJK pada tahun 2015 menjadi 219 BUJK pada tahun 2016 atau meningkat sebanyak 25,18%.
3. Terhadap sasaran *Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Konstruksi* telah tercapai peningkatan persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi dengan meningkatnya tertib sistem penyelenggaraan melalui penetapan lelang, meningkatnya tertib administrasi kontrak melalui kesesuaian kontrak dengan peraturan, meningkatnya tertib konstruksi berkelanjutan melalui tersedianya dokumen RK3K dan meningkatnya tertib manajemen mutu melalui tersedianya dokumen RMP dan RMK sebesar 5,94%.
4. Terhadap sasaran *Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten* telah tercapai peningkatan persentase SDM penyedia jasa konstruksi yang

kompeten dari 243.367 tenaga ahli berkompeten pada tahun 2015 menjadi 567,657 tenaga kerja konstruksi berkompeten pada tahun 2016 atau meningkat sebanyak 11,76%.

5. Terhadap sasaran *Meningkatnya utilitas produk unggulan* telah tercapai peningkatan persentase tingkat utilitas produk unggulan dengan kenaikan jumlah kapasitas produksi perusahaan beton pracetak dari 25,45 juta m³ pada tahun 2015 menjadi 28 juta m³ pada tahun 2016 atau setara dengan kenaikan 1,86% tingkat utilitas produk unggulan.

Adapun rincian ketercapaian target dari sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi per indikator program dapat dilihat pada tabel di halaman berikutnya.

No.	Sasaran Program Ditjen Bina Konstruksi (Renstra Ditjen Bina Konstruksi)	Indikator Program	2014		2015		2016		Target Renstra 2015-2019	%Progres Terhadap Target Renstra 5 Tahun	Formulasi % Capaian 2016	Sumber		
			Baseline	Target PK	Realisasi Capaian	%	Target PK	Realisasi Capaian					%	
1	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	509 Triliun	1.5%	574 Triliun	12.77%	636 Triliun	12.18%	15%	166.34%	$\frac{(636 - 574) \text{ Triliun}}{509 \text{ Triliun}} \times 100\%$	BPS, Subdit Statistik Konstruksi		
			139 BUJK	9%	164 BUJK	32.37%	219 BUJK	25.18%	90%	63.95%	$\frac{(219 - 184) \text{ BUJK}}{139 \text{ BUJK}} \times 100\%$	LPJKN		
2	Meningkatnya persentase BUJK yang berkualitas besar	Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualitas besar	Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi											
			a	Peningkatan tertib sistem penyelenggaraan melalui penetapan lelang	129 proyek		110 proyek							Dit. Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
			b	Peningkatan tertib administrasi kontrak melalui kesesuaian kontrak dengan peraturan			49 proyek						Jumlah Satker di Kementerian PUPR adalah 782 satker, target 4% Tertib Penyelenggaraan (31 satker)	
			c	Peningkatan tertib konstruksi berkelanjutan melalui tersedianya dokumen RK3K	89 proyek	4%	34 proyek	4.13%	46 satker	5.94%	40%	25.16%		
			d	Peningkatan tertib manajemen mutu melalui tersedianya dokumen RMP dan RMK			34 proyek							
	Total	218 proyek		227 proyek (31 satker)										
3	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	64,578		104,774		171,607				$\frac{(437.531 \text{ orang}}{2.754.160 \text{ orang}} \times 100\%) - 8.85\%$	LPJKN		
			101,669 bersertifikat	1%	138,593	2.80%	396,050	11.76%	27%	53.93%	2.754.160 orang adalah total Skilled Labour yang diharapkan pada tahun 2019			
4	Meningkatnya Utilitas Produk Unggulan	Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan	24 juta m ³	1.5%	25.45 juta m ³	1.08%	28 juta m ³	1.86%	15%	19.60%	$\frac{\text{Beton Pracetak}}{\text{Benchmark Beton Keseluruhan}}$	AP 3I		
			166,247		243,367		567,657							

Kelima sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tersebut merupakan dasar untuk menjawab realisasi sasaran strategis yang termuat dalam LaKIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai “Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional”. Adapun ketercapaian sasaran strategis dari Program Pembinaan Konstruksi adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Ditjen Bina Konstruksi (Renstra Kementerian PUPR)	Indikator	Target	Realisasi	% Ketercapaian Target	Bobot	% Realisasi Per Bobot	Target Renstra Kemen PUPR	Realisasi Renstra Kemen PUPR	
Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional	TINGKAT PENGENDALIAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI NASIONAL								
	1	Rasio kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional	3.00%	12.18%	406.00%	15%	15.00%	78.00%	90.44%
	2	Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar	25	35	140.00%	15%	15.00%		
	3	Tingkat penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi	8.00%	5.94%	74.25%	15%	11.14%		
	4	Persentase SDM konstruksi yang kompeten	4.00%	11.76%	294.00%	40%	40.00%		
	5	Persentase Utilitas Produk Unggulan	3.00%	1.860%	62.00%	15%	9.30%		

C. Kinerja Keuangan

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran kinerja tersebut, Ditjen Bina Konstruksi didukung oleh pendanaan pagu APBN-P sebesar Rp639.549.456.000,-, namun dengan adanya kebijakan *self-blocking* sehingga pagu efektif adalah Rp627.549.456.000 dengan capaian sebesar R569.597.952.000,- atau sekitar 90,77% jika dibandingkan dengan pagu efektif. Jika dibandingkan dengan progres fisik yang mencapai 98,50%, maka dapat dilihat bahwa terjadi efisiensi anggaran dalam pelaksanaannya sehingga anggaran yang dikeluarkan berada di bawah pagu. Selain itu, pencapaian ini patut diapresiasi karena jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian fisik Ditjen Bina Konstruksi peningkatan sebesar 2,86%. Hal ini menandai bahwa pada tahun ini ada perbaikan kinerja dibandingkan dengan tahun lalu.

D. Kendala

Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan telah tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan walau masih terdapat kendala dan permasalahan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya pemotongan APBN dan tidak sesuainya anggaran pada Renstra terhadap DIPA 2016 mempengaruhi pencapaian output dan outcome pada tahun ini.
2. Terjadinya perubahan struktur organisasi menyebabkan berkurangnya SDM di tiap-tiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

3. Peningkatan tugas dan tanggung jawab tidak diikuti dengan sumber daya manusia yang ada, dimana SDM Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang ada masih terbatas dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
4. Kurangnya pemahaman pada setiap poin yang ada dalam agenda Reformasi Birokrasi serta pelaksanaan budaya kerja yang belum maksimal.
5. Kurang terkelolanya data dan informasi dikarenakan pengumpulan data masih belum kontinu dan banyak hasil kajian yang tidak menggunakan data dan informasi yang akurat.

E. Rekomendasi

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang dihadapi, berikut adalah beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai langkah perbaikan pada tahun anggaran berikutnya:

1. Meningkatkan pemahaman terhadap tuisi yang baru, yang disebabkan perubahan organisasi dari badan menjadi direktorat jenderal.
2. Membuat timeline yang berhubungan dengan perencanaan, penganggaran, serta evaluasi untuk dapat digunakan setiap tahunnya.
3. Mengoptimalkan koordinasi internal di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sehingga terjadi sinergi kegiatan antar direktorat dan memperkuat pencapaian *outcome* terkait pembinaan konstruksi.
4. Mensinergikan program dengan lingkungan eksternal baik dengan satminkal lain di Kementerian PUPR maupun dengan institusi pemerintah lainnya, serta masyarakat jasa konstruksi yang lebih luas.
5. Merekomendasikan *review* Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2015-2019 terkait target per tahun *outcome* Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Ditjen Bina Konstruksi Tahun 2016 ini, diharapkan menjadi suatu bahan perbaikan dalam perencanaan kegiatan dan langkah Ditjen Bina Konstruksi dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2015-2019.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pengganti Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diwajibkan untuk menyusun Laporan AKIP, penetapan kinerja dan rencana tindak yang merupakan bagian dari komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP). Adapun sistem kinerja dibangun dan dikembangkan bagi penyelenggara manajemen kinerja melalui upaya: merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Hal ini bertujuan untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian tujuan dalam kerangka pemenuhan visi dan misi presiden.

Selain itu, berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permen PAN dan RB Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi LAKIP, maka diperlukan adanya fasilitasi dalam penyusunan dokumen LAKIP dimana salah satu komponen penting yang perlu dianalisa adalah dokumen rencana aksi dan laporan monitoring evaluasi kinerja. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR terhadap LAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2015, maka terdapat beberapa hal pokok yang memerlukan perhatian, yaitu: 1) Melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja outcome; 2) Menyusun SOP tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil monitoring Target Jangka Menengah; 3) Menerapkan *reward* dan *punishment* pada monitoring rencana kinerja dan memasukkan hal terkait dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan pada Pemanfaatan Rencana Aksi atas kinerja, 4) Menyusun SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up to date* dan jelas, 5) Menyusun alur input-proses-output dan outcome, menyajikan perbandingan data kinerja mengenai

realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis, serta menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada LaKIP berikutnya, dan 6) Menjadikan informasi dalam Laporan Kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan.

Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan dokumen LaKIP dan PK sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan kelengkapan dokumen Rencana Aksi Unit Organisasi Eselon I dan Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dokumen Rencana Aksi tersebut akan secara berjenjang mendukung Dokumen Rencana Aksi Kementerian PU.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan ketentuan pada Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan penataan organisasi dan tata kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Bab IX tentang Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dijabarkan mengenai susunan organisasi di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Adapun Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri atas Unit Eselon II sebagai berikut:

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan strategi, program jangka menengah, dan rencana kerja dan anggaran, serta evaluasi dan laporan kinerja pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya konstruksi;
- b. Pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik Negara Direktorat Jenderal; dan
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pertimbangan hukum, pengolahan data serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, terdapat lima (3) jenis UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. UPT tersebut antara lain: Balai Jasa Konstruksi, Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, dan Balai

Material dan Peralatan Konstruksi. Adapun UPT yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

a. Balai Penerapan Teknologi Konstruksi

Balai Penerapan Teknologi Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Balai Penerapan Teknologi Konstruksi dipimpin oleh seorang kepala. Balai Penerapan Teknologi Konstruksi berlokasi di Jakarta dan memiliki tugas melaksanakan penerapan teknologi konstruksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Penerapan Teknologi Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja peningkatan penerapan teknologi konstruksi;
- b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama peningkatan penerapan teknologi konstruksi;
- c. Pengelolaan informasi teknologi konstruksi;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penyebarluasan materi penerapan teknologi konstruksi;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan penerapan teknologi konstruksi; dan
- f. Penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pelayanan sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga Balai.

b. Balai Material dan Peralatan Konstruksi

Balai Material dan Peralatan Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Balai Material dan Peralatan Konstruksi dipimpin oleh seorang kepala. Balai Material dan Peralatan Konstruksi berlokasi di Jakarta dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Balai Material dan Peralatan Konstruksi mempunyai tugas melakukan peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Material dan Peralatan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi;
- b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi;
- c. Pengelolaan data dan aset bidang material dan peralatan konstruksi;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi; dan
- e. Penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga Balai.

B. Direktorat Bina Investasi Infrastruktur

Direktorat Bina Investasi Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur;
- b. Pelaksanaan, pengembangan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan strategi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur;
- c. Pelaksanaan koordinasi, advokasi, dan fasilitasi di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan investasi infrastruktur;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur dan pembinaan pasar infrastruktur;

- g. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan perusahaan BUMN Perum di Kementerian; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

C. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

D. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

E. Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kompetensi dan produktivitas konstruksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

F. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bersifat mandiri dan melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Berikut adalah UPT di lingkungan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan:

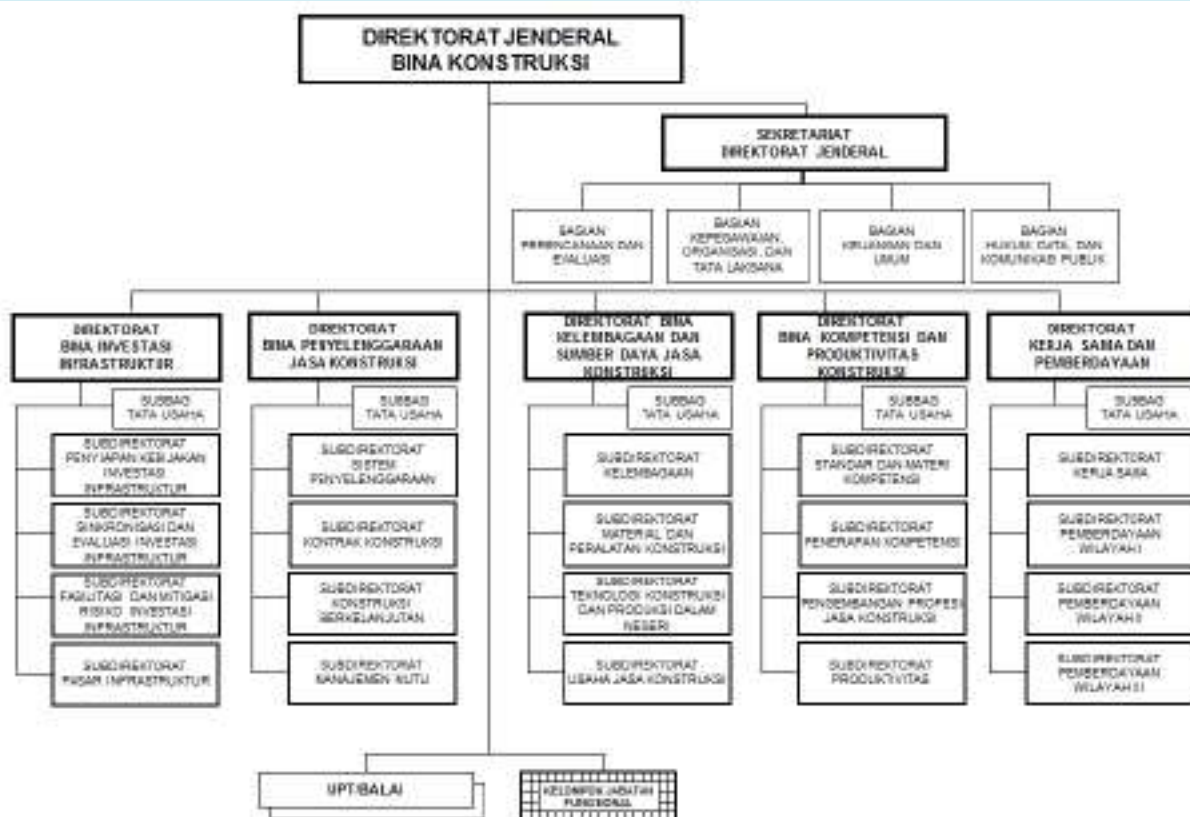
a. Balai Jasa Konstruksi

Balai Jasa Konstruksi berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan. Balai Jasa Konstruksi terdiri dari 7 Balai Jasa Konstruksi yang dibagi berdasarkan wilayah kerja. Balai Jasa Konstruksi memiliki tugas melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pengendalian mutu peningkatan kapasitas jasa konstruksi dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja dengan lembaga pemerintah dan masyarakat di wilayahnya;
- c. Pengelolaan data dan informasi sumber daya jasa konstruksi di wilayahnya;
- d. Pelaksanaan pengendalian mutu peningkatan kapasitas jasa konstruksi dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
- e. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayahnya; dan
- f. Penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga Balai.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI



Bagan 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

1.4. ISU STRATEGIS

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bersifat strategis serta lebih menuju ke arah perumusan kebijakan dan standarisasi teknis. Harapan masyarakat konstruksi yang besar terhadap Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam melakukan pembinaan tidak hanya pada lingkup PUPR melainkan pada keseluruhan dunia konstruksi Indonesia sehingga memberi konsekuensi tanggung jawab yang besar pula khususnya terhadap pencapaian target organisasi.

Isu strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang saat ini diperhatikan/dikedepankan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma investasi infrastruktur untuk pemenuhan gap pendanaan non APBN (Rp626 Triliun) melalui pola simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
2. Penguatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui pelelangan dini.
3. Penyiapan kelengkapan regulasi dan kelembagaan sebagai tindaklanjut RUU Jasa Konstruksi.
4. Peningkatan layanan informasi kebutuhan/ketersediaan sumber daya dan rantai pasok konstruksi serta struktur usaha BUJK Nasional/Asing (katalog material, registrasi peralatan konstruksi, pendataan tenaga kerja konstruksi, registrasi lembaga pelatihan kerja konstruksi, dsb).
5. Penataan struktur kompetensi kerja konstruksi (*body of knowledge*), sistem pelatihan konstruksi, dan sistem sertifikasi tenaga kerja.
6. Kerjasama strategis dan peningkatan kelembagaan *stakeholder* pembinaan konstruksi.
7. Pemberdayaan penyediaan SDM konstruksi yang kompeten melalui kegiatan *Mobile Training Unit* (MTU) dan pelatihan mandiri.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Rencana strategis merupakan hasil penurunan dari arah dan tujuan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selama lima tahun ke depan, dimana Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memposisikan diri sebagai “Pembina konstruksi dan investasi yang berintegritas tinggi, andal, dan kokoh”. Berdasarkan alur pengembangan yang telah dirumuskan sebelumnya, disusun rincian program strategis dan indikator serta target yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2015-2019. Program dan indikator tersebut dijabarkan berdasarkan masing-masing misi, proses bisnis internal (pendukung), sumber daya untuk belajar dan tumbuh, dan perspektif finansial (anggaran) yang merupakan komponen-komponen yang bila disatukan secara sinergis maka akan membentuk sebuah bangunan utuh, yaitu Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang berintegritas tinggi, andal, dan kokoh untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi, menuju konstruksi Indonesia yang unggul dan mandiri demi terwujudnya kenyamanan lingkungan yang terbangun.

Memperhatikan analisis situasi baik internal dan eksternal, maka tujuan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2019 diwujudkan melalui pencapaian lima sasaran program sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional;
2. Meningkatnya kinerja BUKK kualifikasi besar;
3. Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan administrasi kontrak;
4. Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten; dan
5. Meningkatnya utilitas produk unggulan.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dan sejalan dengan meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi, upaya yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam mencapai sasaran tersebut juga harus meningkat, baik dalam skala kuantitas maupun kualitasnya. Keberhasilan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam menjawab tantangan yang dihadapi sangat tergantung dari

keberhasilannya dalam menyiapkan organisasi dan tata kelola Direktorat Jenderal Bina Konstruksi serta sumber daya yang diperlukan.

2.1.1. VISI DAN MISI

Berdasarkan arahan dari presiden, bahwa setiap kementerian memiliki fungsi operasional dalam mendukung pencapaian visi dan misi presiden yang tertuang di dalam Nawacita Presiden sebagai berikut:

1. Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara
2. Membuat Pemerintah Tidak Absen Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya
- 3. Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan**
4. Menolak Negara Lemah Dengan Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya
- 5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia**
- 6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional**
- 7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik**
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Memperteguh Ke-bhineka-an dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Unsur Nawacita Presiden yang difokuskan dalam program Pembinaan Konstruksi adalah poin 3, 5, 6 dan 7. Selain itu, berdasarkan RPJMN 2015-2019, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selaras dengan tertib penyelenggaraan, produktivitas Badan Usaha, volume perusahaan, penggunaan dan nilai tambah dalam negeri, serta penguasaan pasar. Berdasar kepada Rencana Strategis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, **visi** Kementerian adalah **“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sesuai dengan program utamanya yaitu pembinaan konstruksi, berperan dalam pengembangan konstruksi nasional, pembinaan penyelenggaraan konstruksi,

pembinaan produktivitas badan usaha dan sumber daya konstruksi, serta pemberdayaan tenaga kerja konstruksi dan masyarakat dalam rangka Mewujudkan terciptanya industri konstruksi yang mandiri, produktif dan berdaya saing dengan dilandasi iklim usaha yang sehat, sumber daya manusia yang kompeten dan menggunakan teknologi unggulan.

Adapun **Misi** Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berangkat dari misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat poin 4 yaitu:

“Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan pedesaan, dalam kerangka NKRI”

2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan Rencana Strategis DJBK 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi dan investasi yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
2. Berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang produktif, efisien dan efektif, serta berkelanjutan;
3. Berperan aktif dalam menciptakan pelaku, SDM, dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, profesional, dan berdaya saing tinggi;
4. Memelopori penciptaan informasi konstruksi dan terpenuhinya sumber daya konstruksi; dan
5. Mempelopori pengkajian, penyebarluasan, dan penerapan inovasi teknologi, investasi dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan.

Adapun **indikator kinerja tujuan** Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan sasaran umum Rencana Strategis DJBK 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1

- Terwujudnya Roadmap Pembinaan yang sesuai dengan perkembangan yang ada
- Peningkatan penyelenggaraan pembinaan baik di pusat maupun di daerah
- Peningkatan fungsi dan peran pembinaan melalui regulasi

2. Tujuan 2

- Peningkatan investasi (konstruksi) infrastruktur yang katalis dan inovatif.
- Peningkatan kinerja sistem penyelenggaraan konstruksi yang efisien dan efektif.

3. Tujuan 3

- Dukungan rantai pasok konstruksi yang memadai
- Peningkatan kapasitas LPJK yang kokoh dan mandiri
- Peningkatan kompetensi SDM Konstruksi
- Peningkatan kapasitas pembinaan yang menyeluruh dan merata

4. Tujuan 4

- Dukungan rantai pasok konstruksi yang memadai
- Tersedianya informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi
- Peningkatan kerjasama dan partisipasi stakeholder konstruksi untuk mendukung ketersediaan informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi
- Terbuka akses informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi bagi seluruh stakeholder

5. Tujuan 5

- Peningkatan kualitas Produk dan Layanan dengan pemberdayaan Litbang
- Peningkatan kinerja Litbang melalui peningkatan fungsi dan peranan, kerjasama dan partisipasi stakeholder, dan sistem pengelolaan beserta pengadaan dalam menjalankan Litbang
- Peningkatan kerjasama dan partisipasi stakeholder konstruksi untuk mendukung kegiatan litbang konstruksi

- Tersebarnya informasi produk dan layanan

Sesuai dengan konsep restrukturisasi program dan kegiatan yang dimotori oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, masing-masing Unit Eselon I hanya memiliki dan bertanggungjawab atas satu program. Adapun **sasaran strategis** dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan Rencana Strategis DJBK 2015-2019 adalah “**Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional**”.

2.1.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai program dan kegiatan yang dimotori oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, masing-masing Unit Eselon I hanya memiliki dan bertanggungjawab atas satu program. Satu-satunya program yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah **Program Pembinaan Konstruksi** dengan indikator kinerja *outcome* program adalah Meningkatkan Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional yang diukur dari tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional. Program tersebut diukur berdasarkan **sasaran program** sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional.
2. Meningkatkan persentase BUJK yang berkualifikasi besar.
3. Meningkatkan tertib penyelenggaraan konstruksi.
4. Meningkatkan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten.
5. Meningkatkan utilitas produk unggulan.

Sasaran program dicapai dengan pengukuran indikator kinerja yang tertuang di dalam perjanjian kinerja. Pada Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi TA 2015-2019 sudah tidak memuat **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan diganti dengan indikator kinerja sasaran. **Indikator kinerja sasaran** Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk menjawab sasaran program adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan rasio kapitalisasi oleh investor nasional.
2. Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi besar.
3. Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi.
4. Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten.
5. Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan.

Penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisir. Indikator kinerja dimaksud dibuat dengan memperhatikan kaidah-kaidah **SMART** : (1) spesifik dan jelas (**Specific**), (2) dapat diukur secara obyektif (**Measurable**), (3) dapat dicapai (**Achievable**), (4) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (**Relevant**), dan (4) tidak bias (**Transparent**).

Target jangka menengah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang berselaras dengan target Rencana Strategis Kementerian PUPR dan RPJMN 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Target Jangka Menengah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
PROGRAM 2 : PEMBINAAN KONSTRUKSI								
SASARAN PROGRAM								
1	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional							
1	Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	%	3	3	3	3	3	15
2	Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar							
1	Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi Besar	%	18	18	18	18	18	90
3	Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan administrasi kontrak							
1	Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi	%	8	8	8	8	8	40
4	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten							
1	Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	%	2	4	5	7	9	27
5	Meningkatnya utilitas produk unggulan							
1	Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan	%	3	3	3	3	3	15

Sumber: Perjanjian Kinerja DJBK (2015)

Adapun **kegiatan** Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berjumlah 6 (enam) buah sesuai dengan jumlah Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi;
2. Pembinaan Investasi Infrastruktur;
3. Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi;

4. Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
5. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; dan
6. Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi.

Program dan Kegiatan-Kegiatan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan cara untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang termuat di dalam Rencana Strategis DJBK 2015-2019.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja atau Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah Rencana Kinerja pada tahun bersangkutan yang berasal dari Dokumen DIPA (Dokumen Anggaran) dan Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi TA 2015-2019 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja output dan target kinerja sesuai dengan tujuan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang selaras dengan visi misi Presiden yaitu NAWACITA sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1) PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI			
1	Meningkatnya kapabilitas kontraktor oleh investor nasional	1. Peningkatan rasio kapabilitas kontraktor oleh investor nasional	1,5%
2	Meningkatnya persentase BLK yang berkualitas besar	2. Persentase kontrak BLK menjadi berkualitas besar	9%
3	Meningkatnya terealisasi pembelegan konstruksi	3. Persentase realisasi tingkat terealisasi penyelesaian konstruksi	4%
4	Meningkatnya SEM penyedia jasa konstruksi yang kredibel	4. Persentase kontrak SEM penyedia jasa konstruksi yang kredibel	2%
5	Meningkatnya utilisasi produk unggulan	5. Persentase realisasi tingkat utilisasi produk unggulan	1,4%

Program:
1. Pembinaan Konstruksi

Anggaran
Rp 121.500.000,00
JAKARTA, JUNE 2016

DIREKTOR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI

YUSUF TOYER

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

N. BASUNI HADIRIL, S.SD

Sumber: Perjanjian Kinerja DJBK (2016)

Pada dokumen Perjanjian Kinerja tersebut, tercantum sasaran program, indikator kinerja dan target. **Indikator Kinerja Utama** merupakan Indikator Kinerja yang telah disusun berdasarkan Renstra.

2.3. METODE PENGUKURAN

Di dalam organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, terdapat 3 (tiga) komponen utama yang saling bersinergi dalam mewujudkan *outcome* Ditjen Bina Konstruksi. Ketiga komponen tersebut adalah :

1. Manajemen
2. Kerjasama dan pemberdayaan
3. Substansi Direktorat

Saat ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sedang membangun sistem informasi yang terintegrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi akan melakukan pemetaan semua materi monitoring dan evaluasi yang akan difasilitasi oleh Aplikasi Instrumen Monev berbasis *web* dan *mobile* untuk kemudahan akses dan efisiensi pelaksanaan di lapangan. Aplikasi ini akan memudahkan dalam hal mengumpulkan data, menyajikan materi survey dan melaksanakan analisa atau formula dari data yang diolah. Sistem tersebut akan mengumpulkan data-data pencapaian target kinerja dari beberapa instansi yang berkaitan dengan pencapaian *outcome* dan output Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Instansi yang dimaksud termasuk dari unit kerja yang ada di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun dari instansi lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS Ketenagakerjaan, LPJKN, IAPPI, Asosiasi-asosiasi yang berhubungan dengan pembinaan konstruksi seperti AP3I dan A2K4, serta instansi lain yang memiliki data terkait pembinaan konstruksi di Indonesia.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2016 memiliki 5 (lima) sasaran program dengan 5 (lima) *outcome*. Setiap indikator kinerja *outcome* tersebut, telah ditetapkan target kinerja masing-masing pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Adapun pencapaian kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target pada tahun 2016.

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dihitung berdasar kepada rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\alpha + \beta_1 + \gamma = \delta_1$$

Keterangan:

- α = Manajemen
 β_1 = Substansi Direktorat
 γ = Kerja Sama dan Pemberdayaan
 δ_1 = Outcome 1 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Masing-masing komponen dalam rumus pencapaian kinerja Direktorat jenderal Bina Konstruksi memiliki bobotnya masing-masing, dengan penjabaran sebagai berikut:

- Manajemen = 30%
 Substansi Direktorat = 20%
 Kerja Sama dan pemberdayaan = 50%



Diagram 1. Komposisi Outcome Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Pencapaian outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didukung oleh pencapaian dari manajemen, substansi dan kerja sama. Adapun subkomponen dari masing-masing komponen pendukung dalam pencapaian *outcome* Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Subkomponen Pencapaian Komponen Outcome

KOMPONEN PENCAPAIAN OUTCOME	UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB
MANAJEMEN	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
SUBSTANSI	1. Direktorat Bina Investasi Infrastruktur 2. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 3. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi 4. Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi 5. Balai Penerapan Teknologi Konstruksi 6. Balai Material dan Peralatan Konstruksi 7. Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh 8. Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang 9. Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta 10. Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya 11. Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin 12. Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar 13. Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura 14. Manajemen dan Pengendalian Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah 15. Satker Pelaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi DI Yogyakarta 16. Satker Pelaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi Kalimantan Timur 17. Satker Pelaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi Sulawesi Selatan
KERJA SAMA	1. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Adapun baseline dan target yang ditetapkan untuk dicapai pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Target dan Baseline Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE TAHUN 2014	TARGET 2016	SUMBER
1	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	Nilai konstruksi yang diselesaikan pada tahun 2014 adalah 509 T	1,5%	BPS
2	Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar	Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi besar	Berdasarkan data LPJK tahun 2014, terdapat 139 BUJK kualifikasi B2	9%	Dit. Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi
3	Meningkatnya tertib penyelenggaraan konstruksi	Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi	Indikator tertib penyelenggaraan melalui penetapan lelang, administrasi kontrak, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu	4%	Dit. Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

			terdapat 218 proyek tertib penyelenggaraan		
4	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SDM konstruksi sebanyak 6.885.401 orang Rasio yang diharapkan adalah 40% <i>Skilled Labour</i> : 60% <i>Unskilled Labour</i> Jumlah SDM penyedia jasa konstruksi <i>Skilled Labour</i> adalah 166.247 orang (6,04%). 	2%	
5	Meningkatnya utilitas produk unggulan	Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan	Volume penggunaan beton pracetak terhadap beton adalah sebesar 15%	1,5%	

2.4. TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA

Target Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2016 ditetapkan pada Rencana Strategis 2015-2019. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki satu program utama yaitu Program Pembinaan Konstruksi. Dalam mencapai program pembinaan, maka dilihat melalui pencapaian sasaran program pembinaan konstruksi. Berikut merupakan sasaran program pembinaan konstruksi beserta dengan indikator kinerja program pada Tahun 2016:

Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja Program berdasar Renstra

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2015
1	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	3%
2	Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar	Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi besar	18%
3	Meningkatnya tertib penyelenggaraan konstruksi	Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi	8%
4	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	4%
5	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan	3%

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (2015-2019)

Pada tahun 2016, pagu berdasarkan Renstra adalah sebesar Rp923.769.000.000,- namun berdasarkan DIPA TA 2016 adalah sebesar Rp639.549.456.000,-. Oleh karena itu, diputuskan pada saat pembuatan perjanjian

kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bahwa target yang akan dicapai pada tahun 2016 merupakan 50% dari target yang dicanangkan pada Rencana Strategis 2015-2019. Adapun sasaran dan indikator kinerja program untuk Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Sasaran dan Indikator Program berdasar Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2016
1	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	1,5%
2	Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar	Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi besar	9%
3	Meningkatnya tertib penyelenggaraan konstruksi	Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi	4%
4	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	2%
5	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan	1,5%

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (2016)

Pencapaian target program didukung oleh kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Target pencapaian indikator kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah target sekretariat dan setiap direktorat yang ada di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Adapun target pencapaian indikator kinerja kegiatan seperti yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2015-2019 untuk pencapaian TA 2016 pada setiap direktorat dan sekretariat sesuai dengan yang tertuang dalam PK masing-masing Unit Eselon II adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Target Pencapaian Indikator Kinerja pada Rencana Strategis 2015-2019

INDIKATOR KINERJA		TARGET	
DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR			
Pengaturan pembinaan investasi infrastruktur		4	NSPK
1	Jumlah Draft NSPK Pembinaan Investasi Infrastruktur	4	NSPK
Pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur dan Pengelolaan Risiko		4	Profil
1	Jumlah profil pembinaan investasi infrastruktur dan pengelolaan risiko	4	Profil
Output Tambahan		13	Bulan
1	Jumlah Layanan Perkantoran	13	Bulan
DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI			
Pengaturan pembinaan penyelenggaraan konstruksi		7	NSPK
1	Jumlah draft NSPK pembinaan penyelenggaraan	7	NSPK

INDIKATOR KINERJA		TARGET	
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan konstruksi		5	Profil
1	Jumlah profil pembinaan dan penyelenggaraan konstruksi	5	Profil
Output Tambahan		13	Bulan
1	Jumlah Layanan Perkantoran	13	Bulan
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI			
Pengaturan pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi		8	NSPK
1	Jumlah draft NSPK pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi	8	NSPK
Pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi		8	Profil
1	Jumlah profil pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi	8	Profil
Output Tambahan		13	Bulan
1	Jumlah Layanan Perkantoran	13	Bulan
DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI			
Pengaturan pembinaan kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi		30	Draft NSPK
1	Jumlah draft NSPK kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi	30	Draft NSPK
Pemantauan dan evaluasi kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi		3	Profil
1	Jumlah profil kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi	3	Profil
Output Tambahan		13	Bulan
1	Jumlah Layanan Perkantoran	13	Bulan
DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI			
Kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi		1	Profil
1	Jumlah profil kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi	1	Profil
Output Tambahan		13	Bulan
1	Jumlah Layanan Perkantoran	13	Bulan
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL			
Layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi		5	Dokumen/Laporan
1	Jumlah layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi	5	Dokumen/Laporan
Output Tambahan		13	Bulan
1	Jumlah Layanan Perkantoran	13	Bulan

Sumber: Rencana Strategis Kementerian PUPR (2015-2019)

BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI

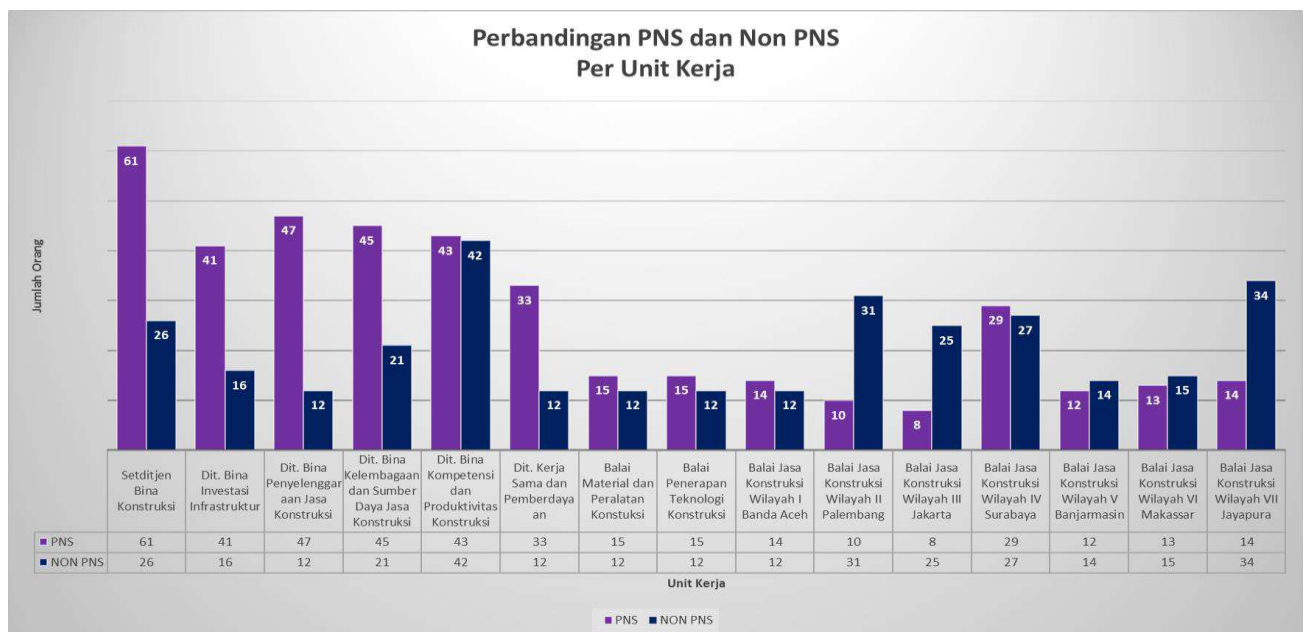
3.1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki total pegawai sebanyak 400 orang PNS dan 311 NON PNS yang tersebar dalam 6 Unit Eselon II dan beberapa balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Adapun detail pegawai pada setiap unit adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah Pegawai DJBK per Unit Kerja

UNIT KERJA	PNS	NON PNS
Setditjen Bina Konstruksi	61	26
Dit. Bina Investasi Infrastruktur	41	16
Dit. Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	47	12
Dit. Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	45	21
Dit. Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	43	42
Dit. Kerja Sama dan Pemberdayaan	33	12
Balai Material dan Peralatan Konstruksi	15	12
Balai Penerapan Teknologi Konstruksi	15	12
Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh	14	12
Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang	10	31
Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta	8	25
Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya	29	27
Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin	12	14
Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar	13	15
Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura	14	34
TOTAL	400	311

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2016)



Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2016)

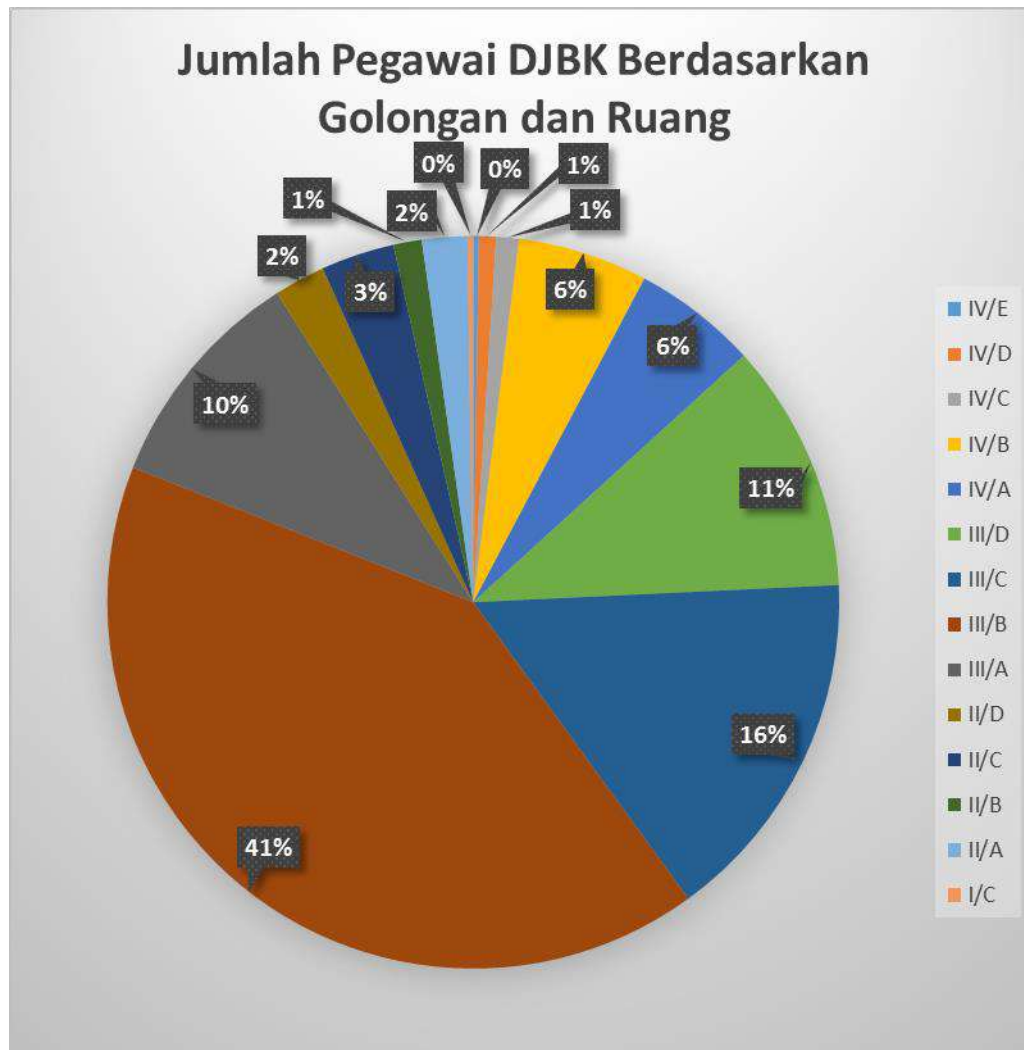
Diagram 2. Jumlah Pegawai DJBK Per Unit Kerja

Berdasarkan golongan dan ruang, sebaran personil Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Golongan dan Ruang

Golongan	I/c	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Jumlah	1	8	5	13	9	40	164	63	44	22	23	4	3	1

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2016)



Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2015)

Diagram 3. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Golongan dan Ruang

Jika dilihat dari sebaran golongan pegawai, sekitar 78% jumlah pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di golongan III dengan rincian sebagai berikut: golongan III/a sebanyak 40 orang (10%), golongan III/b sebanyak 164 orang (41%), golongan III/c sebanyak 63 orang (16%) dan golongan III/d sebanyak 44 orang (11%). Dominasi personil pada tingkat golongan ini, menunjukkan sumber

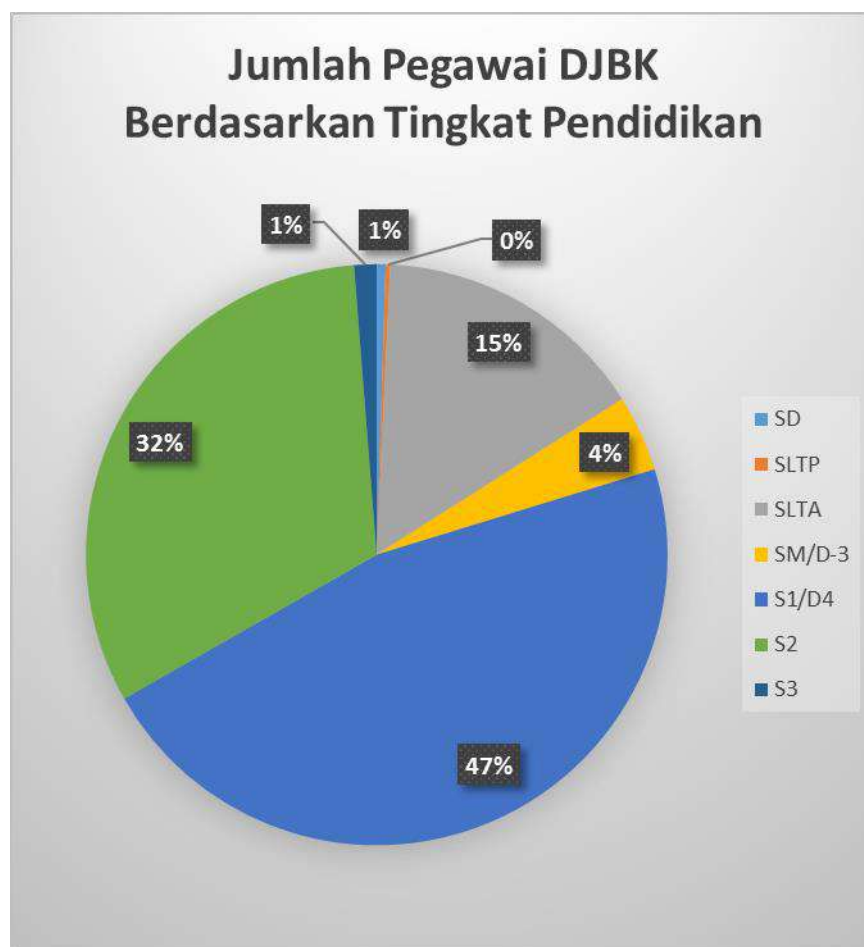
daya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi cukup untuk mendukung pencapaian kinerja dari target yang telah direncanakan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebaran personil Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SD	SLTP	SLTA	SM/D3	S1/D4	S2	S3
2	1	61	17	186	128	5

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2016)



Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2016)

Diagram 4. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika dilihat dari tingkat pendidikan pada tahun 2015, terjadi peningkatan pegawai dengan tingkat pendidikan S1 dari 180 menjadi 186 orang. Jumlah saat ini, hampir 80% dari total pegawai memiliki jenjang pendidikan S1/D4 dan S2, dimana sebagian besar merupakan staf potensial yang dapat dikembangkan lagi.

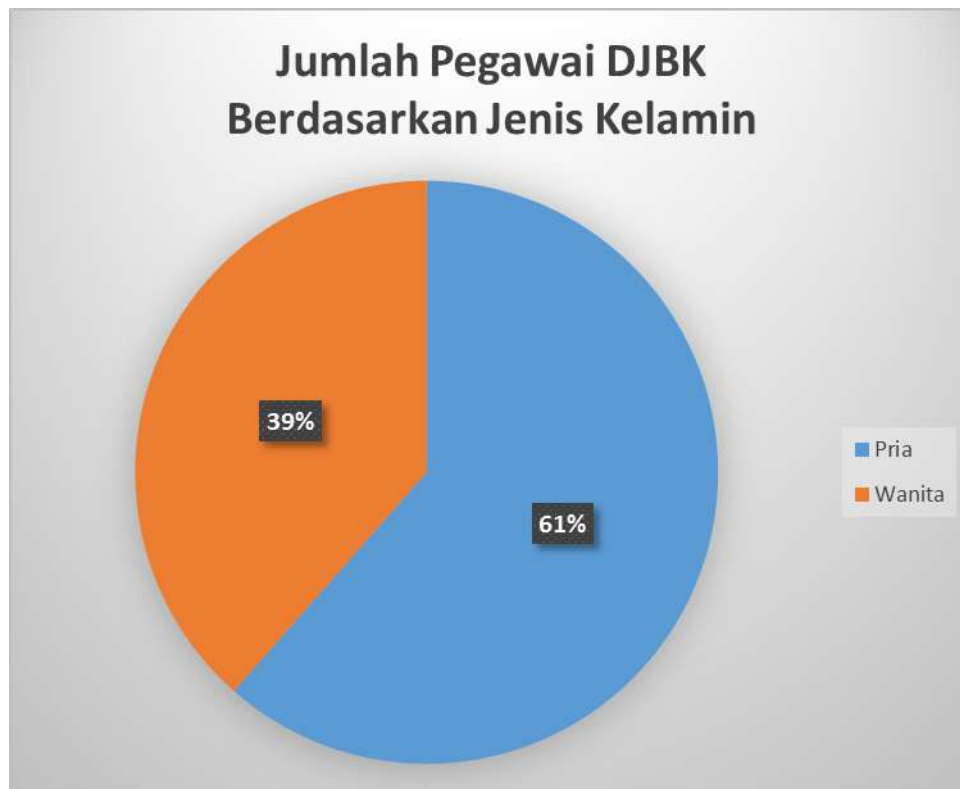
Sedangkan, staf pendukung dengan tingkat pendidikan SLTA adalah 61 orang atau sekitar 15% dari total pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Berdasarkan jenis kelamin, sebaran personil Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Pria	246
Wanita	154
TOTAL	400

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2016)



Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2016)

Diagram 5. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai DJBK adalah berjenis kelamin pria yaitu sebesar 61%. Adapun jumlah pegawai wanita di lingkungan DJBK adalah sebesar 154 orang dengan persentase terhadap keseluruhan adalah 39%.

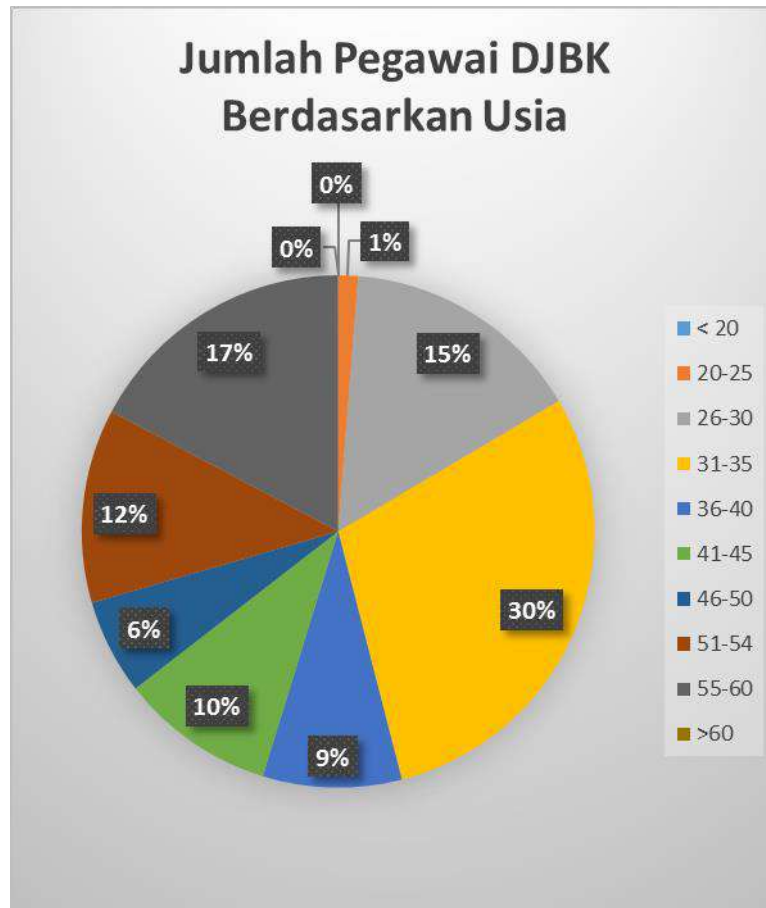
Selain berdasarkan golongan dan ruang, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin, data pegawai berdasarkan pada usia juga dapat menjadi cerminan dari

tingkat produktivitas yang dapat dicapai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Berikut merupakan sebaran pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan usia:

Tabel 12. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Usia

< 20	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	> 60
0	5	61	118	35	39	24	49	69	0

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2016)



Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2016)

Diagram 6. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Usia

Kelompok usia paling besar adalah pada rentang usia 31-35 tahun yaitu sebanyak 118 orang atau sekitar 30% dari total pegawai PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Hal ini merupakan potensi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam hal regenerasi di masa yang akan datang.

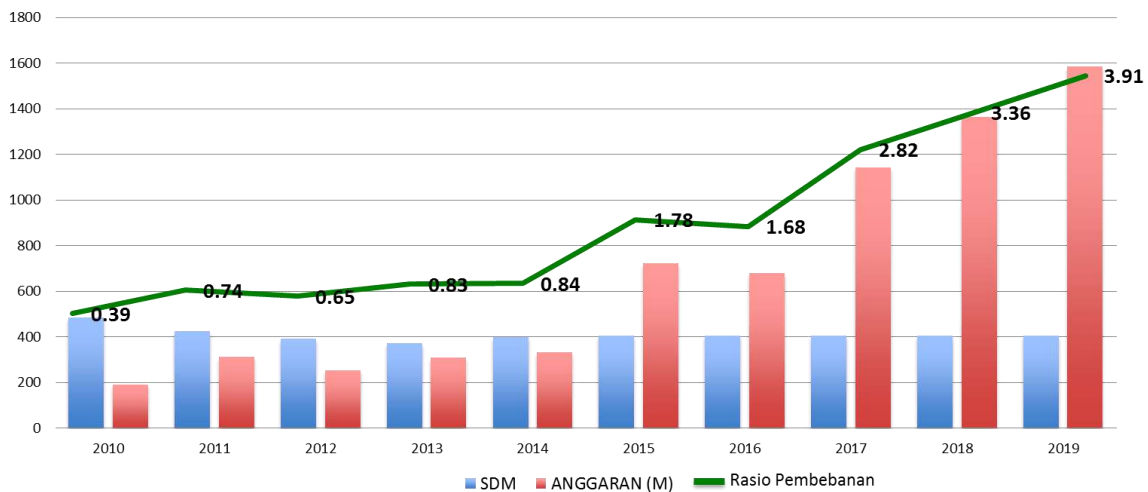
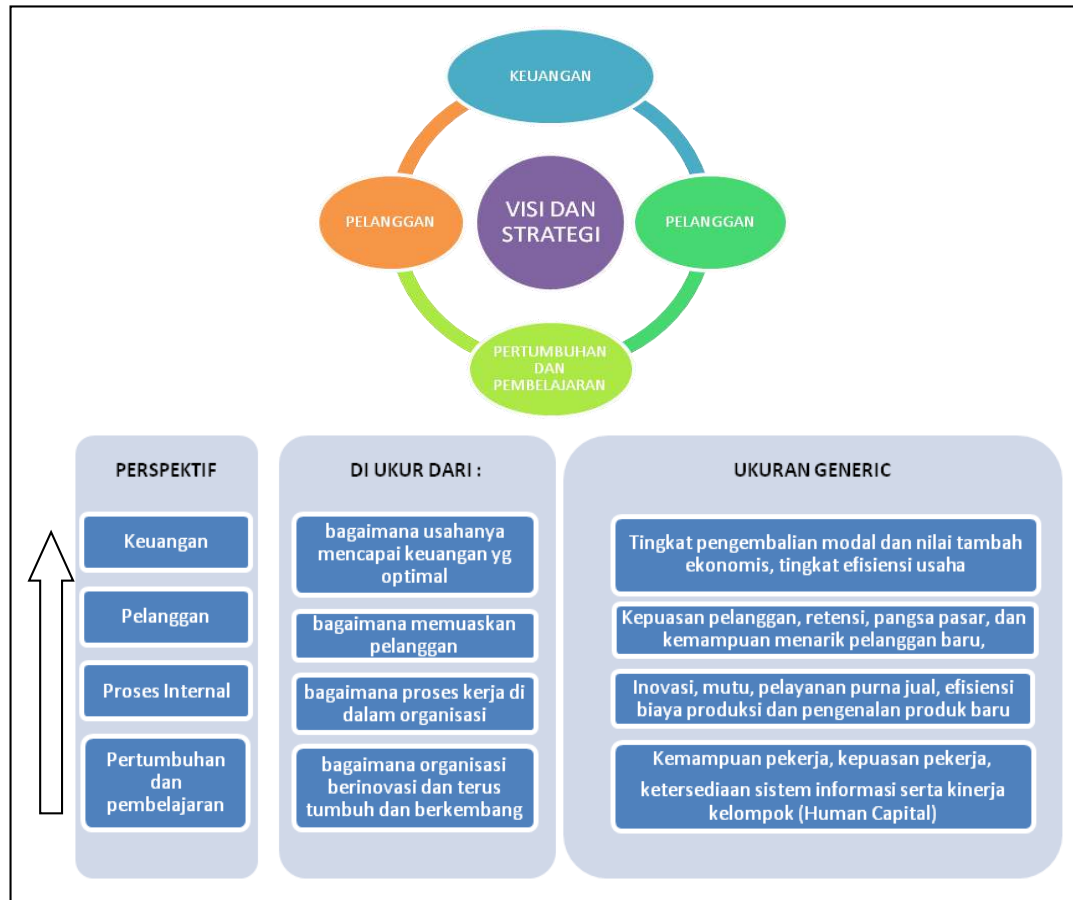


Diagram 7. Diagram SDM vs Anggaran DJBK

Pada grafik di atas, dapat dilihat mengenai pola antara SDM Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan anggaran setiap tahunnya. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa rasio pembebanan anggaran per orang semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014, rasio pembebanan adalah pada angka 0,84. Sedangkan pada tahun 2015 menjadi 1,78. Hal ini menyebabkan beban kerja di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga semakin tinggi sebagai konsekuensi dari berubahnya struktur organisasi dan naiknya pagu anggaran pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 terjadi penurunan pagu anggaran sehingga rasio pembebanan menjadi menurun hanya sekitar 1.68. Namun, hal tersebut tetap diperberat dengan perubahan bentuk dari badan menjadi direktorat jenderal yang menyebabkan tugas dan fungsi menjadi lebih besar. Dalam menangani tantangan tersebut, penyusunan **indikator kinerja individu telah diselaraskan dengan indikator kinerja organisasi** sehingga dapat terciptanya pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan pengukuran outcome saja tanpa pengendalian kinerja tidak akan mengkomunikasikan bagaimana outcome tersebut dapat dicapai atau diperoleh. Salah satu metode pengukuran kinerja terintegrasi adalah metode *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* adalah sekumpulan ukuran kinerja yang mencakup 4 perspektif yaitu: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Keempat perspektif tersebut berkaitan antara satu dengan yang lain.

Hubungan antara keempat perspektif digambarkan sebagai suatu kesatuan sebagaimana digambarkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Hubungan Empat Perspektif *Balanced Scorecard*

Indikator Kinerja Individu diukur menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Dalam kegiatan pengumpulan dan merekap SKP seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi telah menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi langsung mulai dari inputing hingga pada penilaian SKP di akhir tahun. Sistem aplikasi tersebut mempermudah dalam penghitungan sekaligus menjadi database kinerja setiap individu di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi sehingga pelaksanaan monitoring kinerja individu dapat dilaksanakan dengan waktu yang lebih singkat. Adapun salah satu contoh indikator kinerja individu di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

TIDAKLAH MAMPU ATAU PEGAWAI
BIMBINGAN PERUBAH URAIAN DAN PERJANJIAN SASAT

A. PEMBAT PUSAK		B. PEMERIKSA NEGEBI DPM YANG DINILAI					
NO	URAIAN	NO	URAIAN				
1	Nama	1	Nama				
2	JEP	2	JEP				
3	Pengantar/Col. Ruang	3	Pengantar/Col. Ruang				
4	Jabatan	4	Jabatan				
5	SASI (sasi)	5	SASI (sasi)				
11. Diklat Hutan, sasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		11. Rudi Triadi, S.T, Eng, Sp. 10273850138020000 Pembina Utama Madya / PWN Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Inspeksi Bina Konstruksi					
NO	ISI KEGIATAN TAREK (SASAT)	NO	SASAT				
1	2	3	4	5	6	7	
			BUKTI/OUTPUT	RUBRIK/RTG	MAKRU	REMARK	
1	Menyelenggarakan pelepasan pelepasan rasio kapasitas konstruksi dari inspeksi material		1.0	%	100	10	Batas
1	Menyelenggarakan pelepasan pelepasan prosedur SAK yang berkeadilan batas		2	%	100	12	Batas
1	Menyelenggarakan pelepasan pelepasan rasio penyediaan: bahan-bahan		4	%	100	10	Batas
4	Menyelenggarakan pelepasan pelepasan SAK Penyedia, baik kerangka atau tembok		3	%	100	12	Batas
1	Menyelenggarakan pelepasan pelepasan daftar produk unggulan		1.0	%	100	10	Batas

PEMBANTU

 R. SUDI SOVIK, M.Eng, Sp.
 1020001138051000

MENYALAHKAN
 10 JUNI 2016
 R. SUDI SOVIK, M.Eng, Sp.

 R. SUDI SOVIK, M.Eng, Sp.
 1020001138051000

Gambar 3. Contoh Sasaran Kerja Pegawai Ditjen Bina Konstruksi

Jika tidak terjadi penambahan SDM pada tahun-tahun berikutnya, diperkirakan pada tahun 2019 rasio pembebanan dapat menjadi 3,91. Hal ini berdampak kepada besarnya beban kerja pada masing-masing pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan terkait peningkatan kapasitas SDM agar dapat menunjang kinerja Ditjen Bina Konstruksi yang semakin strategis.

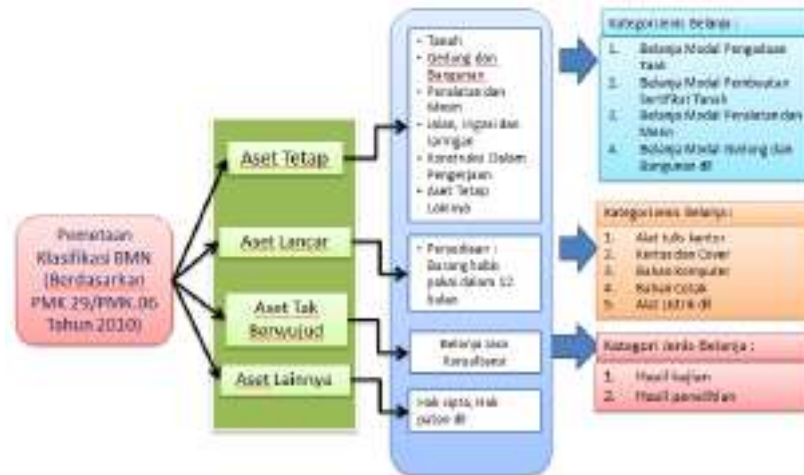
3.2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Bina Konstruksi meliputi semua Barang Milik Negara (BMN) yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah antara lain:

- ✓ Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- ✓ Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- ✓ Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau

- ✓ Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Klasifikasi BMN berdasarkan KepMenKeu No. 532/KM.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Bagian Keuangan dan Umum (2016)

Bagan 2. Pemetaan Klasifikasi Barang Milik Negara

Salah satu aset sarana yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah bangunan kantor yang digunakan selama ini. Adapun luasan bangunan dan tanah keseluruhan aset Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 13. Luas Tanah dan Bangunan Kantor Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

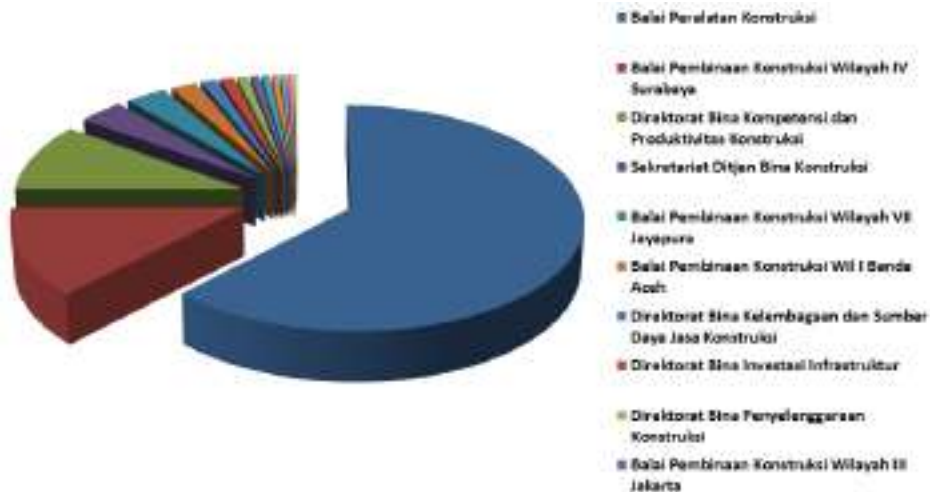
NO	UNIT KERJA	LUAS TANAH (m ²)	LUAS BANGUNAN (m ²)	KETERANGAN
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.428	939,8	Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	1.428	814,7	
3	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1.428	814,7	
4	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	1.428	675	
5	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	-	816	Tanah milik Diklat Sekjen PUPR
6	Direktorat Kerja Sama & Pemberdayaan	802	802	Pinjam Pakai Ditjen Bina Marga

NO	UNIT KERJA	LUAS TANAH (m ²)	LUAS BANGUNAN (m ²)	KETERANGAN
7	Balai Penerapan Teknologi Konstruksi	21.744	240	Pinjam Pakai Dit. BPKP
8	Balai Material dan Peralatan Konstruksi	53.760	2.304	Milik Sendiri
9	Balai Jasa Konstruksi Wil I Banda Aceh	7500	756	Hak Pakai UNSYIAH
10	Balai Jasa Konstruksi Wil II Palembang	5.345	805,77	Milik Pemprov Sumsel
11	Balai Jasa Konstruksi Wil IV Surabaya	20.000	1.195	Milik Sendiri
12	Balai Jasa Konstruksi Wil V Banjarmasin	2.100	612	Pinjam Pakai Ditjen. SDA
13	Balai Jasa Konstruksi Wil VI Makasar	15.000	1.073	Tanah Pinjam Pakai Pemprov Sulsel
14	Balai Jasa Konstruksi Wil VII Jayapura	6.000	3.955	Pinjam Pakai Ditjen. Bina Marga
15	Manajemen dan Pengendalian Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah	2.116	90	Pinjam Pakai Wisma Karya

Sumber: Bagian Keuangan dan Umum (2016)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa aset tanah dan bangunan yang merupakan milik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah yang saat ini ditempati oleh Balai Material dan Peralatan Konstruksi dan Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah IV Surabaya dengan luas tanah total 73.760 m² dan luas bangunan 3.499 m². Adapun luas bangunan dan tanah milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan diurus oleh Biro Umum masing-masing seluas 3.244,2 m² dan 5.712 m². Sebagian besar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terutama yang berdomisili di daerah, masih meminjam-pakai tanah dan bangunan milik unit kerja lain seperti milik Direktorat Jenderal Bina Marga, Universitas Syiah Kuala, Pusdiklat PU, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Wisma Karya dengan total luas bangunan 7.528 m² dan luas tanah 60.607 m². Dapat disimpulkan bahwa lebih dari 52% luas bangunan yang ditempati unit kerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi masih dalam status pinjam-pakai.

Selain bangunan, sarana lain yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah aset pelatihan, dan pembinaan konstruksi. Adapun sebaran neraca aset yang dimiliki Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan Satuan Kerja per tanggal 30 Juni 2015 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Sumber: Bagian Keuangan dan Umum, 2015

Diagram 8. Sebaran Neraca Aset Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Dapat dilihat bahwa sebaran nilai aset paling besar berada di Balai Peralatan Konstruksi. Hal ini dikarenakan tugas balai tersebut untuk melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan keterampilan dan keahlian teknik konstruksi sehingga perlu menyelenggarakan fungsi dalam penyiapan sarana dan prasarana kegiatan pelatihan konstruksi.

Dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, terdapat beberapa permasalahan dalam penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada periode tahun 2015 ini. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Terdapat beberapa unit Kendaraan Dinas Bermotor (KDO) dalam kondisi rusak berat namun belum selesai proses penghapusan.
2. Terdapat 2 unit Kendaraan Dinas Bermotor (KDO) yang digunakan oleh pegawai non aktif (pensiunan) dan pegawai diluar Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
3. Temuan BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2015 terdapat bukti penggunaan aset tanah oleh pegawai dan pensiunan tanpa didukung oleh bukti-bukti penggunaan yang sah.
4. Terdapat beberapa bangunan gedung milik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang dibangun di atas tanah milik Satminkal lain.
5. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang harus terkoneksi dengan internet sehingga tidak terintegrasi dengan aplikasi SAIBA.

3.3. DIPA

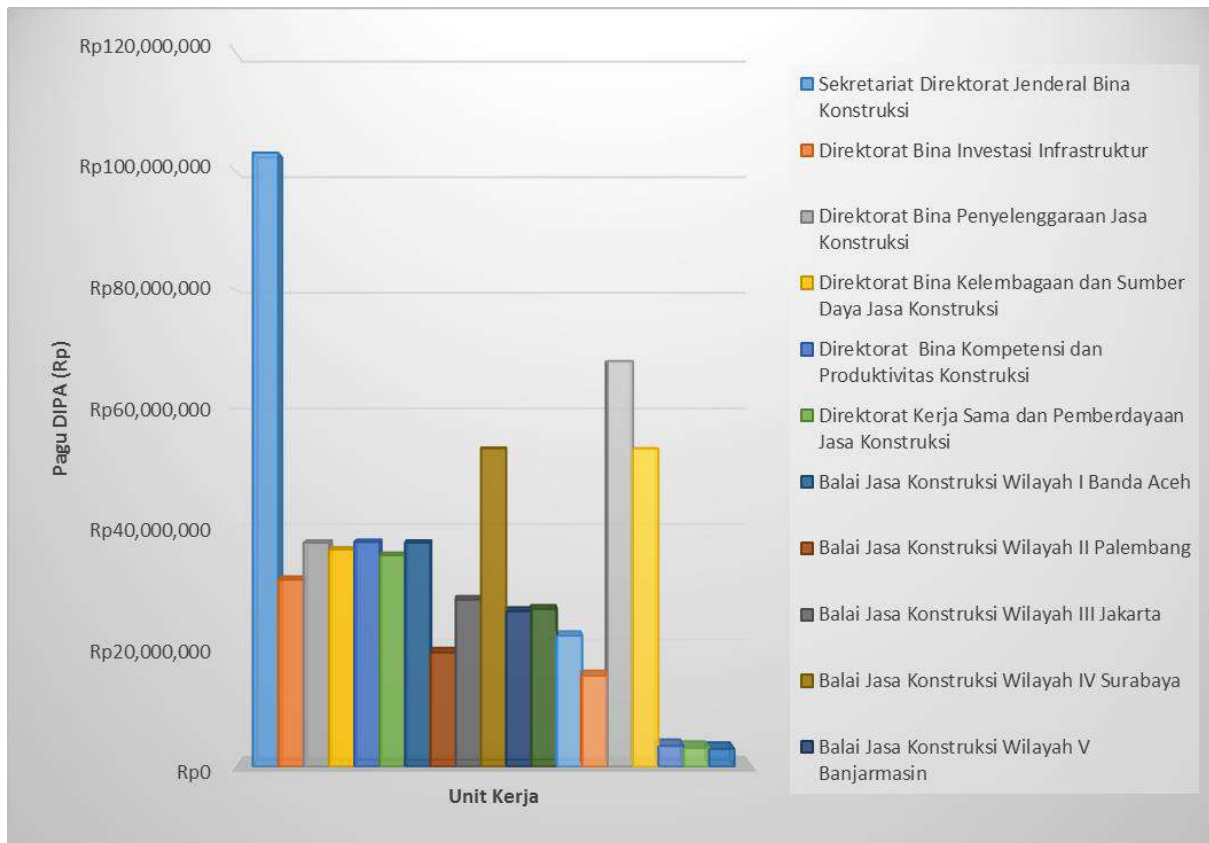
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang pada awal Tahun 2016 mendapat alokasi sebesar Rp681.971.765.000,-, akan tetapi melalui APBN-Perubahan pada bulan Juli terbit Inpres No. 4 Tahun 2016 tentang langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA 2016 mengalami perubahan menjadi Rp633.571.765.000,-. Lalu, pada bulan September 2016 terbit Inpres No. 8 Tahun 2016 sehingga Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan penghematan (*self-blocking*) sebesar Rp12M dalam pagu akhir TA 2016. Pada bulan November, terdapat revisi penambahan Gaji Tunjangan Kinerja sebesar Rp5,98M yang membuat pagu akhir Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah Rp639.549.456.000,-. Adapun rincian alokasi anggaran masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016

NO	UNIT KERJA ESELON II	PAGU
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	102.819.128
2	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	31.330.563
3	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	37.497.322
4	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	36.353.995
5	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	37.618.269
6	Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	35.421.471
7	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh	37.498.285
8	Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang	19.140.992
9	Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta	27.977.088
10	Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya	53.331.061
11	Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin	26.071.854
12	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar	26.427.644
13	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura	21.941.737
14	Balai Penerapan Teknologi Konstruksi	15.239.382
15	Balai Material dan Peralatan Konstruksi	67.937.266
16	Manajemen dan pengendalian Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah	53.277.521
17	Pelaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi DI Yogyakarta	3.495.289
18	Pelaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Kalimantan Timur	3.178.409
19	Pelaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	2.992.180
TOTAL		639.549.456

Sumber: Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon II dan Satker DJBK, 2016

Dapat dilihat pada diagram di bawah ini bahwa satuan kerja Eselon II dengan pagu terbesar adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Hal ini dikarenakan pagu tersebut termasuk didalamnya adalah Gaji Pegawai unit kerja yang berlokasi di Jakarta. Sedangkan, pagu terkecil adalah oleh Pelaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



Sumber: Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon II dan Satker DJBK (2016)

Diagram 9. Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016

BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 CAPAIAN KINERJA

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dalam penggunaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2015-2019. Tahun kedua pelaksanaan diharapkan dapat lebih baik dan tetap konsisten terhadap pencapaian di Tahun 2016.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Penyimpulan atas pelaporan akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponen dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 15. Range Pengukuran Kinerja

No	Nilai kinerja	Kategori	Interpretasi
1	>85-100	AA	Memuaskan
2	>75-85	A	Sangat Baik
3	>65-75	B	Baik, perlu sedikit perbaikan
4	>50-65	CC	Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	>30-50	C	Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	0-30	D	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Sumber: e-monitoring.pu.go.id (2016)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2016 memiliki 5 (lima) sasaran program dengan 5 (lima) outcome. Setiap indikator kinerja outcome tersebut, telah ditetapkan target kinerja masing-masing pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Adapun pencapaian kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target pada tahun 2016.

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dihitung berdasar kepada rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\alpha + \beta_1 + \gamma = \delta_1$$

Keterangan:

- α = Manajemen
 β_1 = Substansi Direktorat
 γ = Kerja Sama dan Pemberdayaan
 δ_1 = Outcome 1 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Masing-masing komponen dalam rumus pencapaian kinerja Direktorat jenderal Bina Konstruksi memiliki bobotnya masing-masing, dengan penjabaran sebagai berikut:

Manajemen	= 30%
Substansi Direktorat	= 20%
Kerja Sama dan pemberdayaan	= 50%

Sehingga, dapat diketahui pencapaian target masing-masing outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Realisasi Target Outcome DJBK TA 2016

No.	Sasaran Program Ditjen Bina Konstruksi (Renstra Ditjen Bina Konstruksi)	Indikator Program	Baseline 2014	Target 2015		Target 2016		Realisasi 2016		Formulasi % Capaian 2016	Sumber	
				Renstra	PK	Renstra	PK	Capaian	%			
1	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional a. Peningkatan total nilai Konstruksi yang diselesaikan	509 Triliun	3%	1.5%	3%	1.5%	636 Triliun	12.18%	$\frac{(636 - 574) \text{ Triliun}}{509 \text{ Triliun}} \times 100\%$	BPS, Subdit Statistik Konstruksi	
			139 BUJK	18%	9%	18%	9%	319 BUJK	97.12%	$\frac{(319 - 184) \text{ BUJK}}{139 \text{ BUJK}} \times 100\%$		
2	Meningkatnya persentase BUJK yang berkualitas besar	Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualitas besar a. Peningkatan jumlah BUJK berkualitas B2	139 BUJK	18%	9%	18%	9%	319 BUJK	97.12%	$\frac{(319 - 184) \text{ BUJK}}{139 \text{ BUJK}} \times 100\%$	Dit. Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	
			110 proyek									
3	Meningkatnya terbit penyelenggaraan konstruksi	Persentase kenaikan tingkat terbit penyelenggaraan konstruksi a. Peningkatan terbit sistem penyelenggaraan melalui penetapan lelang b. Peningkatan terbit administrasi kontrak melalui kesesuaian kontrak dengan peraturan c. Peningkatan terbit konstruksi berkelanjutan melalui tersedianya dokumen RK3K d. Peningkatan terbit manajemen mutu melalui tersedianya dokumen RMP dan RMIK Total	129 proyek								Dit. Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
			49 proyek									
			34 proyek	8.00%	4%	8%	4%	46 satker	5.94%	$\left(\frac{46}{31}\right) \times 4\%$		
			34 proyek									Jumlah Satker di Kementerian PUPR adalah 782 satker, target 4% Terbit Penyelenggaraan (31 satker)
4	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten a. Peningkatan jumlah tenaga ahli bersertifikat b. Peningkatan jumlah tenaga terampil bersertifikat Total	64,578					140,039		$\frac{(437.531 \text{ orang} - 64.578 \text{ orang})}{2.754.160 \text{ orang}} \times 100\% = 8.85\%$	LPJKN	
			101,669	2%	1%	4%	2%	297,492	7.04%	2.754.160 orang adalah total Skilled Labour yang diharapkan pada tahun 2019		
5	Meningkatnya Utilitas Produk Unggulan	Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan a. Peningkatan jumlah kapasitas produksi perusahaan beton pracetak	24 juta m ³	3%	1.5%	3%	1.5%	28 juta m ³	1.80%	Beton pracetak=15% Penggunaan beton keseluruhan	AP3I	
			25,45 juta m ³	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	25,45 juta m ³	1.10%			

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pencapaian tersebut didapat dari kontribusi seluruh komponen di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Adapun penjabaran kontribusi masing-masing komponen penilaian dalam pencapaian target pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

A. KOMPONEN MANAJEMEN (∞)

Dukungan komponen manajemen terhadap pencapaian target outcome yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah dukungan pelayanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi. Komponen manajemen berperan sebesar 30% dalam mendukung terealisasinya target outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Perencanaan strategis di tahun kedua menjadi cerminan keberlanjutan kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam melakukan kegiatan bertujuan untuk merealisasikan seluruh target outcome Ditjen Bina Konstruksi. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai penanggungjawab utama dalam komponen manajemen ini menghadapi perubahan organisasi yang berdampak pada berubahnya seluruh tugas dan fungsi organisasi, dan juga harus menghadapi permasalahan kurangnya SDM dalam memenuhi struktur organisasi yang baru. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki nilai-nilai organisasi, KITA (Kompetensi, Integritas, Transparasi, dan Akuntabilitas) yang perlu dimiliki oleh setiap insan Ditjen Bina Konstruksi. Setiap insan Ditjen Bina Konstruksi diharapkan memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan tugas dan fungsinya dan aktif dalam meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki, memiliki integritas tinggi dalam setiap lakunya, menjaga prinsip transparasi dalam melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran, serta mampu mempertanggungjawabkan atas segala sesuatu yang telah dilaksanakan. Penanaman nilai organisasi tersebut perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas setiap insan Ditjen Bina Konstruksi. Hal ini mengingat bahwa Ditjen Bina Konstruksi memiliki andil besar terhadap keberlangsungan dunia konstruksi di Indonesia yang menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai sejak awal tahun 2016. Dengan dukungan SDM yang berkualitas tangguh dan bermartabat, Ditjen Bina Konstruksi akan mampu membangun dunia konstruksi di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, untuk meningkatkan sistem manajemen di bidang administrasi, pada tahun 2016 telah dimulai penyelenggaraan sistem *e-office*. *E-office* merupakan sistem tata naskah dinas yang diintegrasikan secara elektronik dengan sistem *online* yang selama ini dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas. Sistem tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemudahan dalam *me-record* naskah dinas, mempermudah pencarian dan mengakses naskah dinas dimana saja dan kapan saja,

mengurangi kebutuhan tempat dan sarana untuk menyimpan naskah dinas, dan mengurangi penggunaan kertas dan energy untuk mendukung program *go green*. Sistem *e-office* baru diaplikasikan pada tahun 2016 sehingga dibutuhkan adanya dukungan peralatan dan sumber daya manusia yang mampu menjalankan sistem tersebut. Diharapkan dengan sistem *e-office* tersebut dapat mempermudah sekaligus mempercepat penyampaian dan penerimaan naskah dinas di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi.

Selain itu, melalui aplikasi *e-monitoring.pu.go.id* dapat dimonitor pencapaian kegiatan setiap waktu dan dilaporkan melalui Laporan Monev Kinerja. **Output di dalam komponen Manajemen selalu dipantau dan dievaluasi setiap bulanan dengan hasil akhir secara keseluruhan masuk dalam kategori AA (memuaskan).** Hasil capaian output berdasarkan *e-monitoring.pu.go.id* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 17. Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi dalam e-monitoring.pu.go.id

No	Program/Kegiatan/Output	Target	Bulan Desember				
			Keuangan		Fisik		
			RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi		100,00	95,61	100,00	99,78	99,78
1	Layanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi	4,00 Dokumen/Laporan	100,00	97,28	100,00	100,00	100,00
2	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	2,00 Laporan	100,00	90,92	100,00	100,00	100,00
3	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	100,00	94,55	100,00	99,56	99,56
4	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	196,00 Unit	100,00	99,50	100,00	100,00	100,00
5	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	127,00 Unit	100,00	98,29	100,00	100,00	100,00
6	Gedung/Bangunan	2.316,00 M2	100,00	88,46	100,00	100,00	100,00

Sumber: *e-monitoring.pu.go.id* (20 Januari 2017)

Dengan melihat realisasi output pada komponen manajemen (α) yang dilihat melalui capaian Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi memiliki rata-rata 99,78% dan seluruh output tersebut dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dari 76,32% menjadi 78,87%, maka komponen manajemen dapat dikatakan tercapai 100%.

Output dari kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi yang merupakan komponen manajemen dari pencapaian kinerja dimonitor pencapaiannya setiap bulan yang dapat dilihat melalui Laporan Monev Kinerja Bulanan. Adapun output tersebut merupakan tanggungjawab dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang dapat dilihat pencapaiannya melalui capaian Perjanjian Kinerja TA 2016 sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian PK Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target 2016	Capaian 2016	Satuan	%	Kategori
Penyelenggaraan Pelayanan Teknis Dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi		Layanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi	4	4	Dokumen	100	AA
	1	Dokumen Perencanaan, Program dan Anggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja	1	1	Dokumen	100	AA
	2	Layanan Mutasi Pegawai, Pengembangan Pegawai dan Penyelenggaraan Ortala	1	1	Dokumen	100	AA
	3	Layanan Akuntansi Keuangan, Pengelolaan BMN, Umum Rumah Tangga dan Perlengkapan	1	1	Dokumen	100	AA
	4	Layanan Hukum, Informasi dan Komunikasi Publik	1	1	Dokumen	100	AA
		Pelaporan secara Elektronik (E-Monitoring)	1	1	Laporan	100	AA
		Layanan Perkantoran	12	12	Bulan Layanan	100	AA
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	15	15	Unit	100	AA
Kerja Sama dan Pemberdayaan		Kerja Sama dan Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	1	1	Profil	100	AA

Sumber: LaKIP Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa seluruh indikator kinerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah tercapai 100%.

Khusus untuk pencapaian target outcome, komponen manajemen berperan sebagai berikut:

1. Merumuskan target outcome 1 sampai 5 untuk 5 tahun kedepan;
2. Mengawal penganggaran dalam rangka pencapaian target outcome;
3. Mengembangkan SDM Ditjen Bina Konstruksi sebagai internalisasi konsep REVOLUSI MENTAL;

4. Memberikan advokasi kepada setiap direktorat dan balai dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja; dan
5. Melaksanakan publikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Komponen Manajemen di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki sebuah target yang disebut sebagai “*Dukungan Manajemen Terhadap Pencapaian Outcome Ditjen Bina Konstruksi*” dengan indikator kinerja “*Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Bina Konstruksi*”. Target beserta realisasinya di dalam komponen manajemen ini atau bisa juga disebut sebagai *outcome* antara adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Target *Outcome* Antara Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

NO	OUTCOME KOMPONEN MANAJEMEN (OUTCOME ANTARA)	INDIKATOR KINERJA	BASELINE	REALISASI
1	Dukungan Manajemen Terhadap Pencapaian Outcome Ditjen Bina Konstruksi	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Bina Konstruksi	76,32%	78,87%

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi (2015-2016)

Pencapaian kinerja manajemen dirangkum dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Laporan Kinerja berisikan rencana dan capaian organisasi selama 1 tahun yang kemudian dinilai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasar kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam tersebut, maka Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2014 dan TA 2015 masing-masing dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Terdapat kenaikan nilai LKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar 2,55% dengan rincian seperti tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 20. Perbandingan Nilai LaKIP TA 2014 dan TA 2015 Ditjen Bina Konstruksi

No	Komponen	Bobot/ Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi	
			TA 2014	TA 2015
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	29,89 %	24,42 %
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	14,56 %	17,59 %
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	12,22 %	11,29 %
4.	Evaluasi Kinerja	10 %	4,23 %	<i>(tidak dilakukan penilaian untuk unit Eselon I, hanya untuk tingkat Kementerian)</i>
5.	Capaian Kinerja	20 %	15,42 %	17,69 %
Jumlah		100 %	100 %	76,32 %

Sumber: Kertas Kerja Evaluasi TA 2014-2015

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa terjadi peningkatan nilai sebesar 2,16% dari TA 2013. Peningkatan nilai tersebut berasal dari peningkatan nilai pada komponen pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Hal ini merupakan kontribusi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi beserta UPT dibawahnya sebanyak 30% dalam setiap pencapaian outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

B. KOMPONEN KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN (γ)

Komponen kerja sama dan pemberdayaan dalam rangka pencapaian outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan. Direktorat Kerja Sama dan berkontribusi terhadap pencapaian outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan bobot sebanyak 50%. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan dibantu oleh balai-balai wilayah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pemberdayaan dengan tujuan dalam meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi yang berkompeten. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Adapun output yang mendukung komponen manajemen dipantau per bulan dengan capaian kinerja di bulan Desember dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 21. Capaian Kegiatan Kerjasama dan Pemberdayaan dalam e-monitoring.pu.go.id

No	Program/Kegiatan/Output	Target	Bulan Desember				
			Keuangan		Fisik		
			RN	RL	RN	RL	Kinerja
6	Kerjasama dan Pemberdayaan		100,00	84,30	100,00	98,05	98,05

No	Program/Kegiatan/Output	Target	Bulan Desember				
			Keuangan		Fisik		
			RN	RL	RN	RL	Kinerja
36	Kerja Sama dan Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	67,00 Profil	100,00	84,05	100,00	98,11	98,11
37	Layanan Manajemen	7,00 Dokumen/Laporan	100,00	87,89	100,00	99,48	99,48
38	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	11,00 Laporan	100,00	79,70	100,00	100,00	100,00
39	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	100,00	85,57	100,00	100,00	100,00
40	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	139,00 Unit	100,00	90,10	100,00	53,69	53,69
41	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	83,00 Unit	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Sumber: emonitoring.pu.go.id (Status data 20 Januari 2017)

Output di dalam Kegiatan Kerjasama dan Pemberdayaan selalu dipantau dan dievaluasi setiap bulannya dengan hasil akhir secara keseluruhan masuk dalam kategori AA (memuaskan). Berdasarkan realisasi output pada komponen kerja sama (γ) yaitu rata-rata 98,05% dan seluruh output tersebut yang mendukung peningkatan pencapaian outcome dari segi kerja sama. Terdapat output yang dibawah target yaitu berupa pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta output peralatan dan fasilitas perkantoran. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala berupa kesalahan akun penarikan, kendala pengadaan dengan menggunakan *e-catalog*, dan terdapat beberapa item yang belum dapat dilakukan pengadaannya dikarenakan belum ada surat penghapusan aset BMN. Namun hal tersebut tidak signifikan terhadap pencapaian kinerja kerja sama. Maka komponen kerja sama dapat dikatakan tercapai 100% dalam mendukung pencapaian outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Output dari kegiatan Kerjasama dan Pemberdayaan yang merupakan komponen kerjasama dari pencapaian kinerja dimonitor pencapaiannya setiap bulan yang dapat dilihat melalui Laporan Monev Kinerja Bulanan. Adapun output tersebut merupakan tanggungjawab dari Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan yang dapat dilihat pencapaiannya melalui capaian Perjanjian Kinerja TA 2016 sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target 2016	Capaian 2016	Satuan	%	Kategori
Kerjasama dan Pemberdayaan		Kerja Sama dan Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	4	4	Profil	100	AA
	1	Terlaksananya Kerja Sama Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	1	1	Profil	100	AA
	2	Terlaksananya Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Wilayah I	1	1	Profil	100	AA
	3	Terlaksananya Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Wilayah II	1	1	Profil	100	AA
	4	Terlaksananya Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Wilayah III	1	1	Profil	100	AA
		Layanan Manajemen	1	1	Dokumen	100	AA
		Layanan Perkantoran	12	12	Bulan Layanan	100	AA
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	139	75	Unit	54,0	AA
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	83	0	Unit	0	AA	

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan telah melakukan beberapa kerja sama terkait dengan kegiatan dalam rangka pencapaian outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Kerja sama tersebut diinisiasi bersama badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi, institusi pendidikan, pekerja dan ahli konstruksi serta para *stakeholder* lain di bidang pembinaan konstruksi. Salah satu tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk membangun ikatan kerja sama dengan *stakeholders* agar tercipta hubungan yang erat sehingga *stakeholders* dapat berkontribusi nyata dalam pelaksanaan percepatan sertifikasi kompetensi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan selalu mendorong dan berupaya mewujudkan kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kualitas dan kompeten di bidang jasa konstruksi melalui bimbingan dan fasilitasi teknis sehingga capaian infrastruktur yang dibangun dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan berkelanjutan. Kegiatan fasilitasi teknis tersebut disusun dalam suatu kegiatan Program Kerja Sama Konstruksi, yang memungkinkan keterlibatan pemangku kepentingan bekerja sama dengan *stakeholders* dari Negara lain.

C. KOMPONEN SUBSTANSI DIREKTORAT ($\beta_1 - \beta_5$)

Komponen substansi direktorat didukung oleh empat direktorat yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yaitu: Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi dan Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Selain itu, pelaksanaan kegiatannya juga didukung oleh kegiatan balai-balai yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Output yang mendukung komponen substansi direktorat ($\beta_1 - \beta_5$) juga dipantau berkala dengan capaian kinerja berdasarkan kategori pada tabel 13, sebagai berikut::

Tabel 22. Capaian Output Kegiatan Substansi pada emonitoring.pu.go.id

No	Program/Kegiatan/Output	Target	Bulan Desember				
			Keuangan		Fisik		
			RN	RL	RN	RL	Kinerja
2	Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi		100,00	84,06	100,00	95,18	95,18
7	Pengaturan Pembinaan Kelembagaan Jasa Konstruksi	5,00 Draft NSPK	100,00	96,55	100,00	100,00	100,00
8	Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Jasa Konstruksi	12,00 Profil	100,00	63,43	100,00	88,09	88,09
9	Pengaturan Pembinaan Sumber Daya Jasa Konstruksi	4,00 Draft NSPK	100,00	99,41	100,00	100,00	100,00
10	Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya Jasa Konstruksi	4,00 Profil	100,00	99,44	100,00	100,00	100,00
11	Layanan Manajemen	1,00 Dokumen/Laporan	100,00	99,19	100,00	100,00	100,00
12	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1,00 Laporan	100,00	92,77	100,00	100,00	100,00
13	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	100,00	99,73	100,00	100,00	100,00
14	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	40,00 Unit	100,00	99,94	100,00	100,00	100,00
15	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	10,00 Unit	100,00	95,92	100,00	100,00	100,00
3	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi		100,00	92,81	100,00	98,92	98,92
16	Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	8,00 Draft NSPK	100,00	93,24	100,00	96,69	96,69
17	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Konstruksi	17,00 Profil	100,00	91,85	100,00	100,00	100,00
18	Layanan Manajemen	1,00 Dokumen/Laporan	100,00	99,70	100,00	100,00	100,00

No	Program/Kegiatan/Output	Target	Bulan Desember				
			Keuangan		Fisik		
			RN	RL	RN	RL	Kinerja
19	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1,00 Laporan	100,00	11,81	100,00	100,00	100,00
20	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	100,00	88,15	100,00	100,00	100,00
21	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	20,00 Unit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1,00 Unit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Pembinaan Investasi Konstruksi		100,00	95,63	100,00	100,00	100,00
23	Pengaturan Pembinaan Investasi Infrastruktur	5,00 Draft NSPK	100,00	98,39	100,00	100,00	100,00
24	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko	11,00 Profil	100,00	95,61	100,00	100,00	100,00
25	Layanan Manajemen	1,00 Dokumen/Laporan	100,00	84,07	100,00	100,00	100,00
26	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1,00 Laporan	100,00	99,84	100,00	100,00	100,00
27	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	100,00	99,79	100,00	100,00	100,00
28	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	15,00 Unit	100,00	99,88	100,00	100,00	100,00
5	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi		100,00	97,12	100,00	100,00	100,00
29	Pengaturan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Kerja Konstruksi	31,00 Draft NSPK	100,00	97,34	100,00	100,00	100,00
30	Pemantauan dan Evaluasi Kompetensi dan Produktivitas Kerja Konstruksi	12,00 Profil	100,00	95,65	100,00	100,00	100,00
31	Layanan Manajemen	1,00 Dokumen/Laporan	100,00	98,34	100,00	100,00	100,00
32	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1,00 Laporan	100,00	93,65	100,00	100,00	100,00
33	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	100,00	99,35	100,00	100,00	100,00
34	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1,00 Unit	100,00	99,89	100,00	100,00	100,00
35	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1,00 Unit	100,00	99,91	100,00	100,00	100,00

Sumber: emonitoring.pu.go.id (Status data 20 Januari 2017)

Realisasi output pembinaan kelembagaan dan sistem konstruksi (β_2 dan β_5) mencapai 95,18% dengan **kategori AA (Sangat Baik)** berdasar kepada tabel 21. Jika dilihat, hanya terdapat 1 output yang capaiannya tidak 100% yaitu Output Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Jasa Konstruksi. Ketidaktercapaian output tersebut jika dirunut per satker merupakan akumulasi dari dua satker yang outputnya tidak 100% seperti Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta (79,71%)

dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya (52,62%). Output pada kegiatan pembinaan kelembagaan dan sistem konstruksi secara keseluruhan mendukung pencapaian outcome 2 dan 5.

Realisasi output pembinaan penyelenggaraan konstruksi (β_3) mencapai 98,92% dengan **kategori AA (Memuaskan)** berdasar kepada tabel 21. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa output yang mencapai 100% dan hanya ada 1 output dibawah 100% yaitu Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan. Output pada kegiatan penyelenggaraan konstruksi secara keseluruhan mendukung pencapaian outcome 3.

Realisasi output pembinaan investasi konstruksi (β_1) mencapai 100% dengan **kategori AA (Memuaskan)** berdasar kepada tabel 21 . Pencapaian ini didukung oleh pencapaian seluruh output yang juga 100%. Output pada kegiatan penyelenggaraan konstruksi secara keseluruhan mendukung pencapaian outcome 1.

Realisasi output pembinaan kompetensi dan produktivitas sumber daya konstruksi (β_4) mencapai 100% dengan **kategori AA (Memuaskan)** berdasar kepada tabel 21 dan seluruh output tersebut mendukung pencapaian target kinerja pembinaan konstruksi pada outcome 4.

D. CAPAIAN OUTCOME DJBK ($\delta_1 - \delta_5$)

Pencapaian outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi secara substansi didukung oleh setiap Direktorat sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada dibawahnya, antara lain Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, dan Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Selain itu, terdapat pula kegiatan-kegiatan yang tersebar di seluruh balai di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi yang mendukung pencapaian outcome melalui output kegiatan yang dilaksanakannya. Pengukuran komponen substansi direktorat merupakan cara untuk mengukur realisasi indikator kinerja sasaran

yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Adapun penjabaran pencapaian outcome berdasarkan sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapitalisasi Konstruksi oleh Investor Nasional (δ_1)

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk outcome 1, dihitung berdasar kepada rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\alpha + \beta_1 + \gamma = \delta_1$$

Keterangan:

α = Manajemen

β_1 = Substansi Direktorat

γ = Kerja Sama dan Pemberdayaan

δ_1 = Realisasi Outcome 1 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Tabel 23. Komponen Outcome 1 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Komponen Manajemen	Komponen Kerjasama dan pemberdayaan	Komponen Substansi Direktorat	Realisasi Target Outcome DJBK (Peningkatan Rasio Kapitalisasi Konstruksi oleh Investor Nasional)
α	γ	β_1	δ_1
Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Dukungan Kerja Sama dan Pemberdayaan terhadap peningkatan kapitalisasi konstruksi oleh Investor Nasional	<u>Output Pembinaan Investasi Infrastruktur:</u> 1. Tersedianya pengaturan dan pembinaan investasi infrastruktur 2. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi infrastruktur dan pengelolaan risiko	12,18%

Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional ini direncanakan bertambah sebesar 3% setiap tahunnya atau setara dengan 15% dalam 5 tahun (hingga 2019). Namun, pada tahun 2016 target diubah menjadi 1,5% karena anggaran Ditjen Bina Konstruksi TA 2016 yang dipotong sehingga tidak sesuai dengan yang tertera di Renstra.

Pencapaian target outcome 1 (δ_1) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Investasi dan Infrastruktur (β_1) dengan didukung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (α) dan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan (γ). Dalam pencapaian target tersebut, Direktorat Bina

Investasi Infrastruktur memiliki strategi sehingga pelaksanaan kegiatannya lebih terarah. Adapun strategi tersebut antara lain:

1. Supervisi penyiapan kebijakan investasi infrastruktur dengan tujuan menemukan permasalahan dalam pola investasi dan pembiayaan serta mensosialisasikannya kepada pihak-pihak terkait;
2. Mengadakan forum evaluasi penyelenggaraan investasi infrastruktur Non APBN/APBD di Provinsi Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau untuk menemukan kemajuan penyelenggaraan investasi infrastruktur non-Pemerintah dan merumuskan tindakan atas paket kebijakan, implementasi dan kinerja swasta dalam investasi infrastruktur di Sulawesi Utara;
3. Mengadakan forum nasional investasi infrastruktur mengenai Perubahan Paradigma Investasi Infrastruktur di Jakarta yang bertujuan untuk menginternalisasi “transformasi mindset” dari budaya belanja modal dengan APBN menjadi investasi Non APBN untuk penyediaan infrastruktur;
4. Menyusun Peraturan Menteri mengenai Simpul KPBU dengan tujuan agar posisi Ditjen Bina Konstruksi lebih jelas lagi dalam hal Simpul KPBU yang akan melaksanakan fungsi fasilitasi dan koordinasi dengan sektor di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendorong proyek yang dilaksanakan dengan skema KPBU;
5. Membahas rencana pembangunan Jembatan Pancasila-Palmerah yang dilengkapi dengan pembangkit listrik yang dilaksanakan antara Gubernur NTT dengan stakeholder lainnya yang bertujuan untuk mengidentifikasi tahapan yang perlu dilakukan dalam penyiapan pembangunan jembatan tersebut;
6. Memfasilitasi proyek KPBU yang berjalan lambat dengan cara memfasilitasi stakeholder terkait rencana investasi oleh badan usaha, melakukan koordinasi lintas kementerian dan mengidentifikasi peraturan daerah;
7. Menyelenggarakan FGD terkait urgensi dan strategi penerapan pembayaran jalan tol secara non tunai dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan mengurangi resiko pengembalian investasi;

8. Mengadakan diskusi terbatas terkait rencana investasi pembangunan PLTA Sungai Kayan di Kalimantan Utara yang bertujuan untuk memfasilitasi rencana pembangunan PLTA di Sungai Kayan;
9. Mengadakan rapat konsultasi investasi di bidang air minum oleh PDAM Badung yang bertujuan untuk memfasilitasi pihak PDAM Badung dengan stakeholder lainnya terkait regulasi pelaksanaan KPBU.

Dukungan manajemen terhadap pencapaian target outcome 1 yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah dukungan pelayanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi dalam rangka meningkatkan kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional. Adapun dukungan kerja sama terhadap pencapaian target outcome 1 yang dilakukan oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan adalah dengan melakukan kegiatan kerjasama dalam rangka meningkatkan kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional.

Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional ditandai dengan indikator peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional. Peningkatan tersebut dapat dilihat melalui peningkatan pangsa pasar

dalam negeri bagi kontraktor nasional. Pangsa pasar dalam negeri dinilai bertambah jika terdapat peningkatan total nilai konstruksi oleh BUJK Nasional. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam buku Konstruksi Dalam Angka, pada tahun 2014 nilai investasi konstruksi di Indonesia adalah sebesar Rp509 Triliun. Pada tahun 2015, nilai tersebut meningkat menjadi sebesar Rp 574 Triliun. Pada akhir tahun 2016, BPS telah menerbitkan Buku Konstruksi Dalam Angka yang didalamnya memuat informasi bahwa total nilai konstruksi yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 636 Triliun. Oleh karena itu, didapatkan nilai peningkatan kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional sebagai berikut:

Peningkatan Rasio Kapitalisasi
Konstruksi oleh Investor
Nasional

Target	: 1,5 %
Realisasi	: 12,18 %

$$\% \delta_1 = \frac{(636-574) \text{ Triliun}}{509 \text{ Triliun}} \times 100\% = 12,18\%$$

2. Meningkatnya Persentase BUJK yang Berkualifikasi Besar

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk outcome 2, dihitung berdasar kepada rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\alpha + \beta_2 + \gamma = \delta_2$$

Keterangan:

α = Manajemen

β_2 = Substansi Direktorat

γ = Kerja Sama dan Pemberdayaan

δ_2 = Realisasi Outcome 2 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Tabel 24. Komponen Outcome 2 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Komponen Manajemen	Komponen Kerjasama dan pemberdayaan	Komponen Substansi Direktorat	Realisasi Target Outcome DJBK (Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi besar)
α	γ	β_2	δ_2
Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Dukungan Kerja Sama dan Pemberdayaan terhadap peningkatan persentase BUJK yang berkualifikasi besar	<u>Output Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi:</u> 1. Tersedianya pengaturan pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi 2. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi	25,18%

Persentase pertumbuhan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang meningkat menjadi kualifikasi besar ditargetkan sebesar 18% per tahun yang sama dengan 25 BUJK per tahunnya. Namun, target Perjanjian Kinerja tahun 2016 adalah sebesar 9% karena anggaran Ditjen Bina Konstruksi TA 2016 yang dipotong sehingga tidak sesuai dengan yang tertera di Renstra.

Pencapaian target outcome 2 (δ_2) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi (β_2) dengan didukung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (α) dan

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan (γ). Dalam pelaksanaannya, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian outcome 2 sebagai berikut:

1. Fasilitasi penyusunan Undang Undang Jasa Konstruksi;
2. Fasilitasi ruang lingkup tenaga ahli profesi dan usaha penyediaan bangunan;
3. Fasilitasi penyusunan ruang lingkup SKA/SKT;
4. Fasilitasi pembentukan kepengurusan LPJK;
5. Fasilitasi KUR pada BUJK;
6. Fasilitasi penggunaan tenaga kerja dan badan usaha jasa konstruksi asing;
7. Fasilitasi pemberdayaan kemampuan bisnis usaha;
8. Fasilitasi pengembangan manajemen proyek bagi pengembangan usaha;
9. Fasilitasi petunjuk teknis pemberian izin usaha jasa konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing;
10. Pemberdayaan BUJK dengan kegiatan berupa FGD penjangkaran minat pendampingan BUJKN dan TOT Usaha Jasa Konstruksi;
11. FGD Pedoman Penyusunan Profil Lembaga Pemerintah;
12. Fasilitasi penilaian kinerja badan usaha; dan
13. Monitoring dan evaluasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

Dukungan manajemen terhadap pencapaian target outcome 2 yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah dukungan pelayanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi dalam rangka meningkatkan persentase BUJK yang berkualifikasi besar. Adapun dukungan kerja sama terhadap pencapaian target outcome 2 yang dilakukan oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan adalah dengan melakukan kegiatan kerjasama dalam rangka meningkatkan persentase BUJK yang berkualifikasi besar.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menargetkan kinerja BUJK dengan kualifikasi B1 meningkat selama tahun

**Persentase Kenaikan
BUJK Menjadi
Berkualifikasi Besar**

Target : 9 %
Realisasi : 25,18 %

2015-2019. Adapun kinerja BUJK ditetapkan berdasarkan beberapa indikator keuangan dan proyek yang telah disepakati. Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar didapat melalui persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi besar. Dari total BUJK Pelaksana (kontraktor) berkualifikasi menengah sebanyak 12.929, telah dipilih sekitar 250 perusahaan yang dibina oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga akan terdapat 125 perusahaan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan atau terdapat 25 perusahaan dalam 1 (satu) tahun yang meningkat kinerjanya yang dilihat dari peningkatan nilai konstruksi yang diselesaikan selama satu tahun. Pada tahun 2015, terdapat 45 BUJK dengan subkualifikasi B1 telah menjadi subkualifikasi B2, dan pada tahun 2016 terdapat 135 BUJK baru B2. Daftar BUJK baru B2 pada tahun 2016 tersebut dapat dilihat pada Lampiran.

Berdasarkan pada data LPJK pada tahun 2014, terdapat 139 BUJK berkualifikasi B2. Oleh karena itu, dapat diketahui peningkatan persentase BUJK berkualifikasi besar pada tahun 2016 sebagai berikut:

$$\% \delta_2 = \frac{(219-184) \text{ BUJK}}{139 \text{ BUJK}} \times 100\% = 25,18\%$$

3. Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Konstruksi

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk outcome 3, dihitung berdasar kepada rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\alpha + \beta_3 + \gamma = \delta_3$$

Keterangan:

α = Manajemen

β_3 = Substansi Direktorat

γ = Kerja Sama dan Pemberdayaan

δ_3 = Realisasi Outcome 3 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Tabel 25. Komponen Outcome 3 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Komponen Manajemen	Komponen Kerjasama dan pemberdayaan	Komponen Substansi Direktorat	Realisasi Target Outcome DJBK (Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi)
α	γ	β_3	δ_3
Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Dukungan Kerja Sama dan Pemberdayaan terhadap peningkatan tertib penyelenggaraan konstruksi	<u>Output Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi:</u> 1. Tersedianya pengaturan pembinaan penyelenggaraan konstruksi 2. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan konstruksi	5,94%

Persentase kenaikan tertib penyelenggaraan konstruksi diukur melalui capaian 3 indikator mutu (mutu konstruksi, K3, dan administrasi kontrak) pada proyek kualifikasi besar, menengah, dan kecil. Jumlah yang diharapkan pada akhir tahun 2019 adalah 40% atau peningkatan sebesar 8% setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2015 dan 2016 target tersebut diubah menjadi 4% dikarenakan adanya pemotongan pagu Ditjen Bina Konstruksi sehingga tidak sesuai dengan rencana di Renstra.

Pencapaian target outcome 3 (δ_3) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (β_3) dengan didukung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (α) dan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan (γ).

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi memiliki strategi pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tertib penyelenggaraan dengan metode pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Metode-metode tersebut kemudian menghasilkan output-output yang berkontribusi terhadap tercapainya output Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016. Beberapa contoh kegiatan berdasarkan strategi tersebut antara lain:

1. Pengaturan

- Penerbitan Peraturan Menteri PUPR yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih operasional dan efektif.
- Penyusunan draft pedoman pelaksanaan dan pengendalian kontrak pekerjaan konstruksi yang mengatur mengenai: *pre award meeting*, penandatanganan kontrak, penyerahan lokasi kerja (lapangan), Surat Perintah Mulai Kerja, rapat persiapan pelaksanaan kontrak, pembayaran uang muka, mobilisasi, pengukuran dan pemeriksaan bersama, perubahan kontrak, perubahan lingkup pekerjaan, perubahan kuantitas dan harga, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, subkontrak, penyesuaian harga, keadaan kahar, pembayaran prestasi pekerjaan, laporan hasil pekerjaan, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis, pembayaran denda, peristiwa kompensasi, penghentian kontrak, pemutusan kontrak, penyelesaian perselisihan, perhitungan akhir pekerjaan, serah terima pertama, masa pemeliharaan, serah terima akhir, kegagalan konstruksi, kegagalan bangunan dimana masing-masing bab berisi mengenai definisi, para pihak, tujuan, waktu pelaksanaan, uraian, flow chart, daftar simak dan format-format.
- Penyusunan pedoman pelaksanaan SMK3L dan petunjuk pelaksanaan investigasi kasus kecelakaan konstruksi. Pedoman pelaksanaan SMK3L mempersyaratkan bahwa Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor), harus menyediakan prosedur dan petunjuk kerja/instruksi kerja berkaitan usaha bisnis organisasi, yang semuanya itu dikendalikan dalam suatu sistem manajemen, baik sistem manajemen K3 ataupun sistem manajemen lingkungan. Sedangkan petunjuk pelaksanaan investigasi kasus kecelakaan konstruksi adalah untuk menunjang tercapainya tertib penyelenggaraan terkait kontrak berkelanjutan antara lain Penyusunan Petunjuk Teknis Evaluasi Teknis K3 dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Penyusunan Petunjuk

Pelaksanaan Investigasi dan Rekomendasi Kasus Kecelakaan Kerja Konstruksi.

- Penyusunan revisi Peraturan Menteri PUPR tentang Sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada terbitnya ISO 9001:2016 yang merupakan standar pemenuhan mutu internasional yang telah diakui secara internasional.

2. Pembinaan

- Pelaksanaan pembinaan kepada pihak yang berkepentingan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diantaranya: Pokja, Penyedia Barang/Jasa, dll. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi *design and build*, sosialisasi standar dan dokumen pekerjaan tunggal, dan sosialisasi *e-procurement* bagi penyedia jasa. Capaian pembinaan penyelenggaraan dari kegiatan swakelola dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 26. Capaian Pembinaan Penyelenggaraan

NO	KEGIATAN	JUMLAH SATKER
1	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Konstruksi	8
2	Penyusunan Buku Saku Permasalahan Umum Pengadaan Barang dan Jasa	4
3	Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Konstruksi	10
4	Fasilitasi Tim Peneliti Pengadaan Barang dan Jasa	40
5	Penyusunan Pedoman Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa	8
6	Diseminasi(Konsensus dan Prakonsensus) Produk Pengaturan Sistem Penyelenggaraan Konstruksi	3
TOTAL		73

Sumber: LaKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016

- Pemberdayaan kontrak konstruksi berupa forum diskusi kontrak konstruksi yang merupakan wadah diskusi antara stakeholder terkait pelaksanaan kontrak konstruksi yang terdiri dari: balai/satker/SNVT di lingkungan Kementerian PUPR, Dinas PU Provinsi, akademisi, pakar/praktisi, asosiasi perusahaan jasa konstruksi, dan asosiasi profesi jasa konstruksi. Selain itu, terdapat pula monev administrasi kontrak konstruksi yang dilaksanakan untuk mengukur dan

mengevaluasi ketercapaian dari tujuan dan sasaran pelaksanaan dan penerapan kebijakan.

- Pemberdayaan konstruksi berkelanjutan, penghargaan karya konstruksi Indonesia dan fasilitasi tim nasional keselamatan konstruksi. Hal tersebut dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, apresiasi terhadap hasil karya konstruksi, dan dalam bentuk investigasi kegagalan konstruksi yang terjadi di Kecamatan Selon, Lombok Timur pada Juni 2016 lalu.
- Pelaksanaan pemberdayaan sistem manajemen mutu di Banjarmasin, Jakarta, Bandung, Makassar, dan Ambon dengan materi mengenai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum, Tahapan Penerapan SMM di lingkungan Kementerian PUPR, dan Rencana Mutu Kontrak (RMK).

3. Pengawasan

- Penyusunan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai acuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kelompok Kerja (Pokja) ULP maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Kegiatan yang dimaksud berupa fasilitasi tim evaluasi pengadaan barang/jasa dan dengan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan penyelenggaraan konstruksi dan sistem penyelenggaraan konstruksi.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi kontrak pekerjaan konstruksi di semua satminkal tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertujuan untuk memeriksa klausul-klausul kontrak dalam rangka menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, dan mendapatkan solusi/langkah perbaikan.
- Pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan SMK3 serta monitoring SMK3 dan pemantauan evaluasi terhadap penerapan tertib

sistem manajemen mutu yang dilaksanakan di 340 proyek bidang pekerjaan umum (SDA, SBM, CK dan Pera) dengan bentuk kegiatan antara lain: Monitoring Kinerja KMW Regional dalam Pemantauan Penerapan SMK3 Pekerjaan Kontruksi, Konsultan Manajemen Pusat Penerapan SMK3, Konsultan Manajemen Wilayah Penerapan SMK3 dan SMM Wilayah Jawa, Konsultan Manajemen Wilayah Penerapan SMK3 dan SMM Wilayah Nusa Tenggara, Konsultan Manajemen Wilayah Penerapan SMK3 dan SMM Wilayah Papua. Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap SMK3 dan SMM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi terkait SMK3 dan SMKK per Wilayah di Indonesia

WILAYAH	% Tingkat Penerapan SMK3				% Tingkat Penerapan SMM			
	SDA	BM	CK	Pera	SDA	BM	CK	Pera
Sumatera	30,95	47,34	31,40	15,57	60,85	61,09	47,88	0
Jawa	63,05	58,32	42,60	0	47,89	52,64	44,50	0
Kalimantan	25,68	38,00	22,00	0	28,46	25,13	13,52	0
Sulawesi	19,56	33,18	20,46	0	29,99	37,28	26,62	0
Bali Nusa	12,28	14,77	7,28	0	18,27	21,41	11,22	0
Papua	31,70	45,26	31,32	0	39,18	46,78	36,04	0

Sumber: LaKIP Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi TA 2016

Dukungan manajemen terhadap pencapaian target outcome 3 yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah dukungan pelayanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi dalam rangka meningkatkan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi. Adapun dukungan kerja sama terhadap pencapaian target outcome 3 yang dilakukan oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan adalah dengan melakukan kegiatan kerjasama dalam rangka meningkatkan tertib penyelenggaraan konstruksi.

Meningkatnya tertib penyelenggaraan konstruksi ditandai dengan persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi. Indikator dari tertib

Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi

Target : 4 %
Realisasi : 5,94 %

penyelenggaraan konstruksi adalah mutu konstruksi, K3 dan administrasi kontrak.

Dalam pencapaian outcome 3, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi memiliki beberapa indikator program untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016.

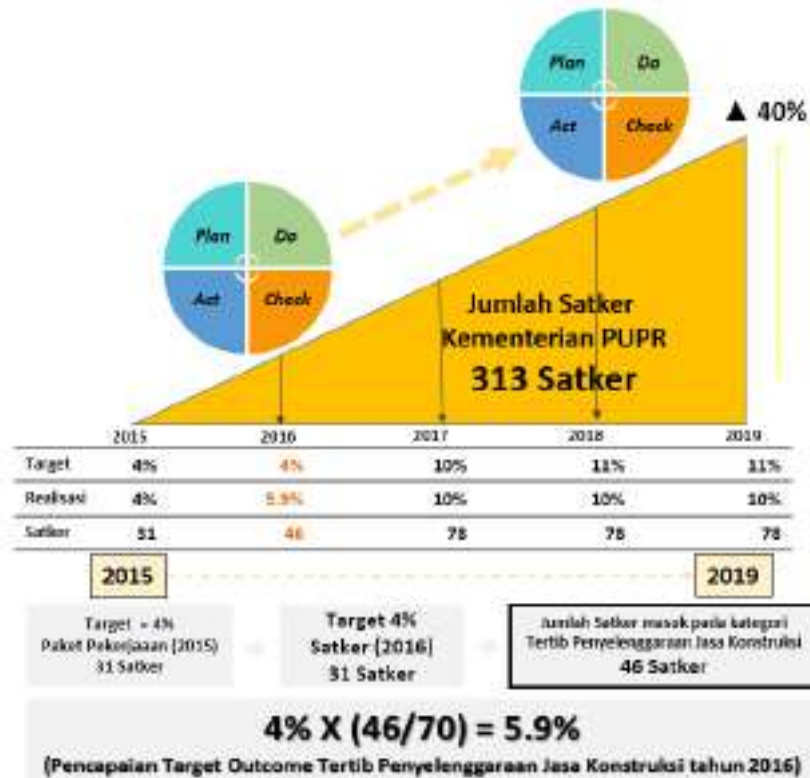


Gambar 4. Pemetaan Sebaran Target Satker Tertib Penyelenggaraan

Sumber: Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Jumlah Satker Kementerian PUPR yaitu sebesar 782 Satker dengan target sasaran Satminkal Fisik (Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan). Sesuai yang tercantum dalam Renstra yaitu persentase target kenaikan tertib penyelenggaraan konstruksi adalah sebesar 40%. Pendekatan yang digunakan dalam pengukuran adalah :

- a. Secara total target Satker Kementerian PUPR yang masuk pada kategori tertib penyelenggaraan sebesar $40\% \times 782 \text{ Satker} = 313 \text{ Satker}$
- b. Dari 313 Satker dijabarkan selama 5 Tahun



Gambar 5. Capaian Target Tertib Penyelenggaraan Konstruksi TA 2016

Berdasarkan instrumen money yang telah ditentukan, maka data diperoleh dengan 2 metode pengumpulan data, meliputi:

1. Data tertib penyelenggaraan pengguna jasa untuk target money satker/PPK/ULP dan PPHP yang dilakukan dengan metode *indepth study* dengan target 140 satker sesuai dengan pemetaan.
2. Data tertib Penyelenggaraan Penyedia Jasa untuk target BUJK/Proyek yang dilakukan dengan metode *Rapid Assessment* dengan target 2055 Pekerjaan.

Berikut merupakan indikator program beserta baseline 2014 beserta realisasi pada tahun 2015 dan 2016:

Tabel 28. Realisasi Target Indikator Program Outcome 3 Ditjen Bina Konstruksi

No	Indikator Program	Baseline	Realisasi	
		2014	2015	2016
1	Peningkatan tertib sistem penyelenggaraan melalui penetapan lelang	129 proyek	110 proyek	46 satker
2	Peningkatan tertib administrasi kontrak melalui kesesuaian kontrak dengan peraturan		49 proyek	

No	Indikator Program	Baseline	Realisasi	
		2014	2015	2016
3	Peningkatan tertib konstruksi berkelanjutan melalui tersedianya dokumen RK3K	89 proyek	34 proyek	
4	Peningkatan tertib manajemen mutu melalui tersedianya dokumen RMP dan RMK		34 proyek	
TOTAL		218 proyek	227 proyek / 31 satker	46 Satker

Sumber: Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (2016)

Sehingga, dapat diketahui persentase peningkatan tertib penyelenggaraan konstruksi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ Peningkatan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi } (\delta_3) &= \frac{46}{31} \text{ satker} \times \frac{4}{100} \\ &= 5,94\% \end{aligned}$$

4. Meningkatnya SDM Penyedia Jasa Konstruksi

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk outcome 4, dihitung berdasar kepada rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\alpha + \beta_4 + \gamma = \delta_4$$

Keterangan:

α = Manajemen

β_4 = Substansi Direktorat

γ = Kerja Sama dan Pemberdayaan

δ_4 = Realisasi Outcome 4 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Tabel 29. Komponen Outcome 4 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Komponen Manajemen	Komponen Kerjasama dan pemberdayaan	Komponen Substansi Direktorat	Realisasi Target Outcome DJBK (Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi)
α	γ	β_4	δ_4
Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Dukungan Kerja Sama dan Pemberdayaan terhadap persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	<u>Output Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi:</u> 1. Tersedianya pengaturan pembinaan kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi 2. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi	11,76%

Komponen Manajemen	Komponen Kerjasama dan pemberdayaan	Komponen Substansi Direktorat	Realisasi Target Outcome DJBK (Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi)
		<u>Output Kerja Sama dan Pemberdayaan:</u> 1. Terlaksananya kerja sama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi	

Pencapaian target outcome 4 (δ_4) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi dan balai-balai pelatihan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (β_4) dengan didukung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (α) dan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan (γ).

Pada tahun 2016, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian outcome 4 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Salah satunya adalah kegiatan

Diseminasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

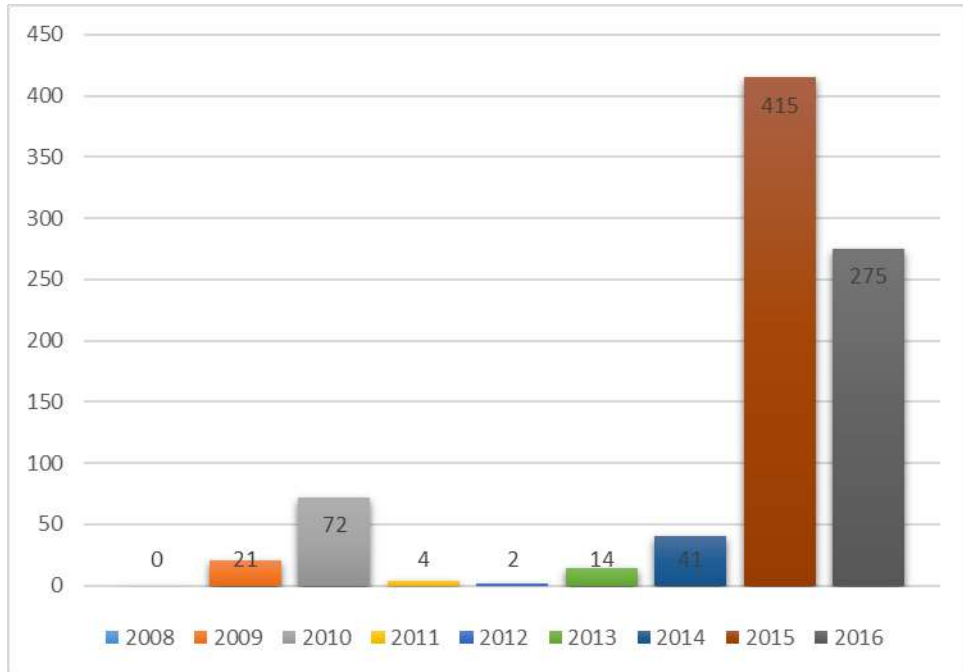
Rakyat tentang Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan pada Senin, 28 November 2016. Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) atau Continuing Professional Development (CPD) merupakan upaya memelihara kompetensi tenaga ahli untuk menjalankan praktek tenaga ahli secara berkesinambungan. Bersamaan dengan kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer dan ASEAN Architect. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi ini juga merupakan bentuk apresiasi terhadap tenaga kerja konstruksi Indonesia yang telah mendapat pengakuan kompetensi ditingkat regional ASEAN.



Gambar 6. Penyerahan Sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer dan ASEAN Architect secara Simbolis

Dukungan manajemen terhadap pencapaian target outcome 4 yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah dukungan pelayanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi dalam rangka meningkatkan SDM penyedia jasa konstruksi yang berkompeten. Adapun dukungan kerja sama terhadap pencapaian target outcome 4 yang dilakukan oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan adalah dengan melakukan kegiatan kerjasama dalam rangka meningkatkan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten. Selain itu, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan melalui balai-balai jasa konstruksi secara aktif melaksanakan pelatihan konstruksi di daerah-daerah serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang berkompeten.

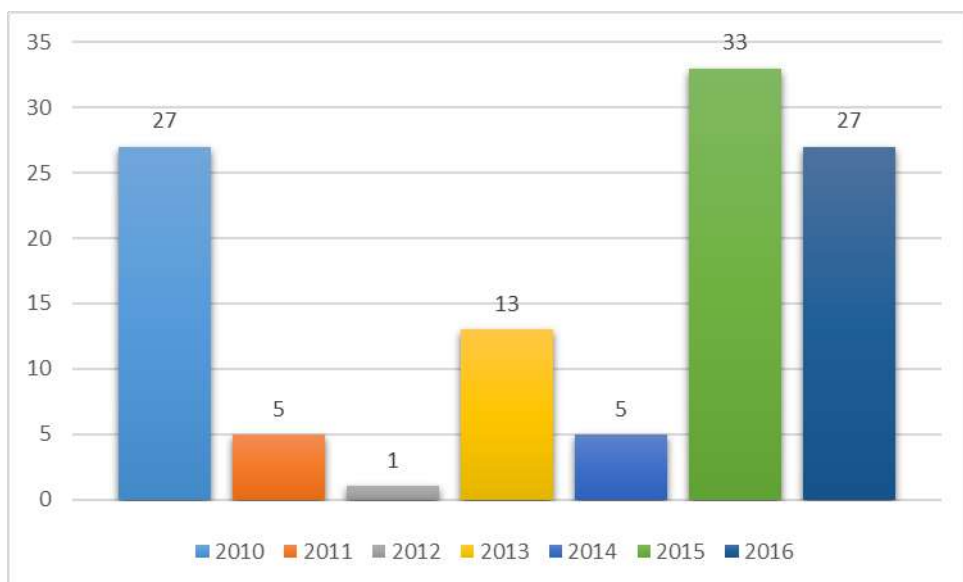
Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi juga memiliki dalam program Indonesia *Monitoring Committee* (IMC). Sesuai tugas pokok Indonesia *Monitoring Committee* (IMC) yaitu mengembangkan, memproses dan mengelola daftar registrasi ASEAN *Chartered Professional Engineer* (ACPE) maupun ASEAN *Architect* (AA), Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi sejak tahun 2009 sudah melakukan registrasi bagi insinyur Indonesia sebagai ACPE dan bagi arsitek Indonesia sebagai AA. Jumlah insinyur Indonesia yang telah diregistrasi sebagai ACPE adalah sebanyak 844 orang, berada pada peringkat pertama jumlah peserta teregistrasi dari seluruh Negara di ASEAN.



Sumber: Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi (2016)

Grafik 1. Registrasi ACPE Indonesia 2008-2016

Jumlah arsitek Indonesia yang telah diregistrasi sebagai AA adalah sebanyak 111 orang, berada pada peringkat pertama jumlah peserta teregistrasi di seluruh negara ASEAN.



Sumber: Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi (2016)

Grafik 2. Registrasi AA Indonesia 2010-2016

Pada pertemuan AAC ke-25, terdapat agenda mengenai dimungkinkannya bagi Arsitek ASEAN untuk praktek independen dalam MRA, dan persyaratan bekerjasama dengan arsitek berlisensi local tetap diterima sebagai langkah

sementara hingga nanti ditetapkan kembali oleh AAC. Setelah bertukar pandangan mengenai mekanisme RFA yang ada dan situasi di berbagai negara anggota ASEAN, maka disepakati:

- a. Persyaratan untuk mitra lokal akan tidak lagi wajib untuk aplikasi RFA. Namun, Negara anggota ASEAN tetap dapat menetapkannya dalam mempertimbangkan aplikasi RFA sebagai tambahan persyaratan sebelumnya.
- b. Masa berlaku lisensi RFA selama durasi proyek atau untuk beberapa tahun adalah keputusan PRA (di Indonesia LPJKN), dan lisensi RFA dapat diperpanjang.
- c. Negara anggota ASEAN diminta untuk memperbarui form pendaftaran RFA-nya menyesuaikan dengan kesepakatan tersebut dan kemudian disampaikan pada pertemuan berikutnya.

Meningkatnya SDM Penyedia jasa Konstruksi ditandai dengan peningkatan persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten. Berdasarkan data dari LPJKN, peningkatan SDM penyedia jasa konstruksi berupa jumlah tenaga ahli bersertifikat dan jumlah tenaga terampil bersertifikat pada tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Jumlah SDM Berkompeten Tahun 2014 dan 2015

Jenis SDM Konstruksi	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Tenaga Ahli Bersertifikat	64.578	104.774	171.607
Tenaga Terampil Bersertifikat	101.669	138.593	396.050
Jumlah	166.247	243.367	567.657

Sumber: LPJKN

Adapun data Sumber Daya Manusia Konstruksi pada tahun 2014 adalah 6.885.401 orang. Rasio yang diharapkan adalah 40% *skilled labour* dan 60% *unskilled labour*. Sehingga, diharapkan adanya *skilled labour* pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Target Skilled Labour} = \frac{40}{100} \times 6.885.401 \text{ orang}$$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa total *skilled labour* pada tahun 2014 adalah 166.293 orang. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan *skilled labour* target adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Skilled Labour } 2014 = \frac{166.247 \text{ orang}}{2.754.160 \text{ orang}} \times 100\% = 6,04\%$$

Selain itu, diketahui total *skilled labour* pada tahun 2015 adalah 243.367 orang yang terdiri dari tenaga ahli dan tenaga terampil bersertifikat. Sehingga, diketahui persentase *skilled labour* pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Skilled Labour } 2015 = \frac{243.815 \text{ orang}}{2.754.160 \text{ orang}} \times 100\% = 8,85\%$$

Pada tahun 2016, total *skilled labour* adalah sebesar 567.657 orang yang terdiri dari tenaga ahli dan tenaga terampil bersertifikat. Sehingga, pada akhir tahun 2016 diketahui persentase *skilled labour* adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Skilled Labour } 2016 = \frac{567.657}{2.754.160 \text{ orang}} \times 100\% = 20,61\%$$

Maka didapatkan peningkatan SDM penyedia jasa konstruksi yang berkompeten adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \Delta \text{ Tenaga Ahli Berkompeten } (\delta_4) \\ &= 20,61\% - 8,85\% \\ &= 11,76\% \end{aligned}$$

**Persentase Kenaikan SDM Penyedia
Jasa Konstruksi yang Kompeten**

Target	: 2 %
Realisasi	: 11,76 %

5. Meningkatnya Utilitas Produk Unggulan

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk outcome 5, dihitung berdasar kepada rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\alpha + \beta_5 + \gamma = \delta_5$$

Keterangan:

α = Manajemen

β_4 = Substansi Direktorat

γ = Kerja Sama dan Pemberdayaan

δ_4 = Realisasi Outcome 5 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Tabel 31. Komponen Outcome 5 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Komponen Manajemen	Komponen Kerjasama dan pemberdayaan	Komponen Substansi Direktorat	Realisasi Target Outcome DJBK (Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan)
α	γ	β_5	δ_5
Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Dukungan Kerja Sama dan Pemberdayaan terhadap persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan	<p><u>Output Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pengaturan pembinaan kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi 2. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi <p><u>Output Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pengaturan pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi 2. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi 	1,80%

Peningkatan tingkat utilitas produk unggulan dilihat dari jumlah penggunaan beton pracetak untuk konstruksi di Indonesia. Angka 3% pertahun dijadikan target yang harus tercapai sehingga dalam 5 tahun mendatang penambahan persentase penggunaan beton pracetak pada proyek konstruksi di Indonesia mencapai 15%. Namun, pada tahun ini target tersebut diubah menjadi 1,5% dikarenakan adanya pemotongan DIPA TA 2016 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sehingga jumlahnya tidak sesuai dengan rencana pada Renstra.

Pencapaian target outcome 5 (δ_5) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Investasi Infrsrastruktur serta Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi (β_5) dengan didukung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (α) dan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan (γ).

Dalam mencapai sasaran outcome 5, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur memiliki strategi sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan menjadi lebih

terarah. Kegiatan yang dimiliki Direktorat Bina Investasi Infrastruktur guna mendukung pencapaian outcome 5 antara lain:

1. Forum Nasional Evaluasi Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di sektor konstruksi Indonesia yang membahas dan merumuskan tindakan atas berbagai pertanyaan tentang apa saja yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh para stakeholder untuk menjawab pertanyaan kunci tentang posisi Indonesia dalam merespon MEA dan menentukan langkah-langkah strategis oleh stakeholder bagi kepentingan nasional di sektor konstruksi.
2. Forum Konsultasi Pemetaan Potensi Investasi Infrastruktur Regional Timur, Tengah dan Barat yang bertujuan untuk:
 - Meningkatkan *awareness*, *knowledge*, dan *capacity* para teknokrat-birokrat di daerah maupun di lingkungan PUPR terkait investasi infrastruktur/pembiayaan infrastruktur non APBN/APBD;
 - Meningkatkan komitmen stakeholder dalam mengimplementasikan skema KPBU pada proyek infrastruktur;
 - Memperkenalkan simpul KPBU sebagai PPP Center di lingkungan Kementerian PUPR;
 - Membuka *helpdesk* terkait investasi infrastruktur yang dapat dipergunakan sebagai meja konsultasi langsung antara pihak kementerian dan stakeholder di setiap regional untuk membahas proyek-proyek potensi investasi infrastruktur daerah dan memfasilitasi investor yang pada akhirnya bertujuan untuk menjembatani penyelesaian sejumlah masalah penghambat dalam investasi infrastruktur di setiap daerah.
3. Pameran Bauma di Jerman pada bulan April 2016, dimana DJBK mempromosikan tentang sektor konstruksi di Indonesia.

Selain itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi terkait pencapaian outcome 5 adalah kenaikan persentase penggunaan beton pracetak pada proyek-proyek konstruksi. Pada tahun 2015, Direktorat Bina Kelembagaan dan

Sumber Daya Jasa Konstruksi telah melakukan pembuatan katalog produk industri beton pracetak dan prategang. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi menargetkan kenaikan penggunaan beton pracetak dan prategang sebesar 30% terhadap seluruh proyek infrastruktur pada tahun 2019, maka untuk setiap tahunnya ditargetkan kenaikan penggunaan beton sebesar 3% dimulai pada awal tahun 2015 sebesar 15%. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian outcome 5 sebagai berikut:

1. Fasilitasi pendayagunaan beton pracetak dan prategang;
2. Fasilitasi rantai pasok material dan peralatan utama;
3. Fasilitasi pengembangan teknologi konstruksi;
4. Fasilitasi pengembangan produk dalam negeri;
5. Fasilitasi kinerja proyek konstruksi 2016;
6. Monitoring dan Evaluasi rantai pasok material dan peralatan konstruksi;
7. Fasilitasi penggunaan teknologi;
8. Fasilitasi pengenalan produk teknologi; dan
9. Monitoring dan Evaluasi pengembangan teknologi konstruksi pada litbang dan badan usaha konstruksi.

Dukungan manajemen terhadap pencapaian target outcome 5 yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah dukungan pelayanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi dalam rangka meningkatkan utilitas produk unggulan. Adapun dukungan kerja sama terhadap pencapaian target outcome 5 yang dilakukan oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan adalah dengan melakukan kegiatan kerjasama dalam rangka meningkatkan utilitas produk unggulan.

Meningkatnya utilitas produk unggulan dapat dilihat melalui persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan. Berdasarkan data AP3I (Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia), pada tahun 2014 penggunaan beton pracetak adalah 24 juta m³ atau sekitar 15% dari penggunaan beton pada proyek infrastruktur di Indonesia. Sedangkan, pada tahun 2015 penggunaan produk beton pracetak naik menjadi 25 juta m³.

Pada LaKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016, disebutkan bahwa total penggunaan keseluruhan adalah sebesar 160 juta m³ yang merupakan angka kapitalisasi beton pracetak dibandingkan dengan anggaran 4 lembaga yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM dan PLN. Namun, pada tahun ini AP3I merilis bahwa angka penggunaan beton keseluruhan adalah 136,97 m³ yang merupakan perhitungan berdasar kepada persentase penggunaan semen pada proyek infrastruktur di Indonesia yang diestimasi sebanyak 25% dari total penggunaan semen keseluruhan.

Oleh karena itu, diketahui selama tahun 2014 jumlah penggunaan beton pracetak adalah sebagai berikut:

$$\text{Penggunaan beton pracetak Tahun 2014} = \frac{24}{136,97} \times 100\% = 17,5\%$$

Adapun penggunaan beton pracetak Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

$$\text{Penggunaan beton pracetak Tahun 2015} = \frac{25,45 \text{ juta m}^3}{136,97 \text{ juta m}^3} \times 100\% = 18,58\%$$

Sehingga, peningkatan penggunaan beton pracetak pada tahun 2015 seharusnya adalah sebesar 1,08%, berubah dari data LaKIP TA 2015 sebelumnya yang sebesar 0,625%. Selanjutnya, diketahui peningkatan persentase penggunaan beton pracetak pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Peningkatan Utilitas Produk Unggulan	
Target	: 1,5 %
Realisasi	: 1,86 %

$$\text{Penggunaan beton pracetak Tahun 2016} = \frac{28 \text{ juta m}^3}{136,97 \text{ juta m}^3} \times 100\% = 20,44\%$$

$$\delta_5 = 20,44\% - 17,5\% = 1,86\%$$

Sehingga, diketahui terjadi peningkatan persentase pemakaian beton pracetak pada proyek konstruksi sebanyak 1,86%.

Direktorat Bina Investasi Infrastruktur melalui kegiatan ekspor jasa konstruksi oleh BUJK Nasional memiliki target ekspor konstruksi setidaknya 3T per

tahun. Namun, pada tahun 2016 terlihat penurunan yang sangat drastis pada nilai ekspor konstruksi Indonesia yaitu hanya sebesar 0,17 T. adapun rincian ekspor konstruksi tahun ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 32. Nilai Ekspor Konstruksi Indonesia TA 2016

No.	NAMA PERUSAHAAN	2015		2016	
		Pekerjaan	Nilai	Pekerjaan	Nilai
KONTRAKTOR					
1	PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) & JV	Power Plant (Timor Leste)	\$ 15,000,000	Construction of CPLP Cable Stayed Bridge Comoro (Timor Leste)	\$ 3,400,000
		DEKUSI Airport (Timor Leste)	\$ 119,000,000	Construction of Uat Cua and Uat Wono Bridge	\$ 7,524,242
		ADB Road Maubin (Myanmar)	\$ 1,5,757,576	ETC Building (Timor Leste)	\$ 2,045,455
		Aksesori Comoro (Timor Leste)	\$ 3,030,303	-	-
		\$ 142,787,879		\$ 12,969,697	
2	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK	Pembangunan Jalan Sektor Karimbala	\$ 34,000,000	-	-
		Pembangunan Jalan Tiar - Gleno (Timor Leste)	\$ 29,000,000	-	-
		Pembangunan Rumah Budaya Indonesia	\$ 5,804,408	-	-
		\$ 68,804,408		-	
3	PT. WASKITA KARYA (PERSERO)	Academic Building, King Fahad Specialist Hospital and Research Center (Saudi Arabia)	\$ 2,706,155	-	-
			\$ 2,706,155		-
11	PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	Naibere Irrigation (Timor Leste)	\$ 1,147,232	-	-
			\$ 1,147,232		-
Total Ekspor			\$ 1,390,989,129		\$ 12,969,697
Dalam Rupiah			18,082,741,670,760		172,237,575,757

Sumber: LaKIP Direktorat Bina Investasi Infrastruktur TA 2016

Berdasarkan realisasi pencapaian pada tahun 2016, dapat pula dilihat selisih ketercapaiannya terhadap target pada Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi yang diharapkan tercapai pada tahun 2019. Selisih realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 33. Selisih Realisasi terhadap Target Renstra Tahun 2019

No	Sasaran Program Ditjen Bina Konstruksi	Indikator Program	Target 2019 Renstra	Baseline 2014	Realisasi 2015		Realisasi 2016		Selisih Realisasi Terhadap Target Renstra	
					Capaian	%	Capaian	%		
1	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional								
		a Peningkatan total nilai Konstruksi yang diselesaikan	15%	509 Triliun	574 Triliun	12.77%	636 Triliun	12.18%	-9.95%	
2	Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi	Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi besar								
		a Peningkatan jumlah BUJK berkualifikasi B2	90%	139 BUJK	184 BUJK	32.37%	219 BUJK	25.18%	32.45%	
3	Meningkatnya tertib penyelenggaraan konstruksi	Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi								
		a Peningkatan tertib sistem penyelenggaraan melalui penetapan lelang	40%	129 proyek	110 proyek	4.13%	46 satker	5.94%	29.93%	
		b Peningkatan tertib administrasi kontrak melalui kesesuaian kontrak dengan peraturan			49 proyek					
		c Peningkatan tertib konstruksi berkelanjutan melalui tersedianya dokumen RK3K			89 proyek					34 proyek
		d Peningkatan tertib manajemen mutu melalui tersedianya dokumen RMP dan RMK			34 proyek					
Total		218 proyek	227 proyek							
4	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten								
		a Peningkatan jumlah tenaga ahli bersertifikat	27%	64,578	104,774	2.80%	171,607	11.76%	15.24%	
		b Peningkatan jumlah tenaga terampil bersertifikat			101,669		138,593			396,050
		Total			166,247		243,367			567,657
5	Meningkatnya Utilitas Produk Unggulan	Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan								
		a Peningkatan jumlah kapasitas produksi perusahaan beton pracetak	15%	24 juta m ³	25.45 juta m ³	1.08%	28 juta m ³	1.86%	12.06%	

E. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DJBK DALAM RENSTRA KEMENTERIAN PUPR

Kelima outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tersebut merupakan dasar untuk menjawab realisasi sasaran strategis yang termuat dalam LaKIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai “Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional”. Indikator dari tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional memiliki bobot yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya unit kerja yang berkontribusi pada indikator tersebut. Daftar indikator sasaran strategis beserta dengan unit kerja yang melaksanakan kegiatan pada indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 34. Indikator Sasaran Strategis Berdasarkan Unit Kerja Pelaksana

Indikator	UNIT KERJA			Bobot	
	SUBSTANSI	MANAJEMEN	KERJA SAMA		
TINGKAT PENGENDALIAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI NASIONAL					
1 Rasio kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional	1. Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan	15,00%	
2 Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar	1. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi			15,00%	
3 Tingkat penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi	1. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			15,00%	
4 Persentase SDM konstruksi yang kompeten	1. Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi			74	40,00%
	2. Balai-Balai Pembinaan Konstruksi				
	3. Satker Manajemen dan Pengendalian Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah				
5 Persentase Utilitas Produk Unggulan	1. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi			15,00%	

Dapat dilihat berdasarkan tabel bahwa bobot tertinggi berada pada indikator Persentase SDM konstruksi yang kompeten. Hal ini dikarenakan banyaknya sumber daya manusia pada bidang konstruksi yang kompeten merupakan bekal utama dari program pembinaan konstruksi dalam rangka mencapai peningkatan outcome lainnya. Selain itu, jumlah unit kerja di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi yang melaksanakan pencapaian target peningkatan SDM konstruksi yang kompeten juga lebih banyak jika dibandingkan dengan outcome lainnya. Adapun ketercapaian sasaran strategis dari Program Pembinaan Konstruksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 35. Realisasi Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Sasaran Strategis Ditjen Bina Konstruksi (Renstra Kementerian PUPR)	Indikator	Target	Realisasi	% Ketercapaian Target	Bobot	% Realisasi Per Bobot	Target Renstra Kemen PUPR	Realisasi Renstra Kemen PUPR	
Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional	TINGKAT PENGENDALIAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI NASIONAL								
	1	Rasio kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional	3.00%	12.18%	406.00%	15%	15.00%	78.00%	90.44%
	2	Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar	25	35	140.00%	15%	15.00%		
	3	Tingkat penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi	8.00%	5.94%	74.25%	15%	11.14%		
	4	Persentase SDM konstruksi yang kompeten	4.00%	11.76%	294.00%	40%	40.00%		
5	Persentase Utilitas Produk Unggulan	3.00%	1.860%	62.00%	15%	9.30%			

Dapat dilihat pada tabel diatas mengenai capaian sasaran strategis Ditjen Bina Konstruksi dalam Renstra Kementerian PUPR berdasarkan pada Tujuan 1 Kementerian PUPR yaitu Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR yang terpadu dan berkelanjutan dalam mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI. Target capaian yang tertera pada Renstra Kementerian PUPR untuk Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur adalah 78%. Pada tahun 2016 ini Ditjen Bina Konstruksi dapat melampaui target dengan capaian sebesar **90,44%**. Capaian tersebut berdasarkan hasil dari meningkatnya pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional dengan 5 indikator yang disebutkan pada tabel. Adapun rumus penghitungan realisasi sasaran strategis adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \sum_{i=1}^5 \frac{(A_i \cdot X_i)}{Y_i}$$

Keterangan:

A = Bobot

X = Realisasi outcome (Jika Realisasi > Target, maka dianggap Realisasi = Target)

Y = Target

$$\text{Realisasi} = \left(\frac{15 \times 3}{3}\right) + \left(\frac{15 \times 25}{25}\right) + \left(\frac{15 \times 5,94}{8}\right) + \left(\frac{40 \times 2}{2}\right) + \left(\frac{15 \times 1,86}{3}\right) = 90,44\%$$

Capaian tersebut jika dibandingkan dengan target Renstra Kementerian PUPR pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 36. Selisih Capaian target Sasaran Strategis DJBK TA 2016 terhadap Target Renstra Kementerian PUPR Tahun 2019

Sasaran Strategis Ditjen Bina Konstruksi (Renstra Kementerian PUPR)	Indikator	Target Renstra Kemen PUPR Tahun 2019	Realisasi Renstra Kemen PUPR Tahun 2016	Selisih Target dengan Realisasi Renstra Kemen PUPR	
Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional	TINGKAT PENGENDALIAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI NASIONAL		90,00%	90,44%	-0,44%
	1	Rasio kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional			
	2	Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar			
	3	Tingkat penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi			
	4	Persentase SDM konstruksi yang kompeten			
5	Persentase Utilitas Produk Unggulan				

Sasaran strategis ini juga mendukung strategi Kementerian PUPR dengan rumusan tujuan yaitu “Menyelenggarakan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Terpadu dan Berkelanjutan Didukung Industri Konstruksi yang Berkualitas untuk Keseimbangan Pembangunan Antardaerah, Terutama di Kawasan Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Kawasan Pedesaan.

F. CAPAIAN SASARAN PROGRAM DJBK DALAM RPJMN 2015-2019

Sasaran strategis tersebut sudah selaras dengan sasaran pada RPJMN 2015-2019. Hanya terdapat beberapa penyesuaian yaitu: 1) level beberapa outcome dalam RPJMN berubah menjadi level output dalam Renstra; 2) perbedaan sasaran dan satuan antara RPJMN dan Renstra hanya pada perbedaan nomenklatur saja,

yaitu sasaran “Jumlah Badan Usaha” pada RPJMN menjadi “Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar” pada Renstra dengan target yang sudah dikonversi. Adapun realisasi target RPJMN pada tahun 2016 terkait bidang Bina Konstruksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 37. Capaian Target RPJMN Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitas Pengusahaan Infrastruktur TA 2016

No.	Program	Sasaran/Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	% Realisasi 2016	
1	Pembinaan Konstruksi dan Fasilitas Pengusahaan Infrastruktur	Diterapkannya standar manajemen K3 Konstruksi pada pekerjaan konstruksi				
		a.	Persentase pekerjaan konstruksi yang menerapkan K3	9	5,94	66%
2		Terbinanya badan usaha jasa konstruksi				
		a.	Jumlah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar	40	35	87,5%
3		Terseleenggaranya kerjasama pelatihan dengan penyelenggara pelatihan				
		a	Jumlah penyelenggara pelatihan	40	32	80%
4		Terseleenggaranya pelatihan kompetensi konstruksi				
		a	Jumlah instruktur/asesor	2.000	1.433	71,65%
		b	Jumlah tenaga kerja terlatih	150.000	19.258	12,84%

Adapun penjelasan terkait realisasi masing-masing sasaran berdasarkan indikatornya dapat dilihat di bawah ini:

1. Diterapkannya standar manajemen K3 Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi

Penerapan standar manajemen K3 Konstruksi pada pekerjaan konstruksi ditandai dengan persentase pekerjaan konstruksi yang menerapkan K3. Hal ini selaras dengan *outcome* Ditjen Bina Konstruksi berupa Meningkatnya tertib penyelenggaraan konstruksi yang ditandai dengan persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi. Dalam hal ini, penerapan K3 dilihat melalui tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi. Menurut data Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pada tahun 2016 terdapat penambahan 5,94% satker yang tertib menyelenggarakan standar manajemen K3. Peningkatan tersebut didukung oleh peningkatan tertib penyelenggaraan pada saat lelang, administrasi kontrak, dokumen RK3K dan dokumen RMP dan RMK.

2. Terbinanya Badan Usaha Jasa Konstruksi

Terbinanya badan usaha jasa konstruksi ditandai dengan jumlah badan usaha jasa konstruksi yang berkualifikasi besar. Menurut data dari Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi dan LPJKN, terdapat 35 BUJK yang pada tahun 2016 menjadi subkualifikasi B2. Hal tersebut selaras dengan *outcome* Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yaitu Meningkatnya persentase BUJK yang Berkualifikasi Besar.

3. Terselenggaranya Kerjasama Pelatihan dengan Penyelenggara Pelatihan

Terselenggaranya kerjasama pelatihan dengan penyelenggara pelatihan ditandai dengan jumlah penyelenggara pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dikoordinasikan oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan bersama dengan balai-balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Selama tahun 2016, terdapat 32 penyelenggara pelatihan yang bekerjasama baik dengan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan maupun balai-balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Adapun rincian kerjasama pelatihan yang telah dilaksanakan pada TA 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Daftar Instansi Penyelenggara Pelatihan bersama Ditjen Bina Konstruksi TA 2016

No	Tipe/ Jenis	Instansi	Mitra Kerja	Judul Kerja Sama
Lembaga Pemerintah				
1	MoU	Ditjen BK	Universitas Sriwijaya	Peningkatan dan pengembangan kualifikasi serta kompetensi sumber daya manusia dibidang jasa konstruksi
2	PKS	Dit KSP	Universitas Sriwijaya	Penyelenggaraan program peningkatan kompetensi peserta didik universitas bidang konstruksi
3	PKS	Dit KSP	19+1 Politeknik Negeri	Penyelenggaraan program peningkatan kompetensi peserta didik politeknik bidang konstruksi
4	PKS	Ditjen BK	Ditjen Dikdasmen Kemendikbud (SMK)	Peningkatan kompetensi bidang konstruksi di sekolah menengah kejuruan

No	Tipe/ Jenis	Instansi	Mitra Kerja	Judul Kerja Sama
5	MoU	Ditjen BK	1. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti 2. Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud 3. BNSP	Pengembangan sertifikasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bidang konstruksi melalui <i>link and match</i> pendidikan dan kebutuhan industri konstruksi
6	MoU	Kemen PUPR	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Penyelenggaraan program profesi insinyur
Lembaga Masyarakat				
1	MoU	Ditjen BK	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Pengembangan Sertifikasi dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Konstruksi
2	PKS	Dit KSP	Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Penyelenggaraan Program Fasilitas Peningkatan Tenaga Ahli Konstruksi Melalui Pembekalan dan Sertifikasi
3	MoU	Dit KSP	PT.MRT Jakarta (Direktur Utama)	Kerja Sama Di Bidang Peningkatan Kompetensi dan Keahlian SDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	PKS	Dit KSP	BPP GAPENSI	Peningkatan Kapasitas Badan Usaha dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Konstruksi
5	PKS	Dit KSP	Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia (IAPPI)	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Jasa Konstruksi Bidang Keahlian Beton Pracetak dan Prategang
6	PKS	Dit KSP	Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia (A2K4)	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Jasa Konstruksi Bidang Ahli dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi
7	MoU	Dit KSP	Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Jasa Konstruksi
				di Lembaga Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah
8	PKS	Dit KSP	Universitas Muhammadiyah	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Jasa

No	Tipe/ Jenis	Instansi	Mitra Kerja	Judul Kerja Sama
			Palembang	Konstruksi
9	PKS	Balai JKW II Palembang	Indocement dan LPJK	Pelaksanaan Pembekalan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
10	PKS	Balai JKW Banjarmasin	Indocement dan LPJK	Pelaksanaan Pembekalan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Sumber: LaKIP Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan (2016)

4. Terselenggaranya Pelatihan Kompetensi Konstruksi

Terselenggaranya pelatihan kompetensi konstruksi ditandai dengan jumlah instruktur/asesor dan jumlah tenaga kerja terlatih. Hal ini selaras dengan *outcome* Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yaitu Meningkatnya SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten. Adapun untuk indikator jumlah instruktur/asesor telah tercapai sebanyak 1433 orang pada tahun 2016. Data tersebut didapatkan dari pelatihan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan beserta balai-balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Sedangkan jumlah tenaga kerja terlatih adalah sebanyak 19.258 orang yang didapatkan dari data Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan beserta balai-balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

4.2 PERBANDINGAN KINERJA

Tahun 2016 merupakan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2015-2019 yang merupakan Renstra pertama organisasi ini. Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal organisasi. Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dapat dilihat melalui pencapaian sasaran program sebagai berikut:

Tabel 39. Perbandingan Capaian Kinerja TA 2015-2016

SASARAN/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2015		2016	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
PROGRAM: PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN FASILITASI PENGUSAHAAN INFRASTRUKTUR						
SASARAN PROGRAM						
1	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	%	1.5	12.77	1.5	12.18
	1) Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional					
2	Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar	%	9	32.37	9	25.18
	1) Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi Besar					
3	Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan administrasi kontrak	%	4	4.13	4	5.94
	1) Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi					
4	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	%	1	2.8	2	11.76
	1) Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten					
5	Meningkatnya utilitas produk unggulan	%	1.5	0.625	1.5	1.86
	1) Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan					

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2016, kelima sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah tercapai targetnya. Hal ini merupakan suatu perbaikan kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana terdapat 1 sasaran program mengenai peningkatan utilitas produk unggulan yang tidak tercapai targetnya.

4.3 ANALISIS KINERJA ORGANISASI

Ketercapaian sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016 tentunya didukung oleh capaian output unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Ketercapaian tersebut dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Ketercapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dijabarkan melalui capaian Perjanjian Kinerja TA 2016 sebagai berikut:

Tabel 40. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Satuan
Penyelenggaraan Pelayanan Teknis Dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Layanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi		4	4	Dokumen
	1	Dokumen Perencanaan, Program dan Anggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja	1	1	Dokumen
	2	Layanan Mutasi Pegawai, Pengembangan Pegawai dan Penyelenggaraan Ortala	1	1	Dokumen
	3	Layanan Akuntansi Keuangan, Pengelolaan BMN, Umum Rumah Tangga dan Perlengkapan	1	1	Dokumen
	4	Layanan Hukum, Informasi dan Komunikasi Publik	1	1	Dokumen
	Pelaporan secara Elektronik (E-Monitoring)		1	1	Laporan
	Layanan Perkantoran		12	12	Bulan Layanan
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		15	15	Unit
Kerja Sama dan Pemberdayaan	Kerja Sama dan Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		1	1	Profil

Sumber: LaKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016

Capaian indikator kinerja kegiatan Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi TA 2016 merupakan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi. Pada capaian 4 (empat) dokumen layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi mempresentasikan dukungan seluruh bagian di

lingkungan Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi. Adapun penjabaran dari seluruh capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Perencanaan, Program dan Anggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja

Dokumen tersebut tercapai berdasar kepada laporan-laporan suboutput pada Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang terdiri dari:

- Sinkronisasi Perencanaan Pembinaan Konstruksi Pusat dan Daerah
- Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2017-2019
- Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran TA 2017
- Bantek Pelaksanaan Program dan Anggaran TA 2016 dan Penyusunan Program dan Anggaran TA 2017
- Pengendalian Pelaksanaan Program Pembinaan Konstruksi TA 2016
- Pengukuran Pencapaian Outcome 2015

Pada tanggal 18-20 Januari 2016 telah diadakan kegiatan pelatihan dan inputing data emonitoring yang dihadiri oleh petugas emonitoring di lingkungan Direktorat Jenderal Bina



Gambar 7. Pemaparan Materi tentang Penggunaan Aplikasi E-monitoring

Konstruksi yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan

informasi mengenai penggunaan aplikasi e-monitoring sebagai instrumen pelaporan progres capaian secara online. Selain itu, telah dilaksanakan pula Workshop Penyiapan LaKIP Unit Kerja dan Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Bina Konstruksi pada Senin, 17 Oktober 2016 yang ditujukan memberikan panduan dan petunjuk kepada seluruh satker mengenai penyusunan laporan evaluasi kinerja pada tahun anggaran berlangsung. Laporan evaluasi tersebut dimaksudkan untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan untuk menjaga prinsip akuntabel dan transparansi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.

2. Layanan Mutasi Pegawai, Pengembangan Pegawai, dan Penyelenggaraan Ortala

Dokumen tersebut tercapai berdasar kepada laporan-laporan suboutput pada Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana yang terdiri dari:

- Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian
- Penyusunan NSPK Jafung pembinaan jasa konstruksi
- Pemantauan prestasi kerja
- Pembinaan SDM
- Masukan pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi ASN DJBK
- Evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja
- Penyusunan formasi pegawai
- Penyusunan SOP, Tata Laksana, dan SMM DJBK
- Fasilitasi reformasi birokrasi

Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai Ditjen Bina Konstruksi TA 2016 yang dilaksanakan pada 13-14 April 2016. Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan untuk mewujudkan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil sebagaimana tercantum dalam UU no. 43 tahun 1999. Penilaian kinerja juga merupakan suatu upaya untuk memberikan penghargaan atas kinerja sebelumnya dan memperbaiki kinerja pada masa yang akan mendatang. Selain itu, untuk membangun budaya kerja yang lebih mantap, Ditjen Bina Konstruksi melalui Bagian Kepegawaian dan Ortala telah menyelenggarakan kegiatan ESQ yang diikuti oleh seluruh pegawai di Ditjen Bina Konstruksi pada 22-23 Juli 2016. Kegiatan *capacity building* ini dimaksudkan untuk memantapkan penilaian nilai-nilai organisasi Ditjen Bina Konstruksi, KITA, kepada seluruh insan DJBK.



Gambar 8. Dirjen Bina Konstruksi dan Ary Ginanjar pada Kegiatan ESQ

3. Layanan Akuntansi Keuangan, Pengelolaan BMN, Umum Rumah Tangga dan Perlengkapan

Dokumen tersebut tercapai berdasar kepada laporan-laporan suboutput pada Bagian Keuangan dan Umum yang terdiri dari:

- Kegiatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan Satker Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
- Kajian Pengembangan Potensi PNBPN Ditjen Bina Konstruksi
- Pelaksanaan Administrasi Tata Usaha dan Kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
- Konsultan Manajemen Penataan Arsip
- Pelaksanaan Penertiban dan Penatausahaan Barang Milik Negara
- Kajian Pengembangan Manajemen Aset Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Kegiatan yang telah diselenggarakan untuk mendukung capaian *sub output* tersebut diantaranya adalah Bimbingan Teknis Tertib Administrasi Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Jasa Konstruksi pada Satker di Lingkungan Ditjen Bina Konstruksi pada 12 Agustus 2016 dengan maksud sebagai persiapan dan perencanaan pengelolaan kegiatan kesatkeran dengan menerapkan tertib administrasi keuangan. Pada bintek ini juga dilakukan penguatan SDM dalam melaksanakan manajemen proyek dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di tiap satker agar pelaksanaan penyerapan anggaran dapat mencapai ketepatan waktu, mutu dan biaya. Setiap kegiatan yang dimiliki oleh satuan kerja di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi harus mampu mendukung pencapaian *outcome* Ditjen Bina Konstruksi dan diharapkan tidak ada paket pekerjaan yang hampir sama dengan paket pekerjaan tahun sebelumnya.

4. Layanan Hukum, Informasi dan Komunikasi Publik

Dokumen tersebut tercapai berdasar kepada laporan-laporan suboutput pada Bagian Hukum, Data dan Komunikasi Publik yang terdiri dari:

- Identifikasi Manfaat Produk Hukum dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
- Fasilitasi Advokasi Hukum dalam rangka Penanganan Perkara dan Pendampingan Hukum di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

- Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bina Konstruksi
- Pendampingan Pelaksanaan Strategi Komunikasi Dan Publikasi Ditjen Bina Konstruksi
- Pengembangan dan Pengelolaan Data Bina Konstruksi
- Fasilitasi Sistem Informasi Bina Konstruksi



Gambar 9. Presiden Indonesia dalam Pembukaan Konstruksi Indonesia 2016

Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Hukum, Data dan Komunikasi Publik dalam mencapai target *sub output* tersebut adalah Konstruksi Indonesia (KI) tahun 2016 dengan tema Ketahanan Masyarakat Jasa Konstruksi Indonesia Menghadapi

Liberalisasi Perdagangan Barang dan Jasa. KI merupakan salah satu upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menumbuhkembangkan apresiasi terhadap peran industri konstruksi dalam perkembangan sektor perekonomian serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pelaku konstruksi nasional. Dalam kegiatan Konstruksi Indonesia (KI) 2016 telah diselenggarakan 2 (dua) seminar diantaranya adalah Seminar Construction Tech Indo (CTI) dengan tema Perubahan Paradigma Investasi Infrastruktur Dan Reformasi Industri Konstruksi Bagi Pencapaian Target Pembangunan Infrastruktur 2015 – 2019. Dalam forum tersebut, disebutkan bahwa terdapat gap pembiayaan pembangunan Infrastruktur sebesar Rp 626 Triliun, yaitu kebutuhan pendanaan Infrastruktur bidang ke-PUPR-an sebesar IDR 1.915 T sementara total anggaran pendanaan APBN yang tersedia di Kementerian PUPR sebesar 1.289 T. Sehingga diperlukan adanya simpul KPBU yang lebih banyak lagi di lingkungan Kementerian PUPR. Dalam hal ini, Ditjen Bina Konstruksi melalui Direktorat Bina Investasi Infrastruktur memiliki andil yang penting dalam penanganan tantangan tersebut.

5. Kerja Sama dan Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Profil Kerja Sama dan Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi telah tercapai melalui kegiatan Pameran BAUMA 2016 yang



Gambar 10. Pameran BAUMA di Munich, Jerman

diselenggarakan di New Munich Trade Fair Center, Munich, Jerman, pada 11 – 17 April 2016. Kegiatan ini diikuti oleh 3.423 *exhibitors* dari 58 negara, lebih dari 580.000 pengunjung (meningkat 9% lebih dari jumlah pengunjung BAUMA sebelumnya pada tahun 2013). Pada kegiatan ini beberapa sektor yang ditampilkan adalah *construction sites; mining, extraction and processing of raw material; production of building material; component and service supplier*. Beberapa materi juga dibahas pada kegiatan ini diantaranya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian (Perindustrian, PUPR, dan ESDM), BUMN Karya (Wijaya Karya, Adhi Karya) dan perusahaan di bidang konstruksi.

B. Direktorat Bina Investasi Infrastruktur

Ketercapaian kinerja Direktorat Bina Investasi Infrastruktur dijabarkan melalui capaian Perjanjian Kinerja TA 2016 sebagai berikut:

Tabel 41. Capaian Kinerja Direktorat Bina Investasi Infrastruktur TA 2016

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Satuan
Pembinaan Investasi Konstruksi	Tersedianya Pengaturan Pembinaan Investasi Infrastruktur		4	5	Draft NSPK
	1	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Pola Investasi dan Pola Pembiayaan Infrastruktur	2	2	Draft NSPK
	2	Tersusunnya NSPK Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur	2	3	Draft NSPK
	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko		5	4	Profil
	1	Terlaksananya Fasilitasi Investasi Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko	2	2	Profil
	2	Tersusunnya Profil Pasar Konstruksi Nasional dan Internasional	2	2	Profil
	3	Tersusunnya Profil Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur	1	-	Profil

	Terlaksananya Layanan Manajemen	1	1	Dokumen
	Pelaporan secara Elektronik (E-Monitoring)	1	1	Laporan
	Layanan Perkantoran	12	12	Bulan Layanan
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	15	15	Unit

Sumber: LaKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016

1. Tersedianya Pengaturan Pembinaan Investasi Infrastruktur

- 1 Draft NSPK Rapermen Standardisasi dokumen investasi infrastruktur jalan tol
- 1 Draft NSPK Peta Jalan Harmonisasi Regulasi Investasi Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 1 Draft NSPK Pelaksanaan Bundling Porject Pada Infastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 1 Draft NSPK Efisiensi dan Efektifitas (Value For Money) Penyelenggaraan Infrastruktur Utama di Indonesia
- 1 Draft NSPK Permen Simpul KPBU

2. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko

- 1 Profil Alokasi Risiko Dalam Perjanjian Investasi Sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Investasi
- 1 Profil Fasilitas Investasi Infrastruktur oleh Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera
- 1 Profil Pemetaan Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar Infrastruktur
- 1 Profil Promosi/RoadShow/Pameran/Jejaring Pasar Konstruksi dan Investasi Infrastruktur

Pada Perjanjian Kinerja terlihat bahwa adanya penambahan output “Tersusunnya Profil Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur” dalam satuan Profil. Penambahan target ini, awalnya bertujuan untuk menjawab isu strategis terkait paradigma investasi infrastruktur yang harus diubah dari APBN/APBD menjadi mengutamakan investasi swasta. Tetapi dalam proses perencanaan kegiatan TA. 2016 ditetapkan bahwa untuk melakukan perubahan paradigma haruslah melakukan kajian atau analisis yang

menghasilkan pedoman bukan profil. Pada TA 2016 telah ditetapkan untuk menambah capaian pada output “Tersusunnya NSPK Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur” menjadi 3 draft NSPK. Dalam hal ini disimpulkan:

- ❖ Capaian target Perjanjian Kinerja dan TA. 2016 tidak terjawab, dikarenakan terjadi perubahan ketetapan terkait satuan kajian/analisis. Untuk output penyelenggaraan investasi infrastruktur dihasilkan kajian berupa draft Permen Simpul KPBU dalam satuan draft NSPK bukan profil.
- ❖ Capaian Renstra dan TA. 2016 terjawab dan melebihi 1 draft NSPK dari target Renstra. Pada TA. 2016 dihasilkan 5 draft NSPK dan 4 Profil serta 13 Bulan Layanan sementara pada Renstra ditargetkan 4 Draft NSPK dan 4 Profil serta 13 Bulan Layanan.
- ❖ Perubahan arah kebijakan dan pengembangan tugas dan fungsi organisasi, yang lebih fokus kepada KPBU. Perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki paradigma masyarakat konstruksi yang selama ini sangat bergantung kepada APBN/APBD sehingga diharapkan nantinya lebih mendahulukan investasi swasta.

C. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Ketercapaian kinerja Direktorat Bina Investasi Infrastruktur dijabarkan melalui capaian Perjanjian Kinerja TA 2016 sebagai berikut:

Tabel 42. Capaian Kinerja Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi TA 2016

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Satuan
Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	Tersedianya Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi		7	7	Draft NSPK
	1	Tersusunnya Standar dan Pedoman Sistem Penyelenggaraan Konstruksi	2	2	Draft NSPK
	2	Tersusunnya Standar dan Pedoman Kontrak Konstruksi	1	1	Draft NSPK
	3	Tersusunnya Standar dan Pedoman Konstruksi Berkelanjutan	2	2	Draft NSPK
	4	Tersusunnya Standar dan Pedoman Manajemen Mutu	2	2	Draft NSPK
	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Konstruksi		5	5	Profil
	1	Tersusunnya Profil Sistem Penyelenggaraan Konstruksi	2	2	Profil
	2	Tersusunnya Profil Pelaksanaan Kontrak Konstruksi	1	1	Profil
	3	Tersusunnya Profil Pelaksanaan Konstruksi Berkelanjutan	1	1	Profil

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Satuan
	4	Tersusunnya Profil Pelaksanaan Manajemen Mutu	1	1	Profil
		Terlaksananya Layanan Manajemen	1	1	Dokumen
		Pelaporan secara Elektronik (E-Monitoring)	1	1	Laporan
		Layanan Perkantoran	12	12	Bulan Layanan
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	20		Unit
		Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1		Unit

Sumber: LaKIP Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi TA 2016

1. Tersedianya Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi
 - Revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 19/PRT/M/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancangan (*Design & Build*).
 - Konsep Pedoman Evaluasi Pemilihan Sistem Pengadaan Barang dan jasa (*Metode Project Delivery*)
 - Konsep Standar Dokumen Kontrak Konstruksi: Perencanaan Pekerjaan Konstruksi & Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
 - Pedoman Pelaksanaan SMK3L
 - Petunjuk Pelaksanaan Investigasi Kasus Kecelakaan Konstruksi
 - Petunjuk Pelaksanaan dan Instruksi Kerja di Lingkungan Ditjen Bina Konstruksi
 - Draft Revisi Peraturan Menteri No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu
2. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Konstruksi
 - 2 Profil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Konstruksi
 - 1 Profil Pelaksanaan Kontrak Konstruksi
 - 1 Prodil Pelaksanaan Konstruksi Berkelanjutan
 - 1 Profil Manajemen Mutu

Berdasarkan hasil output tersebut, dapat dilihat bahwa seluruh output Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi telah tercapai dengan baik. Beberapa penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerjanya antara lain:

- ❖ Terdapat acuan pengukuran tertib penyelenggaraan yang jelas, yaitu sesuai dengan 4 (empat) tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi yang didalamnya juga terdapat sub indikator yang total berjumlah 68 indikator.
- ❖ Terdapat kejelasan terhadap target pengukuran satker yang dibagi menjadi 5 tahun, dimana yang menjadi target adalah 782 satker Kementerian PUPR sehingga di Tahun 2016 sasaran tertib penyelenggaraan sebesar 70 satker ($9\% \times 782$) dan target outcome 31 satker ($4\% \times 313$).
- ❖ Adanya mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang terintegrasi. Yaitu adanya KMW dan KMP serta tenaga survei yang dibawah kendali sekretariat. Dan adanya KMPT dan KPT dibawah kendali Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- ❖ Adanya keterlibatan teknologi informasi dalam pengawasan kegiatan yaitu dengan dibangun form monitoring dan evaluasi berbasis website.

D. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

Ketercapaian kinerja Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi dijabarkan melalui capaian Perjanjian Kinerja TA 2016 sebagai berikut:

Tabel 43. Capaian Kinerja Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi TA 2016

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Satuan
Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi		Tersedianya Pengaturan Pembinaan Kelembagaan Jasa Konstruksi	4	4	Draft NSPK
	1	Tersusunnya Standar dan Pedoman Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	2	2	Draft NSPK
	2	Tersusunnya Standar dan Pedoman Usaha Jasa Konstruksi	2	2	Draft NSPK
		Tersedianya Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Jasa Konstruksi	4	4	Profil
	1	Tersusunnya Profil Kinerja Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	2	2	Profil
	2	Tersusunnya Profil Kinerja Usaha Jasa Konstruksi	2	2	Profil
		Tersedianya Pengaturan Pembinaan Sumber Daya Jasa Konstruksi	4	4	Draft NSPK
	1	Tersusunnya Standar dan Pedoman Material dan Peralatan Konstruksi	2	2	Draft NSPK
	2	Tersusunnya Standar dan Pedoman Teknologi dan Produk Dalam Negeri	2	2	Draft NSPK
		Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya Jasa Konstruksi	4	4	Profil
	1	Tersusunnya Profil Kinerja Material dan Peralatan Konstruksi	2	2	Profil

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Satuan
	2	Tersusunnya Profil Kinerja Teknologi dan Produk Dalam Negeri	2	2	Profil
		Terlaksananya Layanan Manajemen	1	1	Dokumen
		Pelaporan secara Elektronik (E-Monitoring)	1	1	Laporan
		Layanan Perkantoran	12	12	Bulan Layanan
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	40	40	Unit
		Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	10	10	Unit

1. Tersedianya Pengaturan Pembinaan Kelembagaan Jasa Konstruksi
 - Draft Undang-Undang Jasa Konstruksi
 - Kepmen 991/2016 tentang Penetapan Daftar Nama Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020
 - Permen 03/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing
 - Premen 30/2016 tentang Perubahan Pertama Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing
2. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Jasa Konstruksi
 - Profil Kinerja Kelembagaan Masyarakat
 - Profil Kinerja Kelembagaan Pemerintah
 - Profil Usaha BUJK Asing dan BUJK PMA
 - Profil Usaha BUJK Nasional
3. Tersedianya Pengaturan Pembinaan Sumber Daya Jasa Konstruksi
 - Draft Naskah Akademik Peralatan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) untuk Mendukung Jaringan Jalan di Indonesia
 - Draft Permen Registrasi Alat Berat
 - Draft Permen Perhitungan Mandiri TKDN
 - Draft Permen Kerjasama Riset Konstruksi
4. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya Jasa Konstruksi

- Pedoman Sistem Informasi MPK Indonesia
- Profil Material dan Peralatan Konstruksi
- Profil Penghargaan Kinerja Proyek Konstruksi 2016
- Profil Hasil Perhitungan TKDN pada Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya

Ketercapaian kinerja pada Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi pada tahun ini sudah tercapai 100%. Hal ini dapat disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang diperjanjikan di dalam dokumen perjanjian kinerja. Tahun 2016 merupakan tahun yang penting bagi sektor kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi. Karena, pada tahun ini terdapat dua momen penting untuk dunia konstruksi di Indonesia yaitu disahkannya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru, serta dikukuhkannya pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk periode 2016-2020.

Undang-Undang Jasa Konstruksi yang telah disahkan merupakan pengganti UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang terdiri dari 12 Bab dan 46 Pasal. Sedangkan UU Jasa Konstruksi yang baru terdiri dari 14 bab dan 106 pasal. Beberapa substansi penting UU Jasa Konstruksi yang baru dan telah disepakati pemerintah dan DPR RI antara lain:

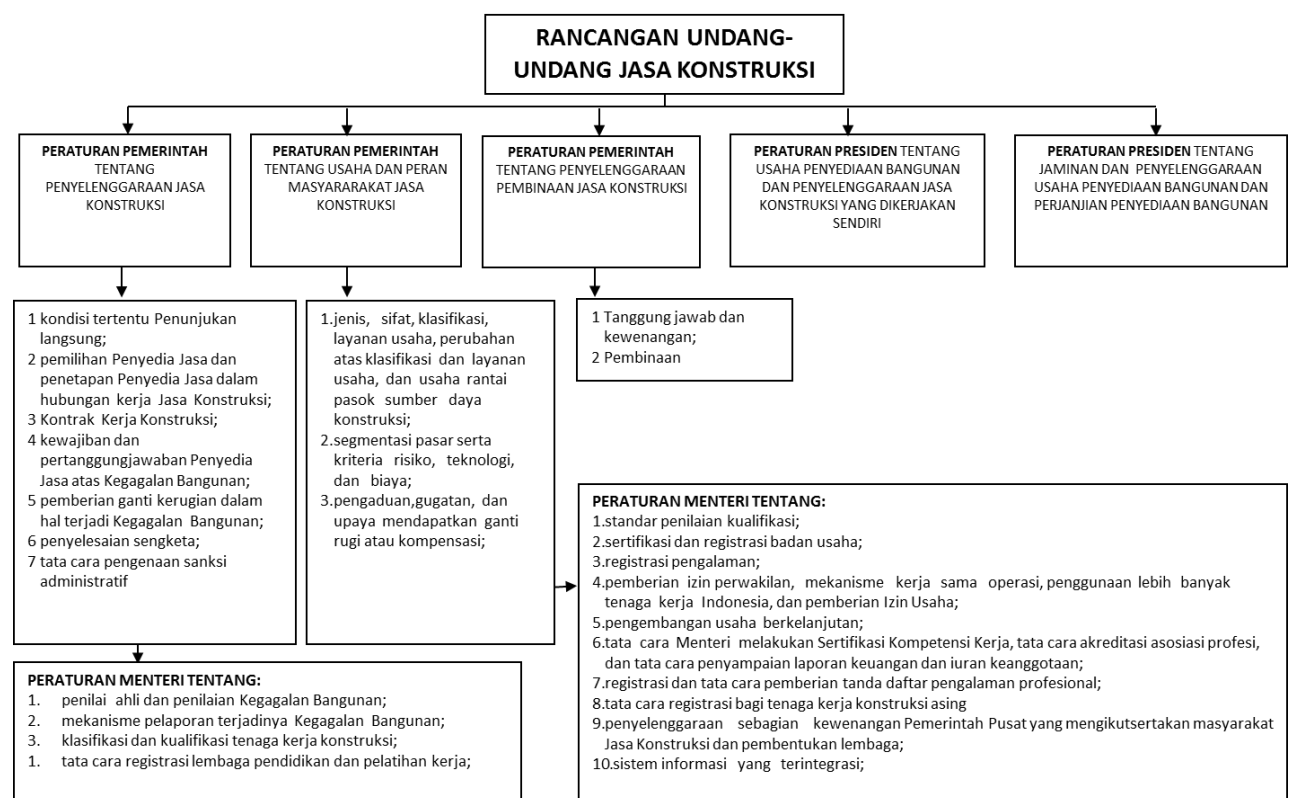


Gambar 11. Rapat Paripurna DPR RI sekaligus Pengesahan UU Jasa Konstruksi

- a. Adanya pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
- b. Menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi yang adil, sehat, dan terbuka melalui pola persaingan yang sehat.
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui kemitraan dan sistem informasi, sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

- d. Lingkup pengaturan yang diperluas tidak hanya mengatur usaha jasa konstruksi melainkan mengatur rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan.
- e. Adanya perlindungan hukum terhadap upaya yang menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi agar tidak mengganggu proses pembangunan.
- f. Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dalam bidang jasa konstruksi, termasuk pengaturan badan usaha asing yang bekerja di Indonesia, termasuk penetapan standar renumerasi minimal untuk tenaga kerja konstruksi.
- g. Adanya jaring pengaman terhadap investasi yang akan masuk di bidang jasa konstruksi.
- h. Mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4).

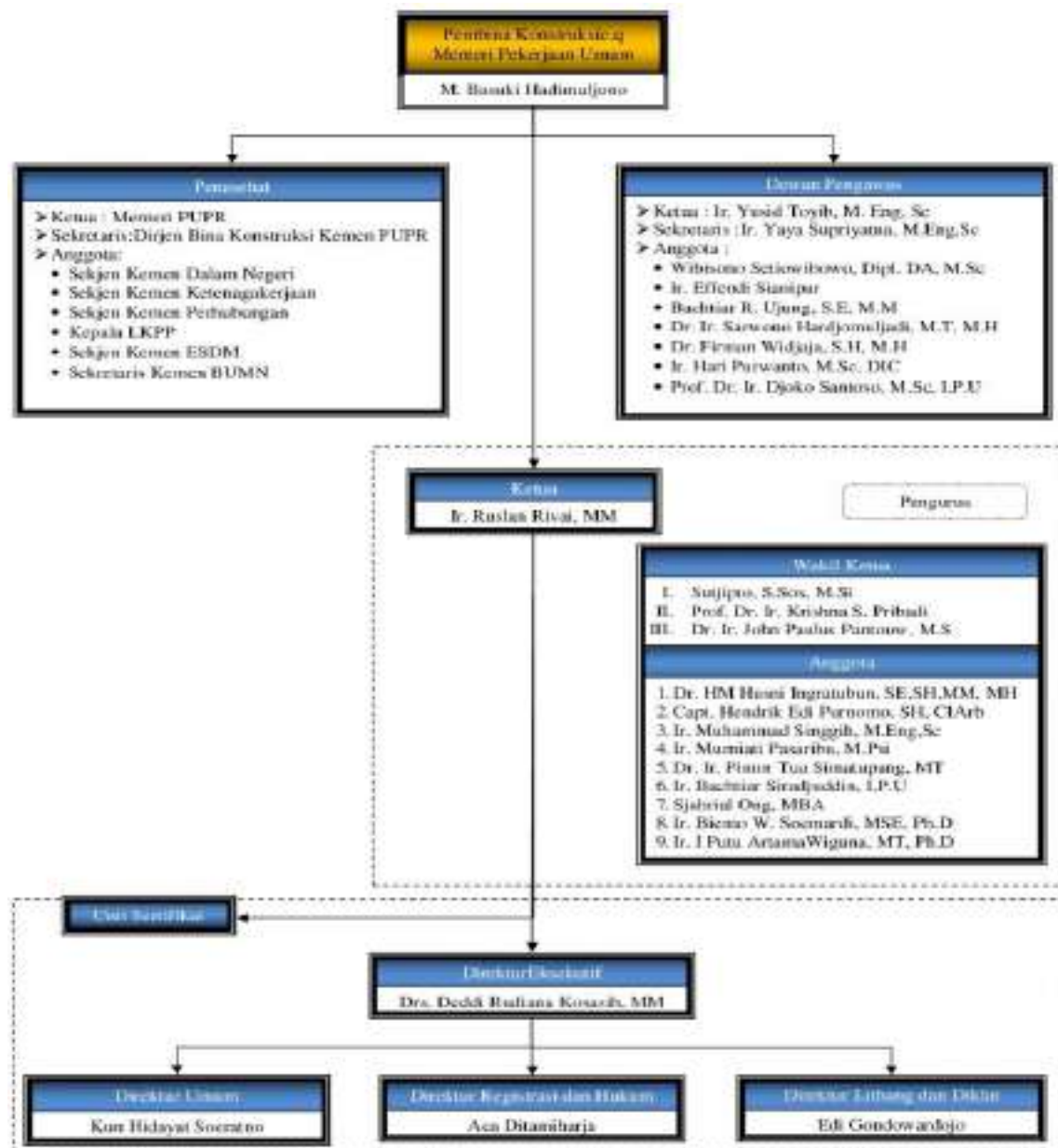
Dengan disahkannya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga harus mempersiapkan turunan undang-undang sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan agar dapat dilaksanakan. Adapun *family tree* Undang-Undang Jasa Konstruksi dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Bagan 3. *Family Tree* Undang-Undang Jasa Konstruksi

Sumber: Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi (2016)

Momen penting lainnya adalah pengukuhan pengurus LPJK Tingkat Nasional Periode 2016-2020 yang diadakan pada Kamis, 12 Januari 2017 lalu di Jakarta. Pengukuhan ini merupakan tindak lanjut setelah ditetapkannya pengurus LPJK Tingkat Nasional sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja LPJK. Pengurus LPJK Nasional periode 2016-2020 dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Sumber: lpjk.net

Bagan 4. Struktur Organisasi LPJK Nasional Periode 2016-2020

E. Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Ketercapaian kinerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi dijabarkan melalui capaian Perjanjian Kinerja TA 2016 sebagai berikut:

Tabel 44. Capaian Kinerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi TA 2016

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Satuan
Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi		Tersedianya Pengaturan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Kerja Konstruksi	30	31	Draft NSPK
	1	Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Konstruksi	24	25	Draft NSPK
	2	Tersusunnya Standar dan Pedoman Penerapan Peningkatan Kompetensi Kerja Konstruksi	2	2	Draft NSPK
	3	Tersusunnya Standar dan Pedoman Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	2	2	Draft NSPK
	4	Tersusunnya Standar dan Pedoman Produktivitas Kerja Konstruksi	2	2	Draft NSPK
		Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kompetensi dan Produktivitas Kerja Konstruksi	3	3	Profil
	1	Tersusunnya Profil Kinerja Penerapan Kompetensi Kerja Konstruksi	1	1	Profil
	2	Tersusunnya Profil Kinerja Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	1	1	Profil
	3	Teciptyanya Kinerja Produktivitas Kerja Konstruksi	1	1	Profil
		Terlaksananya Layanan Manajemen	1	1	Dokumen
		Pelaporan secara Elektronik (E-Monitoring)	1	1	Laporan
		Layanan Perkantoran	12	12	Bulan Layanan
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1	1	Unit
		Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1	1	Unit

1. Tersedianya Pengaturan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

- SKKNI Subklasifikasi Teknik : Terowongan, Bangunan Lepas Pantai, Sanitasi dan Limbah, Plumbing dan Pompa Mekanik, dan Landasan Terbang (5 NSPK)
- Materi Kompetensi Jabatan Kerja Operator : Mesin Pencampur Aspal, Mesin Penggalar Aspal, *Backhoe Loader*, *Wheel Loader*, dan Mesin Pemecah Batu (5 NSPK)
- Materi Kompetensi : Ahli Manajemen Konstruksi, Ahli SDA, Teknisi Lab Tanah, Ahli Teknik Jalan, Ahli Geodesi, *Quality Controller*, Ahli Geoteknik,

- Ahli Teknik Bangunan Gedung, dan Ahli Teknik Bendungan Besar (9 NSPK)
- Pemutakhiran Materi Kompetensi : Jabatan Kerja *Quantity Surveyor*, Jabatan Kerja Pelaksana Pekerjaan Jalan, Pelaksana Bangunan Irigasi, Operator Excavator, Juru Gambar Arsitektur, dan Teknisi Fire Alarm (6 NSPK)
 - Sistem Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
 - Penerapan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa Konstruksi
 - Naskah Akademik dan Rapermen Tentang RFPE & RFA
 - Rapermen tentang Pedoman Penilaian Kinerja Profesi dalam Pembinaan Pengembangan Profesionalitas
 - Penetapan Standar Pengukuran Produktivitas Konstruksi
 - Naskah Akademik Kebijakan Pembinaan Konstruksi untuk Peningkatan Produktivitas Konstruksi
2. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kompetensi dan Produktivitas Kerja Konstruksi
- Profil Penerapan Kompetensi Konstruksi
 - *Mutual Recognition Arrangements (MRA) on Engineering Services and Architectural Services*
 - *Bantek Manajemen dan Pengukuran Produktivitas Konstruksi*

F. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan

Ketercapaian kinerja Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan dijabarkan melalui capaian Perjanjian Kinerja TA 2016 sebagai berikut:

Tabel 45. Capaian Kinerja Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan TA 2016

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Satuan
Kerja Sama dan Pemberdayaan		Terlaksananya Kerja Sama dan Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas	4	4	Profil
	1	Terlaksananya Kerja Sama Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	1	1	Profil
	2	Terlaksananya Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Wilayah I	1	1	Profil
	3	Terlaksananya Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Wilayah II	1	1	Profil
	4	Terlaksananya Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Wilayah III	1	1	Profil

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Satuan
		Terlaksananya Layanan Manajemen	1	1	Dokumen
		Layanan Perkantoran	12	12	Bulan Layanan
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	139	75	Unit
		Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	83	0	Unit

1. Terlaksananya Kerja Sama dan Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
 - Profil Kerja Sama Jasa Konstruksi
 - Profil Pemberdayaan Jasa Konstruksi Wilayah I
 - Profil Pemberdayaan Jasa Konstruksi Wilayah II
 - Profil Pemberdayaan Jasa Konstruksi Wilayah III

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan walau tidak berkontribusi secara langsung dalam pencapaian outcome, namun berada pada komponen kerja sama dan memegang peranan penting dalam pencapaian target outcome melalui kegiatan-kegiatannya. Dalam rangka mendukung percepatan ketersediaan SDM penyedia konstruksi yang kompeten, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan melakukan **sapta agenda percepatan sertifikasi kompetensi bidang jasa konstruksi** sebagai berikut:



Bagan 5. Sapta Agenda Percepatan Sertifikasi Kompetensi Konstruksi

- i. Mendorong penciptaan instruktur pelatihan, asesor pelatihan, dan mandor calon instruktur terlatih dan tersertifikasi. Pelatihan berbasis kompetensi harus menjadi instrumen untuk mendorong percepatan SDM Konstruksi. Salah satu yang harus disiapkan adalah peningkatan dan penciptaan instruktur/asesor yang berkualitas. Penciptaan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui Kerja sama bersama asosiasi instruktur/asesor bidang konstruksi yang ada.
- ii. Untuk dunia pendidikan, dilakukan pembenahan skema sertifikasi, sehingga tercipta sinergi antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah. Dilakukan dengan pembenahan skema Sertifikasi Kualifikasi dan Okupansi politeknik/SMK yang tahun ini sedang dibuat. Setelah skema tersebut selesai, ke depan akan diberlakukan secara legal oleh Kementerian PUPR. Dengan membangun/menyusun skema tersebut, Kementerian PUPR ikut mendukung sinergi antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah.
- iii. Untuk menjaga standar mutu sertifikasi, ke depan akan dilakukan standarisasi USTK (Unit Sertifikasi Tenaga Kerja) setara dengan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Skema sertifikasi BNSP dapat dijadikan acuan/referensi karena telah sesuai dengan standar internasional.
- iv. Pelaksanaan program binjakonda (Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah). Program ini mencerminkan sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bagaimana kita memberdayakan dan mendorong pemerintah daerah untuk memiliki Unit Pembinaan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana pemerintah provinsi bertanggungjawab terhadap penciptaan Tenaga Ahli dan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab untuk penciptaan Tenaga Terampil.
- v. *Link and match* antara dunia pendidikan, industri dan pemerintah, di antaranya menciptakan akses pelaksanaan *On the Job Training* pada proyek-proyek konstruksi. Sinergitas ini diharapkan dapat membantu siswa dan mahasiswa dengan jurusan yang terkait dengan bidang konstruksi untuk mendapatkan akses pelaksanaan *On Job Training* pada proyek-proyek konstruksi. **On Job Training** ini penting untuk memberikan

pengalaman lapangan awal dalam menapaki dunia kerja di sektor jasa konstruksi.

- vi. Program pelatihan mandiri/plasma. Mekanismenya dilakukan dengan melatih para mandor yang bekerja pada proyek-proyek konstruksi untuk dapat menjadi trainer bagi tenaga-tenaga terampil yang menjadi anggotanya;
- vii. Program pelatihan dan uji kompetensi dengan Kendaraan Pelatihan Keliling/*Mobile Training Unit* (MTU). Mengingat pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi terkadang di pelosok daerah/pedesaan yang kurang akan sarana dan prasarana yang memadai, maka diperlukan juga adanya *Mobile Training Unit* (MTU). MTU ini dapat digunakan untuk melatih masyarakat di pedesaan secara langsung atau proaktif dengan peralatan dan instruktur pelatihan bersifat bergerak. Kegiatan ini diharapkan mampu menyediakan kesempatan luas kepada masyarakat pedesaan dalam meningkatkan keterampilan kerja di sektor konstruksi. Kegiatan ini akan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pembina konstruksi daerah. Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian outcome tersebut, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan bertugas untuk melaksanakan output: **Terlaksananya kerja sama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi**, yang diukur melalui jumlah profil Kerja sama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi sebanyak 5 profil dalam 5 tahun. Untuk mencapai output tersebut, terdapat beberapa sub-output yang menjadi bagian dari pencapaian output: terlaksananya Kerja sama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi, yaitu:
 - o Standar dan pedoman Kerja sama dan pemberdayaan, dengan target 10 draft NSPK dalam 5 tahun.
 - o Pengembangan kompetensi dan produktivitas konstruksi bersama lembaga pemerintah dan/atau masyarakat, dengan target 200 Kerja sama penyelenggara pemberdayaan dalam 5 tahun.
 - o Profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan, dengan target 15 profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan wilayah dalam 5 tahun.

G. Kegiatan Strategis Lainnya

a) **Mobile Training Unit (MTU)**

Tujuan dari pelaksanaan pelatihan menggunakan *Mobile Training Unit* (MTU) antara lain sebagai berikut:

- Memberikan **stimulus/percontohan** bagi Stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kompetensi SDM konstruksi.
- Memperluas **akses pelatihan dan sertifikasi kompetensi** tenaga kerja konstruksi di kantong-kantong tenaga kerja konstruksi dan pusat-pusat lokasi proyek yang belum terjangkau oleh lembaga/institusi/balai pelatihan konstruksi (berada di *remote area*).
- Memberdayakan **masyarakat konstruksi secara mandiri** untuk melaksanakan/ mengikuti pelatihan kompetensi keterampilan konstruksi
- Melakukan **percepatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi** tenaga kerja konstruksi terampil Indonesia.
- Meningkatkan **kualitas, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi** tenaga kerja konstruksi nasional.
- Memberikan **kemudahan bagi masyarakat** dalam mengakses kegiatan dan informasi bidang jasa konstruksi terutama pelaksanaan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun fungsi MTU antara lain:

- Sebagai sarana dan prasarana **pelatihan tenaga kerja konstruksi** dengan cara pelaksanaan bimbingan teknis, uji sertifikasi, dan *on the job training*.
- Sebagai sarana dan prasarana dalam **penyebar luasan informasi** tentang tenaga kerja konstruksi, penyelenggaraan pelatihan, kegiatan bimbingan teknis, dan uji sertifikasi, serta pendataan calon peserta melalui kegiatan pameran, termasuk informasi mengenai kegiatan pekerjaan bidang konstruksi terutama pelaksanaan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Sebagai sarana dan prasarana dalam kegiatan **Sosialisasi** dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan kepada masyarakat bidang jasa konstruksi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hingga pada TA 2016, telah diserahkan *Mobile Training Unit* (MTU) kepada 20 Provinsi di Indonesia dan 14 Provinsi sisanya sedang dalam proses serah terima. MTU tersebut dikelola oleh Balai Jasa



Gambar 12. Kegiatan MTU di Daerah

Konstruksi Wilayah/Sekretaris Daerah/Dinas PU Provinsi untuk dapat digunakan oleh Pemda Kabupaten/Kota, Asosiasi, Lembaga, Perguruan Tinggi dan SMK di daerah tersebut. Diharapkan, dengan adanya pelatihan menggunakan MTU dapat meningkatkan jumlah pekerja konstruksi kompeten dan tersertifikasi yang memiliki pengetahuan tentang bidang jasa konstruksi. Selain itu, diharapkan dengan adanya MTU di setiap provinsi, sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses kegiatan dan informasi bidang jasa konstruksi.

Capaian kegiatan Uji dan Pelatihan MTU yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dapat dilihat pada diagram berikut:



Sumber: Balai Material dan Peralatan Konstruksi (2016)

Diagram 10. Capaian Kegiatan Uji dan Pelatihan MTU

Sedangkan, hasil dari kegiatan Training of Trainer MTU (TOT MTU) hingga tahun 2016 dapat dilihat pada diagram berikut:



Sumber: Balai Material dan Peralatan Konstruksi (2016)

Diagram 11. Capaian Training of Trainer MTU

Capaian tersebut telah berkontribusi dalam meningkatkan jumlah tenaga kerja terlatih dan tersertifikasi di seluruh Indonesia.

b) Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Nasional



Gambar 13. Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Nasional

Pelaksanaan lomba pekerja konstruksi merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada para pekerja konstruksi dan mendorong terciptanya kondisi persaingan yang sehat antar para tenaga kerja konstruksi dalam meningkatkan kompetensi kerja sesuai bidang kerja yang digelutinya. Lomba ini

diikuti oleh wakil-wakil pekerja konstruksi dari berbagai wilayah di Indonesia dengan melibatkan para stakeholder terkait pembinaan konstruksi. Kegiatan ini, diharapkan dapat mendukung perkuatan institusi daerah dalam menyelenggarakan pembinaan kompetensi SDM jasa konstruksi dan mengembangkan pola pembinaan SDM kerja konstruksi di daerah. Adapun tujuan dari kegiatan ini agar dapat meningkatkan jejaring kerja (networking) antara para pelaku konstruksi dan pembinanya di tingkat kota/kabupaten, provinsi, dan nasional sehingga dapat meningkatkan peran daerah dalam menyelenggarakan pembinaan SDM konstruksi.

Pada Tahun 2016, Lomba Pekerja Konstruksi memiliki tema “Mewujudkan Tenaga Kerja Konstruksi yang Kompeten dan Produktif dalam rangka Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia”. Adapun bidang pelaksanaan lombanya terdiri dari 11 bidang lomba antara lain: pemasangan batu, pemasangan ubin, pemasangan *scaffolding*, pemasangan instalasi listrik, pembesian, plambing, juru ukur, juru gambar, pelaksana lapangan pekerjaan jalan, pelaksana lapangan pekerjaan gedung, dan operator *excavator*. Total peserta lomba pada TA 2016 ini adalah sebanyak 423 orang yang berasal dari 34 Provinsi di Indonesia. Adapun pelaksanaan lomba sendiri adalah di Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan pada tanggal 7-9 November 2016. Kedepannya, diharapkan Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Nasional ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik dengan adanya kesiapan daerah untuk ikut berpartisipasi.

c) SERTIFIKASI MASSAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Sebagaimana diketahui bahwa target utama Kementerian PUPR 2015-2019 antara lain pembangunan 65 waduk, 1 juta hektar jaringan irigasi baru, rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi, pembangunan 1.000 km jalan tol, 2.650 km jalan arteri baru untuk konektivitas wilayah dan penyediaan infrastruktur permukiman. Oleh karena itu, Kementerian PUPR membutuhkan jumlah tenaga kerja konstruksi dalam jumlah yang besar, sehingga penyiapan tenaga kerja konstruksi yang terlatih, terampil, profesional dan bersertifikat adalah mutlak diperlukan. Untuk itulah Ditjen Bina Konstruksi kembali melaksanakan sertifikasi massal di beberapa daerah di Indonesia. Hasil dari sertifikasi massal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 46. Capaian Kegiatan Sertifikasi Massal

Data Sertifikasi Masal	Jumlah Peserta	Jumlah Tersertifikasi
Balai Jasa Konstruksi Palembang	1000	1000
Balai Jasa Konstruksi Jakarta	3922	3809
Balai Jasa Konstruksi Surabaya	1095	1060
Balai Jasa Konstruksi Banjarmasin	1228	1104
Balai Jasa Konstruksi Makassar	1351	1351
TOTAL	8498	7226

Sumber: Balai-Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (2016)

Kegiatan sertifikasi massal dilaksanakan di lokasi proyek dengan pelaksanaan berupa pelatihan tukang bangunan umum dan fasilitasi uji kompetensi.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada awal tahun anggaran mendapat alokasi sebesar Rp681.970.000.000,- dan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN TA 2016 berkurang Rp48,4M sehingga pagu APBN-P menjadi Rp633.570.000.000,-. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2016 terbit Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2016 yang membuat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan penghematan (*self-blocking*) sebesar Rp 12 M dalam pagu akhir TA 2016. Sehingga, pagu efektif Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebesar Rp 627.550.000.000,-. Rincian alokasi anggaran masing-masing unit kerja beserta realisasi keuangannya tertera pada tabel berikut:

Tabel 47. Alokasi Anggaran dan Realisasi pada Unit Kerja di lingkungan DJBK TA 2016

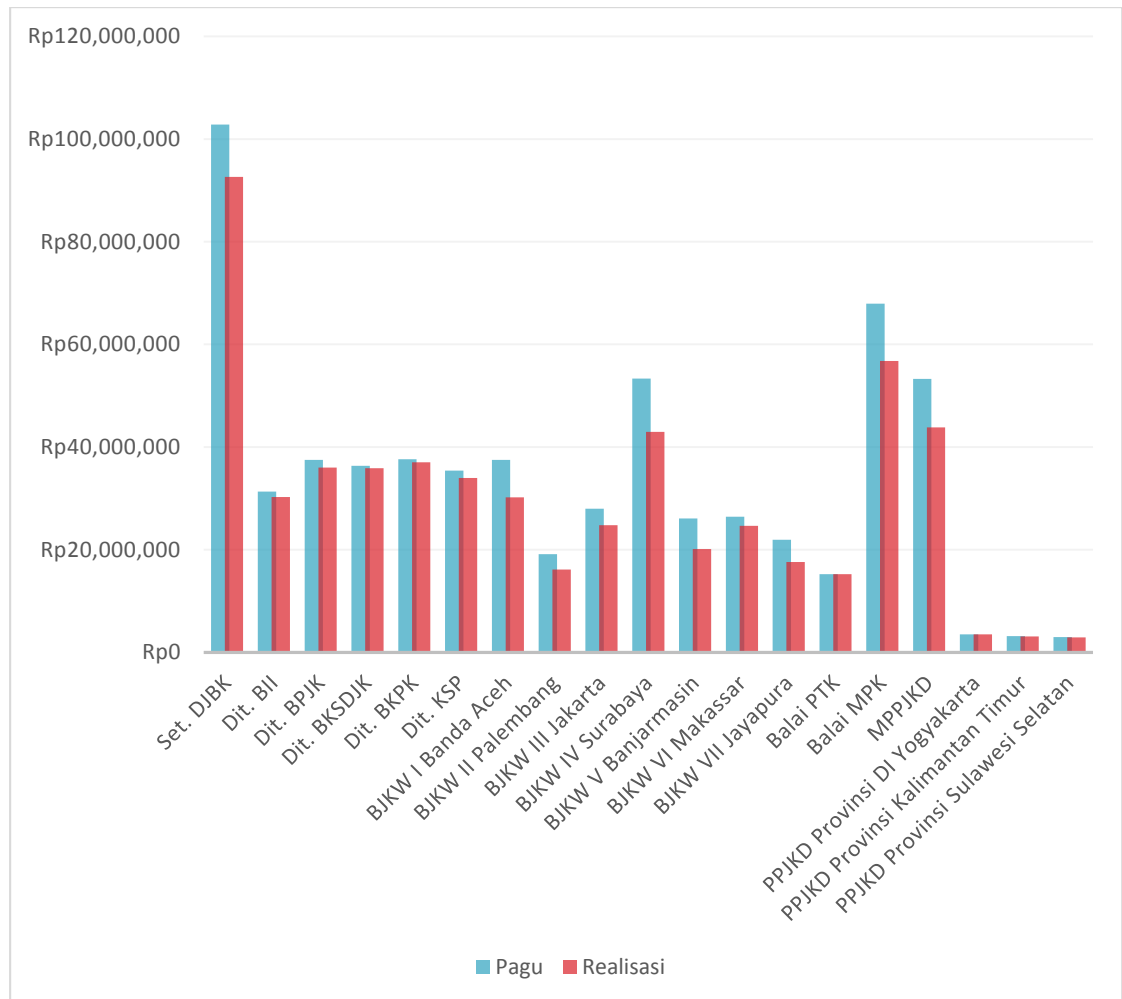
NO	UNIT KERJA ESELON II	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	%
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	102.819.128	92.638.456	90,10
2	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	31.330.563	30.272.191	96,62
3	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	37.497.322	36.011.246	96,04
4	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	36.353.995	35.882.936	98,70
5	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	37.618.269	37.045.907	98,48
6	Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	35.421.471	33.967.217	95,89
7	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh	37.498.285	30.193.571	80,52
8	Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang	19.140.992	16.148.605	84,37
9	Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta	27.977.088	24.765.858	88,52
10	Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya	53.331.061	42.959.254	80,55
11	Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin	26.071.854	20.139.934	77,25
12	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar	26.427.644	24.646.350	93,26
13	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura	21.941.737	17.611.073	80,26
14	Balai Penerapan Teknologi Konstruksi	15.239.382	15.221.715	99,88
15	Balai Material dan Peralatan Konstruksi	67.937.266	58.776.980	86,52
16	Manajemen dan Pengendalian Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah	53.227.521	43.843.833	82,29

NO	UNIT KERJA ESELON II	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	%
17	Pelaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi DI Yogyakarta	3.495.289	3.494.179	99,97
18	Pelaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Kalimantan Timur	3.178.409	3.095.870	97,40
19	Pelaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	2.992.180	2.904.130	97,06
TOTAL		639.549.456	569.619.307	89,07

Sumber: e-monitoring.pu.go.id (Status Data 26 Januari 2017)

Pencapaian realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp569.619.307,- atau sekitar 89,07%. Pencapaian ini patut diapresiasi karena lebih besar daripada tahun 2015 yang hanya sebesar 80,86%. Selain itu, capaian fisik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada TA 2016 jika dilihat melalui e-monitoring.pu.go.id adalah sebesar 98,50% jauh lebih tinggi dari TA 2015 yang hanya sebesar 94,90%. **Selain itu, jika melihat terhadap pagu efektif, maka capaian keuangan dan fisik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi masing-masing adalah 90,76% dan 100%.** Hal ini merupakan hasil dari efisiensi dan efektivitas kinerja sehingga capaian tahun ini lebih baik daripada tahun 2015. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak 100% antara lain:

1. Pengefektifan anggaran di beberapa sektor membuat pemakaian anggaran tidak mencapai pagu yang sudah dianggarkan.
2. Keadaan Ditjen Bina Konstruksi yang baru mengalami perubahan dari bentuk sebelumnya yaitu Badan Pembinaan Konstruksi menyebabkan perlu penyesuaian kinerja dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.



Sumber: e-monitoring.pu.go.id (Status Data 26 Januari 2017)

Diagram 12. Alokasi Anggaran dan Realisasi pada Unit Kerja di lingkungan DJBK TA 2016

Jika dilihat berdasar kepada indikator *outcome* Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, maka alokasi anggaran dan realisasi pada setiap sasaran program adalah sebagai berikut:

Tabel 48. Alokasi Anggaran dan Realisasi Pada Setiap Sasaran Program DJBK TA 2016

NO	SASARAN PROGRAM	PAGU	REALISASI
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)
1	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	Rp58,978,683	Rp55,593,326
2	Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar	Rp45,825,117	Rp43,262,603
3	Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan administrasi kontrak	Rp65,145,442	Rp61,332,381
4	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	Rp423,775,097	Rp364,168,394
5	Meningkatnya utilitas produk unggulan	Rp45,825,117	Rp43,262,603
TOTAL		Rp639,549,456	Rp567,619,305

Sumber: e-monitoring.pu.go.id (Status Data 26 Januari 2017)

Pagu setiap sasaran program digunakan dalam pencapaian target program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada Tahun Anggaran 2016. Alokasi anggaran tersebut digunakan pada kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian target sasaran program pada setiap unit kerja yang berkaitan. Adapun persentase pagu terbesar adalah pada sasaran program keempat, yaitu Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten sebesar 66% dari total pagu keseluruhan. Hal inilah yang dijadikan sebagai dasar pembobotan pada pencapaian sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada sasaran mengenai Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional. Selain itu, peningkatan SDM yang berkompeten dianggap menjadi bekal dalam pencapaian outcome lainnya dalam rangka program pembinaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

4.4 EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

Sebagaimana diketahui dalam rincian data Sumber daya Manusia yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki total pegawai sebanyak 400 orang PNS dan 311 orang Non PNS yang tersebar dalam 6 Unit Eselon II dan beberapa balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dari total 711 sumber daya manusia yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tersebut terbagi pula menjadi beberapa eselon yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing.

Sejak awal periode pemerintahan 2014-2019, terdapat beberapa perubahan baik itu pada tingkat kementerian maupun di dalam lingkungan Direktorat Jenderal. Pada tingkat kementerian terjadi perubahan nomenklatur yaitu penggabungan dua kementerian menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan, pada awal tahun 2015 terjadi perubahan bentuk Badan Pembinaan Konstruksi menjadi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Pada tahun 2016, terjadi penambahan 1 unit eselon IV di setiap balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Terjadinya tiga hal diatas secara tidak langsung juga mempengaruhi dengan bertambah maupun berkurangnya sumber daya manusia di lingkungan Direktorat

Jenderal Bina Konstruksi, sedangkan dapat diketahui efektif dan efisiennya kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga dipengaruhi oleh jumlah sumber daya manusia yang ada. Dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup akan mampu mendukung tercapainya target kinerja kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Penambahan eselon IV pada setiap balai, artinya menambah 9 jabatan baru yang juga harus diisi dengan eselon IV dan staf-stafnya. Salah satu cara untuk bisa mengisi jabatan dan staf dalam susunan organisasi baru tersebut adalah dengan melakukan mutasi sumber daya manusia dari unit kerja yang sudah ada. Cara ini dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi agar mencapai pemerataan staf dan pejabat yang cukup di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Jika dilihat berdasarkan pagu, pada tahun 2014 Badan Pembinaan Konstruksi dengan total SDM sebanyak 383 orang memiliki pagu sebesar Rp333.499.791.000,-. Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki pagu sebesar Rp722.899.986.000,- dengan jumlah PNS sebanyak 407 orang. Sedangkan, pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki pagu sebesar Rp639,549,456 dengan jumlah PNS sebanyak 400 orang. Secara umum dapat dilihat, pada tahun 2014 satu orang pegawai sebanding dengan pagu Rp870.756.478,-, pada tahun 2015 satu orang pegawai sebanding dengan pagu Rp1.776.167.042,- dan pada tahun 2016 satu orang pegawai sebanding dengan pagu Rp1.598.874,-. Sehingga dapat dikatakan bahwa beban pagu setiap per orang meningkat sebesar 103% atau lebih dari dua kali lipat beban pagu dari tahun 2014 menuju tahun 2015. Hal ini adalah salah satu bentuk pengefektifan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pengefisienan tersebut harus dibarengi dengan kapasitas SDM yang meningkat serta strategi-strategi dalam bekerja agar lebih efektif dan efisien. Pada tahun 2015 dan 2016, perbandingan antara pegawai PNS dengan pagu tidak jauh berbeda. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pagu dan jumlah PNS dari tahun lalu.

BAB 6 PENUTUP

5.1 PERMASALAHAN

Permasalahan secara umum yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan di Tahun 2016 ini antara lain:

1. Peningkatan tugas dan anggaran tidak diikuti dengan sumber daya manusia yang ada, dimana SDM Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang ada masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya.
2. Kurang terkelolanya data dan informasi dikarenakan pengumpulan data masih belum kontinu dan banyak hasil kajian yang tidak menggunakan data dan informasi yang akurat.
3. Data dan informasi yang masih tersebar di masing-masing unit kerja belum diolah menjadi suatu informasi yang dapat dijadikan input kebijakan.
4. Terjadinya perubahan struktur organisasi menyebabkan berkurangnya SDM di tiap-tiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
5. Belum adanya timeline kerja sehingga terdapat beberapa kegiatan antar Direktorat yang bersinggungan waktunya.
6. Belum efektifnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap penerapan peraturan-peraturan terkait.
7. Belum adanya pedoman perencanaan dan penganggaran untuk balai dan pembinaan jasa konstruksi daerah.
8. Kurangnya pemahaman pada setiap poin yang ada dalam agenda Reformasi Birokrasi serta pelaksanaan budaya kerja yang belum maksimal.
9. Adanya revisi anggaran/pemotongan mempengaruhi keterlambatan dalam progres keuangan karena proses administrasi.

Adapun permasalahan pada masing-masing bidang pembinaan konstruksi antara lain:

A. Bidang Investasi Infrastruktur

1. Simpul KPBU baru terbentuk di akhir 2016, sehingga Direktorat Bina Investasi Infrastruktur sebagai Simpul KPBU dikenal masyarakat jasa konstruksi masih memerlukan waktu untuk disosialisasikan tugas dan fungsinya terutama kepada sektoral di Lingkungan DBII.

2. Pengesahan Permen Tentang Simpul KPBU masih dalam proses sehingga pelaksanaan fasilitasi KPBU di Lingkungan Kementerian PUPR masih terhambat.
3. Paradigma para pemangku kepentingan di Indonesia di sector konstruksi yang masih memandang bahwa pendanaan sector konstruksi berasal dari APBN/APBD.
4. Pembiayaan infrastruktur masih belum sesuai (terjadi mismatch) dengan karakteristik investasi infrastruktur. Aturan dalam dunia perbankan di Indonesia menerapkan proses pengembalian pinjaman pada rentang waktu \pm 5-10 tahun. Sedangkan tingkat pengembalian investasi infrastruktur memerlukan waktu yang lebih lama dengan rentang waktu \pm 15-20 tahun.
5. Proses pembebasan dan pembiayaan lahan yang memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar.
6. Manajemen risiko dan dukungan pemerintah terkait alokasi risiko dan skema penjaminan untuk Pembangunan infrastruktur masih belum sinkron.
7. Kesiapan Pembangunan terkait kegiatan persiapan Pembangunan dan studi kelayakan belum memadai.
8. Perencanaan persiapan proyek infrastruktur tidak melibatkan semua stakeholder terkait.
9. Pelaksanaan proyek yang buruk karena kurangnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang sedang dilaksanakan dan pengambilan keputusan yang tidak efektif terhadap proyek-proyek yang sedang terhambat (bottleneck).

B. Bidang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1. Rendahnya pengawasan konstruksi di lapangan, terutama K3 dan implementasinya serta masih terbatasnya petugas K3 di daerah.
2. Penegakan hukum yang tidak tegas terhadap tidak dijalankannya tertib pelaksanaan dan pemanfaatan.
3. Kesadaran stakeholders atas pembinaan masih rendah (Kegiatan pembinaan hanya dianggap sebagai kegiatan pelengkap, bukan sebagai kegiatan pokok).
4. Tenaga kerja konstruksi lepas diluar binaan BUJK masih sangat banyak.
5. Penyelenggaraan konstruksi yang tidak mengikuti peraturan yang seharusnya.
6. Masih lemahnya regulasi bidang Jasa Konstruksi yang ada.
7. Lemahnya penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam

melaksanakan pengembangan jasa konstruksi.

8. Lambatnya pemutakhiran sistem informasi dan buruknya dokumentasi (Database) mengenai implementasi mutu, K3, dll.
9. Kurangnya koordinasi antar K/L mengenai PBJ terutama dengan adanya regulasi oleh LKPP.

C. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

1. Terlambatnya peningkatan kapasitas produksi nasional dalam merespon kebutuhan pasar konstruksi menyebabkan peningkatan impor material dan peralatan konstruksi.
2. Banyaknya Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang mulai memasuki pasar konstruksi nasional.
3. Pemaketan nilai konstruksi dalam jumlah besar cenderung berklasifikasi terintegrasi dan mensyaratkan subkontraktor spesialis menggiring BUJK kualifikasi kecil untuk mengubah proses bisnis menjadi spesialis.

D. Bidang Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

1. Rendahnya dukungan kementerian lainnya, pemerintah daerah, asosiasi profesi dan para *stakeholder* lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi dan produktivitas konstruksi dengan pelatihan konstruksi bagi tenaga kerja.
2. Kurangnya koordinasi peningkatan kompetensi tenaga ahli dan terampil dengan *stakeholder* lain yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal peningkatan kompetensi.

E. Bidang Kerja Sama dan Pemberdayaan

1. Roadmap maupun bisnis proses inti pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran belum tersusun secara sistematis.
2. Identifikasi kebutuhan NSPK Kerja Sama dan Pemberdayaan belum difinalisasi.
3. Fungsi monitoring dan evaluasi kegiatan belum optimal sehingga mempengaruhi evaluasi masukan teknis untuk perencanaan keberlanjutan program dan anggaran.

4. Belum adanya sistem informasi/database terintegrasi antar Subdit wilayah;
5. Belum optimalnya pelaksanaan sistem manajemen mutu di lingkungan Direktorat Kerja sama dan Pemberdayaan.
6. Pelaksanaan kegiatan terfokus pada kegiatan link and match dunia pendidikan dan industri dalam rangka pencetakan asesor dan sertifikasi calon peserta didik dimana pembebanan anggaran terbatas.
7. Beberapa keberlanjutan program kegiatan kerja sama terhenti sementara dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga diperlukan evaluasi ruang lingkup kerja sama yang telah ada.
8. Miskomunikasi antar PARA PIHAK yang terlibat dalam kegiatan kerja sama dan pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan bersama.
9. Sulitnya mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pemberdayaan tenaga kerja konstruksi.
10. Inkonsistensi penerapan SMM pada pelaksanaan kegiatan pembinaan konstruksi baik di Balai, Satker maupun PPK Provinsi.
11. Rendahnya pemahaman pemda mengenai pentingnya kegiatan pembinaan konstruksi di wilayah kerjanya.
12. Kuantitas dan kualitas SDM pelaksana terhadap pembinaan konstruksi di daerah belum memenuhi kebutuhan di lapangan.

5.2 LANGKAH KE DEPAN

Adapun langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk perbaikan ditahun depan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman terhadap tuis yang baru, yang disebabkan perubahan organisasi dari badan menjadi direktorat jenderal.
2. Mengusulkan penambahan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
3. Membuat timeline yang berhubungan dengan perencanaan, penganggaran, serta evaluasi untuk dapat digunakan setiap tahunnya.
4. Mengoptimalkan koordinasi internal di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sehingga terjadi sinergi kegiatan antar direktorat dan memperkuat pencapaian *outcome* terkait pembinaan konstruksi.

5. Mensinergikan program dengan lingkungan eksternal baik dengan satminkal lain di Kementerian PUPR maupun dengan institusi pemerintah lainnya, serta masyarakat jasa konstruksi yang lebih luas.
6. Merekomendasikan review Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2015-2019 terkait target per tahun outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
7. Memperbaiki sistem data dan informasi agar data yang sudah terkumpul dapat terolah dan dijadikan informasi dalam pengambilan kebijakan.

Adapun langkah ke depan pada masing-masing bidang pembinaan konstruksi antara lain:

A. Bidang Investasi Infrastruktur

1. Pelaksanaan sosialisasi/workshop/diseminasi/bantek/pelatihan ke seluruh daerah tingkat provinsi terkait perubahan paradigm pendanaan infrastruktur dari APBN/APBD agar lebih mengutamakan investasi terlebih dahulu.
2. Adanya akselerasi penugasan BUMN untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan KPBU, sebagai contoh pembangunan trans sumatera.
3. Pengesahan permen tentang Simpul KPBU akan dikawal agar dapat lebih cepat disahkan sehingga fasilitasi KPBU di Lingkungan Kementerian PUPR dapat segera dilakukan.
4. Ditjen Bina Konstruksi melalui Direktorat Bina Investasi Infrastruktur akan lebih banyak menyusun pedoman terkait pelaksanaan investasi infrastruktur, yang tentunya akan memperhatikan tingkat urgensi dan tidak tumpang tindih dengan aturan-aturan yang ada.
5. Pelaksanaan *pra-feasibility study* untuk proyek-proyek KPBU yang akan dilakukan sehingga diharapkan nantinya dapat membantu para investor untuk mempercepat investasinya.
6. Lebih mengembangkan daftar potensi proyek KPBU, yang nantinya dapat disebarluaskan kepada para stakeholders.

B. Bidang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1. Optimalisasi koordinasi internal di lingkungan Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sehingga terjadi sinergi kegiatan antar

subdirektorat dan memperkuat pencapaian output dan outcome terkait pembinaan penyelenggaraan konstruksi.

2. Sinergi program dengan lingkungan eksternal baik dengan unit lain yang berada di lingkungan Kementerian PUPR maupun dengan institusi pemerintah terkait lainnya, serta masyarakat jasa konstruksi yang lebih luas (pihak swasta/asosiasi profesi) sehingga dapat dilakukan percepatan terhadap kegiatan pembinaan penyelenggaraan konstruksi, yang meliputi pengadaan barang/jasa, administrasi kontrak, sistem manajemen mutu, sistem keselamatan dan kesehatan kerja serta konstruksi berkelanjutan.
3. Pengawasan penerapan sistem manajemen mutu di lingkungan Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan mutu pelayanan, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih sistematis, dan upaya perbaikan dapat dilakukan secara terus menerus selama proses pelaksanaan kegiatan.
4. Penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi secara terpadu oleh seluruh sub-direktorat yang ada, dalam rangka peningkatan kompetensi seluruh personil Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam bidang penyelenggaraan jasa konstruksi, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi Indonesia menyongsong MEA 2017.

C. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait jasa konstruksi.
2. Meningkatkan kinerja Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi dengan lebih banyak melibatkan sumber daya internal pada kegiatan swakelola.
3. Melakukan *barrier* terhadap penggunaan material dan peralatan impor dengan mulai menerapkan komitmen TKDN pada penyelenggaraan jasa konstruksi.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dengan adanya momentum disahkannya UU Jasa Konstruksi dan pengukuhan pengurus LPJK 2016-2020.

5. Mendorong penerbitan Perda IUJK dan pelaksanaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) wajib ditindaklanjuti sebagai indikator pelaksanaan pelayanan pemerintah daerah kepada penyedia jasa konstruksi.
6. Melaksanakan tertib kerjasama antara BUJK Nasional dan BUJK JO untuk melibatkan subkontraktor BUJK Nasional spesialis serta memaksimalkan pemberdayaan tenaga kerja dan sumber daya dalam negeri.
7. Kehadiran BUJK Asing dijadikan stimulus alih teknologi dalam pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi nasional dengan cara kebijakan pengetatan alih teknologi asing ke penyedia jasa nasional.
8. Menyiapkan perangkat pembinaan pada BUJK Nasional spesialis untuk BUJK kualifikasi kecil.

D. Bidang Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

1. Peningkatan koordinasi dengan kementerian dari sektor lain, pemerintah daerah, asosiasi profesi dan *stakeholder* lainnya untuk memprioritaskan tingkat kompetensi tenaga ahli dan terampil dalam bidang jasa konstruksi.
2. Pensinergian pelatihan kompetensi dengan balai-balai dan lembaga sertifikasi terkait tenaga ahli dan tenaga terampil dalam bidang jasa konstruksi.

E. Bidang Kerja Sama dan Pemberdayaan

1. Melakukan sinergi serta segera menyusun roadmap dan bisnis proses inti pelaksanaan Kerja sama dan pemberdayaan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
2. Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi kegiatan secara terpadu.
3. Konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan mutu layanan.
4. Melakukan kaji ulang kebutuhan akan NSPK Kerja sama dan pemberdayaan.
5. Pendampingan pelaksanaan pembinaan konstruksi di wilayah kerja masing-masing secara langsung maupun melalui Balai-Balai.
6. Mendorong peran serta Balai dalam meningkatkan kesadaran Pemerintah-Pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan di wilayahnya.
7. Pemetaan kondisi eksisting dan kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM pelaksana pembinaan konstruksi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

**Dokumen Perjanjian
Kinerja (PK) Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi
Tahun 2016**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1) PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI			
1	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	1. Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	1,5%
2	Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar	1. Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi besar	9%
3	Meningkatnya tertib penyelenggaraan konstruksi	1. Persentase kenaikan tertib penyelenggaraan konstruksi	4%
4	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	1. Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	2%
5	Meningkatnya utilitas produk unggulan	1. Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan	1,5%

Program :

1. Pembinaan Konstruksi

Anggaran

Rp. 681.971.765,000

JAKARTA, **JANUARI 2016**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



M. BASUKI HADIMULJONO

**DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI**



YUSID TOYIB

LAMPIRAN 2 | Rencana Aksi

RENCANA AKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

A. Rencana Aksi Keuangan

Berikut adalah rencana aksi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada TA 2016:

No	Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Ribu)	Keuangan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					RN	RN	RN	RN
1	06	Program Pembinaan Konstruksi		681.971.765	9,26	37,64	71,08	100,00
1	2435	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi		148.251.605	9,10	32,91	69,28	100,00
1	034	Layanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi	4 Dokumen/Laporan	31.320.855	7,69	42,01	72,51	100,00
2	201	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	2 Laporan	183.17	4,01	16,61	55,92	100,00
3	994	Layanan Perkantoran	168 Bulan Layanan	71.014.090	9,59	27,26	61,53	100,00
4	996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	197 Unit	3.818.500	18,40	60,15	83,50	100,00
5	997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	109 Unit	32.369.990	11,26	32,27	80,69	100,00
6	998	Gedung/Bangunan	2316 M2	9.545.000	0,00	36,54	87,57	100,00
2	2436	Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi		50.631.538	20,58	52,33	85,78	100,00
7	026	Pengaturan Pembinaan Kelembagaan Jasa Konstruksi	5 Draft NSPK	12.419.686	24,50	60,52	91,95	100,00
8	027	Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Jasa Konstruksi	12 Profil	16.831.852	18,50	49,78	86,81	100,00
9	028	Pengaturan Pembinaan Sumber Daya Jasa Konstruksi	4 Draft NSPK	6.800.000	20,88	51,18	81,18	100,00
10	029	Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya Jasa Konstruksi	4 Profil	4.100.000	14,63	48,41	82,20	100,00
11	031	Layanan Manajemen	1 Dokumen/Laporan	6.692.476	24,06	52,38	80,71	100,00
12	201	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1 Laporan	94.074	15,00	55,00	85,00	100,00
13	994	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	3.205.000	19,31	49,31	79,31	100,00
14	996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	40 Unit	437.45	0,00	0,00	100,00	100,00
15	997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	10 Unit	51	0,00	0,00	100,00	100,00
3	2437	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi		55.179.380	8,23	29,62	63,75	100,00
16	031	Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	8 Draft NSPK	16.227.696	9,88	30,65	62,95	100,00
17	032	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Konstruksi	17 Profil	31.827.526	8,42	30,38	65,57	100,00
18	034	Layanan Manajemen	1 Dokumen/Laporan	4.173.358	3,05	21,11	58,05	100,00
19	201	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1 Laporan	50.8	18,60	37,20	55,81	100,00
20	994	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	2.400.000	5,00	25,00	60,00	100,00
21	996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	20 Unit	300	0,00	0,00	0,00	100,00

Lampiran 2. Rencana Aksi

No	Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Ribu)	Keuangan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					RN	RN	RN	RN
22	997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Unit	200	0,00	100,00	100,00	100,00
4	2438	Pembinaan Investasi Konstruksi		41.044.088	7,16	30,06	72,63	100,00
23	026	Pengaturan Pembinaan Investasi Infrastruktur	5 Draft NSPK	11.846.130	3,41	25,23	74,72	100,00
24	027	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko	13 Profil	23.518.518	7,64	31,29	72,42	100,00
25	029	Layanan Manajemen	1 Dokumen/Laporan	3.328.559	5,55	25,73	66,31	100,00
26	201	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1 Laporan	109.44	25,00	50,00	75,00	100,00
27	994	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	2.071.441	25,00	50,00	75,00	100,00
28	996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	15 Unit	170	12,08	32,48	50,18	100,00
5	2439	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi		46.427.238	5,91	42,67	83,70	100,00
29	031	Pengaturan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Kerja Konstruksi	31 Draft NSPK	21.033.566	0,27	41,23	82,25	100,00
30	032	Pemantauan dan Evaluasi Kompetensi dan Produktivitas Kerja Konstruksi	12 Profil	16.419.322	6,25	41,50	88,34	100,00
31	034	Layanan Manajemen	1 Dokumen/Laporan	4.819.974	18,33	46,25	79,14	100,00
32	201	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1 Laporan	82.7	0,00	38,81	55,20	100,00
33	994	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	3.571.676	21,75	49,29	75,43	100,00
34	996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Unit	200	0,00	50,00	100,00	100,00
35	997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Unit	300	0,00	66,67	100,00	100,00
6	5590	Kerjasama dan Pemberdayaan		340.437.916	8,49	38,93	68,81	100,00
36	010	Kerja Sama dan Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	176 Profil	314.012.276	8,30	40,07	70,76	100,00
37	013	Layanan Manajemen	14 Dokumen/Laporan	22.396.787	10,56	23,97	42,89	100,00
38	201	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	20 Laporan	532.361	20,33	40,01	60,09	100,00
39	994	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	2.496.492	10,00	35,74	66,49	100,00
40	996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	139 Unit	800	10,00	40,00	75,00	100,00
41	997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	83 Unit	200	10,00	40,00	75,00	100,00
	TOTAL			681.971.765	9,26	37,64	71,08	100,00

B. Rencana Aksi Fisik

Berikut adalah rencana aksi fisik di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada TA 2016:

No	Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Ribu)	Fisik			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					RN	RN	RN	RN
1	06	Program Pembinaan Konstruksi		681.971.765	9,27	37,80	71,85	100,00
1	2435	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi		148.251.605	8,81	33,03	69,91	100,00
1	034	Layanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi	4 Dokumen/Laporan	31.320.855	6,89	40,29	72,51	100,00
2	201	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	2 Laporan	183.17	4,01	16,61	55,92	100,00
3	994	Layanan Perkantoran	168 Bulan Layanan	71.014.090	9,67	27,49	61,85	100,00
4	996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	197 Unit	3.818.500	18,42	60,93	83,78	100,00
5	997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	109 Unit	32.369.990	10,41	32,34	82,99	100,00
6	998	Gedung/Bangunan	2316 M2	9.545.000	0,00	42,69	89,12	100,00
2	2436	Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi		50.631.538	20,72	52,48	86,08	100,00
7	026	Pengaturan Pembinaan Kelembagaan Jasa Konstruksi	5 Draft NSPK	12.419.686	25,06	60,52	92,03	100,00
8	027	Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Jasa Konstruksi	12 Profil	16.831.852	18,52	49,88	86,88	100,00
9	028	Pengaturan Pembinaan Sumber Daya Jasa Konstruksi	4 Draft NSPK	6.800.000	20,54	51,53	82,17	100,00
10	029	Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya Jasa Konstruksi	4 Profil	4.100.000	15,11	49,21	83,62	100,00
11	031	Layanan Manajemen	1 Dokumen/Laporan	6.692.476	24,06	52,38	80,71	100,00
12	201	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1 Laporan	94.074	15,00	55,00	85,00	100,00
13	994	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	3.205.000	19,31	49,31	79,31	100,00
14	996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	40 Unit	437.45	0,00	0,00	100,00	100,00
15	997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	10 Unit	51	0,00	0,00	100,00	100,00
3	2437	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi		55.179.380	8,23	29,63	63,76	100,00
16	031	Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	8 Draft NSPK	16.227.696	9,88	30,65	62,95	100,00
17	032	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Konstruksi	17 Profil	31.827.526	8,42	30,38	65,57	100,00
18	034	Layanan Manajemen	1 Dokumen/Laporan	4.173.358	3,05	21,11	58,05	100,00
19	201	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1 Laporan	50.8	19,88	44,88	72,44	100,00
20	994	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	2.400.000	5,00	25,00	60,00	100,00
21	996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	20 Unit	300	0,00	0,00	0,00	100,00
22	997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Unit	200	0,00	100,00	100,00	100,00
4	2438	Pembinaan Investasi Konstruksi		41.044.088	7,16	33,52	76,96	100,00
23	026	Pengaturan Pembinaan Investasi Infrastruktur	5 Draft NSPK	11.846.130	3,41	29,72	80,34	100,00
24	027	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko	13 Profil	23.518.518	7,64	34,46	76,38	100,00

Lampiran 2. Rencana Aksi

No	Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Ribu)	Fisik			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					RN	RN	RN	RN
25	029	Layanan Manajemen	1 Dokumen/Laporan	3.328.559	5,55	30,06	71,71	100,00
26	201	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1 Laporan	109.44	25,00	50,00	75,00	100,00
27	994	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	2.071.441	25,00	50,00	75,00	100,00
28	996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	15 Unit	170	12,08	32,48	50,18	100,00
5	2439	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi		46.427.238	5,91	42,67	83,70	100,00
29	031	Pengaturan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Kerja Konstruksi	31 Draft NSPK	21.033.566	0,27	41,23	82,25	100,00
30	032	Pemantauan dan Evaluasi Kompetensi dan Produktivitas Kerja Konstruksi	12 Profil	16.419.322	6,25	41,50	88,34	100,00
31	034	Layanan Manajemen	1 Dokumen/Laporan	4.819.974	18,33	46,26	79,14	100,00
32	201	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1 Laporan	82.7	0,00	38,81	55,20	100,00
33	994	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	3.571.676	21,75	49,29	75,44	100,00
34	996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Unit	200	0,00	50,00	100,00	100,00
35	997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Unit	300	0,00	66,67	100,00	100,00
6	5590	Kerjasama dan Pemberdayaan		340.437.916	8,61	38,75	69,49	100,00
36	010	Kerja Sama dan Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	176 Profil	314.012.276	8,43	39,87	71,49	100,00
37	013	Layanan Manajemen	14 Dokumen/Laporan	22.396.787	10,56	23,95	42,90	100,00
38	201	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	20 Laporan	532.361	20,72	40,77	60,24	100,00
39	994	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	2.496.492	10,00	35,74	66,49	100,00
40	996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	139 Unit	800	10,00	40,00	75,00	100,00
41	997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	83 Unit	200	10,00	40,00	75,00	100,00
	TOTAL			681.971.765	9,27	37,80	71,85	100,00

LAMPIRAN 3 | **Capaian Bulanan**

Lampiran 3. Capaian Bulanan

CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TRIWULAN I

No	Program/Kegiatan/Output	Target	Bulan Januari						Bulan Februari						Bulan Maret					
			Keuangan		Fisik		Kinerja	Keuangan		Fisik		Kinerja	Keuangan		Fisik		Kinerja			
			RN	RL	RN	RL		RN	RL	RN	RL		RN	RL	RN	RL		RN	RL	
1	Program Pembinaan Konstruksi		1.04	0.58	3.21	2.19	68.19	2.69	2.02	6.19	3.72	60.1	5.69	4.87	9.21	6.35	68.92			
1	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi		1.45	2.26	1.53	7.72	505.55	3.91	5.15	3.98	9.97	250.5	7.46	11.08	7.54	13.82	183.12			
1	Layanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi	4,00 Dokumen/Laporan	1.17	0	1.17	4.02	342.12	3.05	2.4	3.05	10.3	337.52	7.06	12.51	7.06	16.45	232.84			
2	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	2,00 Laporan	1.34	0	1.34	2.86	214.23	3.63	0	3.63	6.68	184.15	5.92	0	5.92	9.54	161.25			
3	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	2.39	4.5	2.53	13.26	523.54	5.79	9.2	5.93	14.98	252.64	9.26	14.72	9.43	17.71	187.93			
4	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	196,00 Unit	0.54	0	0.56	0	0	8.43	0	8.5	2.34	27.53	29.53	21.51	29.59	30.3	102.39			
5	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	127,00 Unit	0.02	0	0.03	0	0	0.95	0.23	0.94	0.23	24.83	3.48	3.28	3.47	3.05	88.1			
6	Gedung/Bangunan	2.316,00 M2	0	0	0	3.43	100	0	0	0	3.43	100	0	0	0	3.43	100			
2	Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi		0.6	0	0.6	0	0	2.62	1.59	2.62	1.86	71.05	6.86	4.05	6.77	4.42	65.27			
7	Pengaturan Pembinaan Kelembagaan Jasa Konstruksi	5,00 Draft NSPK	0.57	0	0.57	0	0	3.98	2.04	3.98	2.59	65.07	9.35	3.84	9.35	4.44	47.44			
8	Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Jasa Konstruksi	12,00 Profil	0.08	0	0.08	0	0	0.34	0.23	0.34	0	0	2.85	0.57	2.48	0.61	24.78			
9	Pengaturan Pembinaan Sumber Daya Jasa Konstruksi	4,00 Draft NSPK	1.06	0	1.06	0	0	4.5	3.82	4.82	4.5	93.45	8.03	7.5	8.34	8.22	98.56			
10	Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya Jasa Konstruksi	4,00 Profil	0.72	0	0.72	0	0	1.26	0.38	1.6	0.87	54.22	3.67	2.54	4.19	2.9	69.13			
11	Layanan Manajemen	1,00 Dokumen/Laporan	1.03	0	1.03	0	0	3.9	1.98	3.39	2.39	70.34	5.8	4.99	5.8	5.29	91.29			
12	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1,00 Laporan	3	0	3	0	0	7	0	7	5	71.43	15	13.9	15	15	100			
13	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	2.87	0	2.87	0	0	8.57	6.13	8.57	7.39	86.17	18.29	14.94	18.29	16.16	88.33			
14	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	40,00 Unit	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	75	75.68	75	75	100			
15	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	10,00 Unit	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-			

Lampiran 3. Capaian Bulanan

No	Program/Kegiatan/Output	Target	Bulan Januari						Bulan Februari						Bulan Maret						
			Keuangan		Fisik		Kinerja	Keuangan		Fisik		Kinerja	Keuangan		Fisik		Kinerja	Keuangan		Fisik	
			RN	RL	RN	RL		RN	RL	RN	RL		RN	RL	RN	RL		RN	RL	RN	RL
3	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi		0.3	0	0.28	0	0	0	1.44	1.86	1.44	2.02	140.26	3.39	6	3.43	6.31	183.73			
16	Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	8,00 Draft NSPK	0.91	0	0.83	0	0	0	2.88	0.89	2.88	1.03	35.85	4.26	4.51	4.26	5.08	119.36			
17	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Konstruksi	17,00 Profil	0	0	0	0	0	0	0.53	2.32	0.53	2.55	480.76	2.78	4.05	2.85	4.35	152.47			
18	Layanan Manajemen	1,00 Dokumen/Laporan	0	0	0	0	0	0	1.27	1.05	1.27	0.95	74.77	3.18	19.28	3.18	18.64	586.2			
19	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1,00 Laporan	6.2	0	6.2	0	0	0	12.4	0	12.92	0	0	18.6	0	19.88	28.6	143.86			
20	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	0	0	0	0	0	2	5.26	2	5.26	2	262.83	5	13.47	5	13.47	269.38			
21	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	20,00 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	9.34	0	8	100			
22	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1,00 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-			
4	Pembinaan Investasi Konstruksi		1.06	0	1.06	0	0	0	3.49	1.8	3.49	2.83	81.11	6.55	3.8	6.55	4.21	64.32			
23	Pengaturan Pembinaan Investasi Infrastruktur	5,00 Draft NSPK	0.44	0	0.44	0	0	0	2.06	1.29	2.05	1.89	91.87	4.23	3.51	4.23	3.14	74.36			
24	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko	11,00 Profil	0.55	0	0.55	0	0	0	2.57	1.73	2.57	2.83	109.9	5.29	3.13	5.29	3.98	75.2			
25	Layanan Manajemen	1,00 Dokumen/Laporan	0.86	0	0.86	0	0	0	4.03	2.12	4.02	4.05	100.58	8.28	3.19	8.28	4.27	51.62			
26	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1,00 Laporan	8.33	0	8.33	0	0	0	16.67	0	16.67	0	0	25	0	25	0	0			
27	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	8.33	0	8.33	0	0	0	16.67	4.58	16.67	5.81	34.84	25	12.17	25	11.71	46.82			
28	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	15,00 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-			
5	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi		0.56	0.35	0.56	0.35	62.87	1.67	1.1	1.67	1.1	1.1	65.96	2.82	2.4	2.93	2.4	81.91			
29	Pengaturan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Kerja Konstruksi	31,00 Draft NSPK	0	0	0	0	-	0	0.05	0.05	0	0.05	100	0.2	0.37	0.2	0.37	187.07			
30	Pemantauan dan Evaluasi Kompetensi dan Produktivitas Kerja Konstruksi	12,00 Profil	0.58	0	0.58	0	0	2.04	1.49	2.04	1.49	73.11	3.79	1.88	4.14	1.88	45.26				
31	Layanan Manajemen	1,00	0	0.03	0	0.03	100	2.59	0.35	2.59	0.35	13.54	3.56	2.98	3.56	2.97	83.46				

Lampiran 3. Capaian Bulanan

CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TRIWULAN II

No	Program/Kegiatan/Output	Target	Bulan April						Bulan Mei						Bulan Juni					
			Keuangan		Fisik		Kinerja	Keuangan		Fisik		Kinerja	Keuangan		Fisik		Kinerja			
			RN	RL	RN	RL		RN	RL	RN	RL		RN	RL	RN	RL		RN	RL	
1	Program Pembinaan Konstruksi		10.46	9.41	13.76	11.27	81.91	17.94	16.43	21.85	19.22	87.93	25.86	25.03	27.07	28.16	104,04			
1	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi		11.79	18.17	11.85	20.99	177.15	20.14	24.06	20.26	29.07	143.47	27.57	37.38	27.79	39.85	143,41			
1	Layanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi	4,00 Dokumen/Laporan	13.18	19.76	13.18	23.03	174.68	24.79	27.38	24.79	29.4	118.62	36.06	35.35	36.06	38.83	107,68			
2	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	2,00 Laporan	11.07	1.15	11.07	13.55	122.41	25.76	14.69	25.76	15.46	60	35.69	18.07	35.69	18,32	51,34			
3	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	15	24.55	15.07	28.79	191.1	26.48	32.69	26.63	34.93	131.16	35.31	47.19	35.59	49.81	139,95			
4	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	196,00 Unit	32.73	36.27	32.82	36.44	111.04	33.64	42.04	33.71	42.15	125.02	41.89	43.51	41.95	43.61	103,97			
5	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	127,00 Unit	3.69	3.76	3.67	3.53	96.27	4.13	4.33	4.1	19.07	464.69	4.60	20.94	4.60	20.75	451,42			
6	Gedung/Bangunan	2.316,00 M2	1.54	4.21	1.94	3.43	176.69	3.4	4.21	4.19	8.37	199.82	10.40	18.66	11.59	24.91	214,88			
2	Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi		10.19	6.01	10.08	7.06	70.02	17.58	12.93	17.37	13.65	78.58	27.56	16.75	25.92	21.43	82,68			
7	Pengaturan Pembinaan Kelembagaan Jasa Konstruksi	5,00 Draft NSPK	12.21	5.96	12.21	6.88	56.35	22.94	17.03	23.08	17.88	77.47	34.87	22.14	29.81	25.09	84,15			
8	Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Jasa Konstruksi	12,00 Profil	4.49	1.08	3.99	1.13	28.28	7.91	2.28	7.29	2.43	33.41	12.31	4.24	11.79	4.28	36,34			
9	Pengaturan Pembinaan Sumber Daya Jasa Konstruksi	4,00 Draft NSPK	12.85	9.95	12.85	11.87	92.41	23.32	21.05	23.32	22.13	94.91	43.20	26.69	42.62	42.97	100,83			
10	Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya Jasa Konstruksi	4,00 Profil	8.21	6.63	8.56	7.25	84.65	19.08	16.54	19.08	17.04	89.27	34.71	20.03	35.09	33.84	96,42			
11	Layanan Manajemen	1,00 Dokumen/Laporan	11.01	6.72	11.77	10.69	90.83	19.1	18.02	19.1	18.82	98.56	33.99	22.87	33.99	33.63	98,92			
12	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1,00 Laporan	23	20.86	23	20	86.96	30	27.81	30	25	83.33	40.00	34.76	40.00	35.00	87,50			
13	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	28.18	23.33	28.11	26.03	92.58	37.9	33.55	37.94	36.88	97.22	46.88	40.30	46.88	45.43	96,90			
14	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	40,00 Unit	77	75.68	77	77	100	80	75.68	80	80	100	82.00	75.68	82.00	82.00	100,00			
15	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	10,00 Unit	75	71.11	75	72	96	100	95.92	100	100	100	100.00	95.92	100.00	100.00	100,00			
3	Pembinaan Penyelenggaraan		7.31	10.01	7.55	10.7	141.58	14.12	17.22	13.84	18.11	130.93	22.06	29.89	22.13	32.22	145,64			

Lampiran 3. Capaian Bulanan

No	Program/Kegiatan/Output	Target	Bulan April						Bulan Mei						Bulan Juni					
			Keuangan		Fisik		Kinerja	Keuangan		Fisik		Kinerja	Keuangan		Fisik		Kinerja			
			RN	RL	RN	RL		RN	RL	RN	RL		RN	RL	RN	RL		RN	RL	
31	Layanan Manajemen	1,00 Dokumen/Laporan	8.41	4.04	8.41	4.04	48.01	16.18	10.24	16.18	16.81	103.87	23.09	24.56	23.09	24.50	106,11			
32	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1,00 Laporan	16.38	9.25	16.38	9.25	56.47	20.01	12.33	20.01	12.33	61.64	32.77	27.38	32.77	27.38	83,56			
33	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	17.28	24.23	17.23	24.23	140.64	22.59	31.8	22.53	31.8	141.13	28.96	41.50	28.90	41.50	143,62			
34	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1,00 Unit	5	2.68	5	2.68	53.57	5	2.68	5	2.68	53.57	5,00	2,68	5,00	2,68	53,57			
35	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1,00 Unit	1.67	14.29	1.67	14.29	855.41	1.67	14.29	1.67	14.29	855.41	16,67	14,29	16,67	14,29	85,69			
6	Kerjasama dan Pemberdayaan		10.44	6.46	16.83	8.57	50.95	17.46	12.5	24.64	15.12	61.35	0	19,83	27,83	23,26	83,56			
36	Kerja Sama dan Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	67,00 Profil	10.66	6.35	17.52	8.57	48.94	17.85	12.21	25.53	14.84	58.15	25,99	19,72	28,74	23,34	81,22			
37	Layanan Manajemen	7,00 Dokumen/Laporan	7.14	7.22	7.27	8.34	114.7	11.17	13.91	11.32	16.86	148.87	15,99	17,66	15,65	20,20	129,08			
38	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	11,00 Laporan	23.97	15.65	24.9	13.71	55.08	30.73	22.05	31.2	18.3	58.64	37,41	31,70	38,36	22,89	59,67			
39	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	11	13.07	11	13.07	118.83	26	35.05	26	35.05	134.81	30,00	41,68	30,00	41,68	138,94			
40	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	139,00 Unit	15	0	15	0	0	25	0	25	0	0	40,00	47,01	40,00	27,68	69,20			
41	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	83,00 Unit	15	0	15	0	0	25	0	25	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00			
			10.46	9.41	13.76	11.27	81.91	17.94	16.43	21.85	19.22	87.93	25.86	25.03	27.07	28.16	104.04			

Lampiran 3. Capaian Bulanan

CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TRIWULAN III

No	Program/Kegiatan/Output	Target	Bulan Juli						Bulan Agustus						Bulan September					
			Keuangan		Fisik		Kinerja	Keuangan		Fisik		Kinerja	Keuangan		Fisik		Kinerja			
			RN	RL	RN	RL		RN	RL	RN	RL		RN	RL	RN	RL		RN	RL	
1	Program Pembinaan Konstruksi		36,82	29,19	39,19	35,15	89,71	47,92	37,33	49,94	46,13	92,36	59,73	47,23	61,51	55,83	90,78			
1	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi		40,71	46,32	41,65	49,60	119,09	49,90	53,25	50,66	59,99	118,41	60,71	61,12	61,73	64,91	105,16			
1	Layanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi	4,00 Dokumen/Laporan	51,03	38,97	51,03	45,38	88,94	61,64	46,57	61,64	51,44	83,44	72,41	54,52	72,41	59,15	81,69			
2	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	2,00 Laporan	50,38	44,38	50,38	45,04	89,39	60,31	45,53	60,31	46,18	76,58	70,23	52,30	70,23	52,86	75,27			
3	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	47,52	53,26	47,85	55,55	116,08	56,41	62,57	56,94	65,50	115,04	66,36	68,28	66,99	71,35	106,52			
4	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	196,00 Unit	45,14	45,19	45,21	43,61	96,47	49,79	57,16	49,88	57,58	115,45	53,53	57,16	53,59	57,58	107,45			
5	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	127,00 Unit	20,30	44,12	23,78	46,33	194,80	30,69	46,30	32,79	61,49	187,51	38,74	59,47	41,92	63,00	150,29			
6	Gedung/Bangunan	2.316,00 M2	19,88	22,18	20,58	26,97	131,08	24,52	22,18	25,39	37,76	148,71	54,00	32,29	54,53	39,07	71,64			
2	Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi		46,11	22,37	49,49	36,46	73,68	56,64	28,96	58,55	44,36	75,76	70,39	46,29	73,71	57,84	78,46			
7	Pengaturan Pembinaan Kelembagaan Jasa Konstruksi	5,00 Draft NSPK	51,15	24,95	50,59	43,30	85,59	62,60	31,62	58,01	53,38	92,02	78,10	53,45	78,19	74,86	95,75			
8	Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Jasa Konstruksi	12,00 Profil	27,89	7,72	37,02	11,09	29,97	41,19	14,56	49,62	18,67	37,63	57,42	26,97	65,95	30,41	46,10			
9	Pengaturan Pembinaan Sumber Daya Jasa Konstruksi	4,00 Draft NSPK	72,23	42,46	70,28	69,64	99,10	78,91	43,79	75,98	75,04	98,76	90,79	71,13	87,86	86,69	98,66			
10	Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya Jasa Konstruksi	4,00 Profil	62,82	32,85	62,82	60,98	97,08	67,86	49,73	67,86	66,03	97,29	83,93	63,37	84,89	83,06	97,84			
11	Layanan Manajemen	1,00 Dokumen/Laporan	61,51	32,69	61,51	59,79	97,20	66,94	33,38	66,94	65,22	97,43	70,38	58,94	69,92	68,20	97,54			
12	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1,00 Laporan	45,00	41,71	45,00	45,00	100,00	50,00	48,66	50,00	50,00	100,00	60,00	60,40	60,00	60,00	100,00			
13	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	55,27	42,04	56,16	52,32	93,17	64,31	57,68	65,51	64,85	98,99	71,99	60,97	74,69	70,95	94,99			
14	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	40,00 Unit	85,00	75,68	85,00	85,00	100,00	87,00	75,68	87,00	87,00	100,00	90,00	75,68	90,00	90,00	100,00			
15	Peralatan dan Fasilitas	10,00 Unit	100,00	95,92	100,00	100,00	100,00	100,00	95,92	100,00	100,00	100,00	100,00	95,92	100,00	100,00	100,00			

Lampiran 3. Capaian Bulanan

No	Program/Kegiatan/Output	Target	Bulan Juli						Bulan Agustus						Bulan September								
			Keuangan		Fisik		Kinerja	RN	RL	Keuangan		Fisik		Kinerja	RN	RL	Keuangan		Fisik		Kinerja	RN	RL
			RN	RL	RN	RL				RN	RL	RN	RL				RN	RL	RN	RL			
	Perkantoran																						
3	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi		33,17	32,71	33,31	35,23	105,75	48,11	39,29	48,24	55,61	115,27	63,69	48,14	64,40						63,31	64,40	98,30
16	Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	8,00 Draft NSPK	42,02	31,61	41,78	34,00	81,39	56,79	38,49	56,55	60,76	107,44	74,57	47,11	74,80						73,77	74,80	98,62
17	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Konstruksi	17,00 Profil	27,83	31,60	28,23	34,76	123,14	43,68	37,75	44,11	49,83	112,96	57,90	46,83	59,08						55,94	59,08	94,68
18	Layanan Manajemen	1,00 Dokumen/Laporan	29,58	38,72	29,58	38,64	130,63	41,40	48,03	41,40	64,64	156,14	56,40	54,67	56,40						67,40	56,40	119,51
19	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1,00 Laporan	43,41	4,92	53,64	31,37	58,48	49,61	4,92	63,68	75,00	117,77	55,81	7,87	72,44						75,00	72,44	103,53
20	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	35,00	38,63	35,00	38,63	110,36	50,00	41,92	45,00	65,00	144,44	60,00	47,92	60,00						65,00	60,00	108,33
21	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	20,00 Unit	0,00	14,60	0,00	13,00	100,00	0,00	25,95	40,00	33,00	82,50	90,00	96,69	90,00						33,00	90,00	36,67
22	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1,00 Unit	100,00	84,83	100,00	99,25	99,25	100,00	97,86	100,00	100,00	100,00	100,00	97,86	100,00						100,00	100,00	100,00
4	Pembinaan Investasi Konstruksi		40,64	31,12	47,31	49,32	104,25	56,72	53,68	64,50	63,16	97,93	71,48	55,90	74,26						70,55	74,26	95,00
23	Pengaturan Pembinaan Investasi Infrastruktur	5,00 Draft NSPK	35,95	33,98	49,45	54,20	109,61	53,30	53,47	69,05	70,77	102,49	71,32	53,71	76,94						77,14	76,94	100,26
24	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko	11,00 Profil	42,01	28,23	45,57	45,03	98,81	59,36	56,10	63,51	58,90	92,74	73,76	59,45	75,24						68,14	75,24	90,56
25	Layanan Manajemen	1,00 Dokumen/Laporan	37,61	26,17	45,16	57,17	126,60	48,97	41,31	57,78	67,73	117,23	59,56	42,71	62,71						71,36	62,71	113,80
26	Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	1,00 Laporan	58,33	34,97	58,33	55,00	94,29	66,67	34,97	66,67	65,00	97,50	75,00	34,97	75,00						75,00	75,00	100,00
27	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	58,33	51,70	58,33	53,99	92,56	66,67	58,61	66,67	61,01	91,51	75,00	62,22	75,00						63,91	75,00	85,22
28	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	15,00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	25,00	0,00	25,00						0,00	25,00	0,00
5	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi		28,11	23,26	28,35	24,24	85,49	49,60	26,79	49,92	28,13	56,34	61,57	35,94	61,89						38,30	61,89	61,87
29	Pengaturan Pembinaan	31,00 Draft NSPK	26,14	21,59	26,14	21,88	83,72	53,36	25,11	53,44	26,31	49,24	67,28	36,23	67,28						36,95	67,28	54,92

LAMPIRAN 4

**Hasil Review LaKIP Tahun
2015 Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi oleh
Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan
Umum**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pulitimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: (021) 7251439 Fax: (021) 7387792

Nomor
Lampiran
Perihal

: KU.05.09-15/566
:
: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
Tahun Anggaran 2015

Jakarta, 19 Maret 2016

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2015 dengan uraian sebagai berikut :

1. Evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/IJ/2016 tanggal 12 Februari 2016 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 251/SPT/SET.ITJEN/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan :
 - a. Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
 - b. Menilai pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
 - c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.
 - d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya.
 - e. Memberikan informasi kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
 - f. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
2. Fokus Evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (*output*) dan evaluasi atas hasil (*outcome*), sedangkan cakupan evaluasi meliputi :

No	Komponen	Sub-Komponen
1	Perencanaan Kinerja	a. Rencana Strategis Pemenuhan renstra, kualitas renstra, implementasi renstra b. Rencana Kinerja Tahunan (pemenuhan RKT, kualitas RKT, dan implementasi RKT) c. Penetapan Kinerja (pemenuhan PK, kualitas PK, dan implementasi PK)

Lampiran 4. Hasil Review LaKIP Tahun 2015 Ditjen Bina Konstruksi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU

No	Komponen	Sub Komponen
2	Pengukuran Kinerja	a. Pemenuhan Pengukuran b. Kualitas Pengukuran c. Implementasi Pengukuran
3	Pelaporan Kinerja	a. Pemenuhan Pelaporan b. Penyajian Informasi Kinerja c. Pemanfaatan Informasi Kinerja
4	Evaluasi Kinerja	a. Pemenuhan Evaluasi b. Kualitas Evaluasi c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi
5	Capaian Kinerja	a. Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) b. Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) c. Kinerja lainnya

Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP, maka implementasi atas SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2015 dapat dikategorikan **BB (Sangat Baik)**, akuntabilitasnya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kerja, dan perlu sedikit perubahan dengan nilai angka **78,87 %** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	24,42 %
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	17,59 %
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	11,29 %
4.	Evaluasi Kinerja	10 %	0 %
5.	Capaian Kinerja	20 %	17,69 %
	Jumlah	100 %	78,87 %

Terhadap kelemahan yang masih ada direkomendasi kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI
A. Perencanaan Kinerja	<p>a. Melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja "Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi" menjadi dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan dan parameternya.</p> <p>b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil monitoring Target Jangka Menengah.</p>

Lampiran 4. Hasil Review LaKIP Tahun 2015 Ditjen Bina Konstruksi
oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU

KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. Melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja "Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi" sehingga menjadi dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan dan parameternya termasuk indikator dalam perbaikan Perencanaan Kinerja Tahunan.</p> <p>d. Menerapkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> pada monitoring rencana kinerja dan memasukkan hal terkait dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan pada Pemanfaatan Rencana Aksi atas kinerja.</p>
B. Pengukuran Kinerja	<p>a. Menyusun pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang <i>up to date</i> dan jelas jika terjadi kesalahan data, menyediakan akses data bagi pihak yang berkepentingan, serta membuat jadwal waktu pengiriman data.</p> <p>b. Melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja "Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi" sehingga menjadi dapat diukur dan memperbaiki metode pengumpulan data kinerja berdasarkan mekanisme yang memadai atau terstruktur.</p> <p>c. Menggunakan Indikator Kinerja Sasaran sebagai alat ukur tercapainya <i>outcome</i> atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA).</p> <p>d. Menggunakan capaian Indikator Kinerja Sasaran sebagai dasar promosi atau kenaikan/penurunan peringkat, dasar insentif atau disinentif terkait dengan <i>reward & punishment</i>.</p> <p>e. Mendokumentasikan dan memonitoring target kinerja secara terencana, terjadwal dan dilengkapi SOP atau mekanisme yang jelas.</p>
C. Pelaporan Kinerja	<p>a. Menjadi perhatian agar dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun berikutnya memuat penjelasan alur mulai dari input-proses-output dan <i>outcome</i>, menyajikan perbandingan data kinerja mengenai realisasi atau capaian organisasi/Instansi sejenis, serta menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.</p>

Lampiran 4. Hasil Review LaKIP Tahun 2015 Ditjen Bina Konstruksi
oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU

KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI
	b. Menjadikan informasi dalam Laporan Kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan (perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun); perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan; perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,



Dr. Rildo Ananda Anwar, SH, MH
NIP. 195804171984031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Bapak Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
4. Sekretaris Itjen Kementerian PUPR;
5. Inspektur IV Itjen Kementerian PUPR;
6. Inspektur V Itjen Kementerian PUPR.

LAMPIRAN 5

**Surat Penyesuaian
Perjanjian Kinerja Eselon I
TA 2016 Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 72797848 Faksimili (021) 7221782

Nomor : UM.0111-DK/35
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 18 Februari 2016

Kepada Yth.
Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Di Jakarta

Perihal : Penyesuaian Perjanjian Kinerja Eselon I TA 2016 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Nomor UM.01.11-Sr/09 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, dengan hormat kami sampaikan bahwa menimbang DIPA Tahun Anggaran 2016 yang tidak sesuai dengan Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi TA 2015-2019, maka diperlukan penyesuaian terhadap perjanjian kinerja Eselon I TA 2016 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagaimana terlampir.

Sebagai Informasi penyesuaian ini tidak mengubah target Renstra yang harus dicapai pada tahun 2016. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi



Ir. Yusid Toyib, M. Eng. Sc.
NIP. 195708311966031003

Lampiran 5. Surat Penyesuaian PK Eselon I TA 2016 DJBK

Lampiran I
 Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi
 Nomor :
 Tanggal : Februari 2016
 Perihal : Penyesuaian Perjanjian Kinerja Eselon I
 TA 2016 Direktorat Jenderal Bina
 Konstruksi

PERUBAHAN TARGET PADA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
1.	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	3 %	1,5 %
2.	Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar	Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi besar	18 %	9 %
3.	Meningkatnya tertib penyelenggaraan konstruksi	Persentase kenaikan tertib penyelenggaraan konstruksi	8 %	4 %
4.	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	4 %	2 %
5.	Meningkatnya utilitas produk unggulan	Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan	3 %	1,5 %

Program	Anggaran Tahun 2016	Rencana Anggaran Tahun 2016 Berdasarkan Renstra DJBK
Program Pembinaan Konstruksi	Rp. 681.971.765.000,-	Rp. 923.769.081.111,-

LAMPIRAN 6

**Matriks Program dan
Kegiatan Tujuan I Renstra
Ditjen Bina Konstruksi
2015-2019**

TABEL 2.1 MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN TUJUAN I

TUJUAN 1:

Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET					TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 2 : PEMBINAAN KONSTRUKSI								
SASARAN PROGRAM								
1	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh							
1	Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh	%	3	3	3	3	3	15
2	Meningkatnya persentase BUJK yang							
1	Persentase kenaikan BUJK menjadi	%	18	18	18	18	18	90
3	Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3,							
1	Persentase kenaikan tingkat tertib	%	8	8	8	8	8	40
4	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi							
1	Persentase kenaikan SDM penyedia jasa	%	2	4	5	7	9	27
5	Meningkatnya utilitas produk unggulan							
1	Persentase kenaikan tingkat utilitas produk	%	3	3	3	3	3	15
KEGIATAN 2.1: PEMBINAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR								
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR								
SASARAN KEGIATAN								
1	Tersedianya Pengaturan pembinaan investasi	Draft	4	4	4	4	4	20
1	Jumlah Draft NSPK Pembinaan Investasi	Draft	4	4	4	4	4	20
SUB SASARAN KEGIATAN								
a	Tersusunnya kebijakan dan strategi pola	Draft	2	2	2	2	2	10
1)	Jumlah draft pola investasi dan pola	Draft	2	2	2	2	2	10
b	Tersusunnya NSPK penyelenggaraan investasi	Draft	2	2	2	2	2	10
1)	Jumlah draft NSPK penyelenggaraan investasi	Draft	2	2	2	2	2	10
2	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi	Profil	4	4	4	4	4	20
1	Jumlah profil pembinaan investasi infrastruktur	Profil	4	4	4	4	4	20
SUB SASARAN KEGIATAN								
a	Terselenggaranya fasilitas investasi infrastruktur	Profil	2	2	2	2	2	10
1)	Jumlah fasilitas infrastruktur dan pengelolaan	Profil	2	2	2	2	2	10
b	Tersusunnya profil pasar konstruksi nasional	Profil	2	2	2	2	2	10
1)	Jumlah Profil Pasar Konstruksi Nasional dan	Profil	2	2	2	2	2	10
3	Pengelolaan administrasi perkantoran	Laporan	13	13	13	13	13	65
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan	13	13	13	13	13	65

LAMPIRAN 7

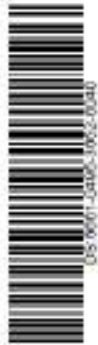
**Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran**



KEMENTERIAN EKONOMI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN

DAFTAR ISIJAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDIK
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA-833.13-0/2016

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM



Halaman : 1 dari 4

A. IDENTAS UNIT	
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	033 KEMENTERIAN PEREKONOMIAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. UNIT ORGANISASI	033.11 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
3. PASUK	Rp.001.071.700.000 (DAMPAK DULAH PULUH SATU MILIAR SEMBELANRATUS TUJUH RIBULUH SATU JUTA TUJUH RATUS EMPATPULUH LIMA RIBU RUPIAH)
B. KETERANGAN DENGAN PROGRAM, SARAN STRATEGIS KL, PUNSA, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RUP	
1. PROGRAM	00 Program Pembinaan Komunitas
2. SARAN STRATEGIS	03 Meningkatkan kapasitas dan kualitas konsultasi nasional
3. FUNGSI	04 EKONOMI
4. PRIORITAS	007 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI
Non Prioritas	010

(dalam ribuan rupiah)
001.071.700
661.071.706
001.071.705
001.071.705

Jakarta, 27 Desember 2015
a.n. MENTERI PEREKONOMIAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

F. TAUFIK INDROYONO, MSi.
NIP. 100038191982111001

LAMPIRAN 8

**Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran APBN-P**



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN
LAMPIRAN Surat ke DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR : SP DIPA - 033.13.1.273659/2016



Revisi ke 01
Tanggal : 26 April 2016

A. Dasar Hukum:

- 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara
- 3. UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016

B. Dengan perubahan Petikan Anggaran Untuk:

1. Kementerian/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PERUBAHAN RUMAH
2. Unit Organisasi	: (11)	DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
3. Pivota	: (21)	DI JAKARTA
4. Kode/Rincian Sektoral	: (27403)	DIREKTORAT BINA KELEMBAGAN DAN JABATAN DIKAS JASA KONSTRUKSI
Sebesar	: Rp.	30.000.000,00 (TIGA PULUH GEBILAN RIBU SATU RATUS DAN PULUH DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan kegiatan sebagai berikut:

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

06. PERSONEL

0437. INSPEKSI BINA KONSTRUKSI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan

003.03.00. Program Peningkatan Kinerja

003.03.00.000. Peningkatan Kinerja/program dan kegiatan lainnya

C. Sumber Dana berasal dari:

1. Rupaiah Dalam	Rp.	30.000.000,00	4. Penerimaan Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PMP			- Penerimaan Dalam Negeri	Rp.	0
PMP TA 2016	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Penerimaan Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Penerimaan Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
4. Penerimaan Dana Hibah Lainnya			6. SDBN PDB	Rp.	0
1. CPNS JAWABTA V	(R) Rp.	30.000.000,00			

D. Penjelasan Detail dan Keterangan (Catatan):

1. DIPA Petikan ini merupakan kegiatan yang tidak termasuk dalam DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian/Lembaga)
2. DIPA Petikan ini adalah secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode anggaran berupa detail secara terpadu sebagai pengganti lampiran anggaran (detail/lokasi)
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan setelah dari pencairan dan pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Casa Dinas/Bendahara Umum Negara
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Pencairan yang terkandung dalam Petikan ini DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan
5. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran yang terdapat dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Penerima Anggaran/Casa Penerima Anggaran
6. Dalam hal terdapat perubahan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-PL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-PL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan buku induk yang ada)
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

Jakarta, 27 Desember 2015
S H MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Dr.
AGUSLAN
NIP. 1962011190221001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN
LAMPIRAN Surat ke DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR : SP DIPA - 033.13.1.46843/2016



Revisi ke 01
Tanggal : 28 Maret 2016

A. Dasar Hukum:

- 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara
- 3. UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016

B. Dengan perubahan Petikan Anggaran Untuk:

1. Kementerian/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PERUBAHAN RUMAH
2. Unit Organisasi	: (11)	DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
3. Pivota	: (21)	DI JAKARTA
4. Kode/Rincian Sektoral	: (4004)	BALAI PERENCANAAN KONSTRUKSI MELAYU DI JAKARTA
Sebesar	: Rp.	40.000.000,00 (EMPAT PULUH RIBU DAN DELAPAN RATUS DAN SEMBILAN PULUH SATU RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan kegiatan sebagai berikut:

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

04. PERSONEL

0437. INSPEKSI BINA KONSTRUKSI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan

C. Sumber Dana berasal dari:

1. Rupaiah Dalam	Rp.	40.000.000,00	4. Penerimaan Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PMP			- Penerimaan Dalam Negeri	Rp.	0
PMP TA 2016	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Penerimaan Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Penerimaan Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
4. Penerimaan Dana Hibah Lainnya			6. SDBN PDB	Rp.	0
1. CPNS JAWABTA V	(R) Rp.	40.000.000,00			

D. Penjelasan Detail dan Keterangan (Catatan):

1. DIPA Petikan ini merupakan kegiatan yang tidak termasuk dalam DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian/Lembaga)
2. DIPA Petikan ini adalah secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode anggaran berupa detail secara terpadu sebagai pengganti lampiran anggaran (detail/lokasi)
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan setelah dari pencairan dan pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Casa Dinas/Bendahara Umum Negara
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Pencairan yang terkandung dalam Petikan ini DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan
5. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran yang terdapat dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Penerima Anggaran/Casa Penerima Anggaran
6. Dalam hal terdapat perubahan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-PL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-PL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan buku induk yang ada)
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

Jakarta, 27 Desember 2015
S H MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Dr.
AGUSLAN
NIP. 1962011190221001

Terlampir



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
JAKARTTA, Desember 2015

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016**
NOMOR : SP DIPA. 033.13.1.013/88/2016



Revisi ke 01
Tanggal : 22 Januari 2016

A. Dasar Hukum

- 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara
- 3. UU No. 16 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016

B. Dengan Di-Sahkan Atas Anggaran URA:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (00)	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2. Unit Organisasi	: (01)	DIREKTORAT JENDERAL BINA KONGSTRUKSI
3. Pusat	: (01)	DIJ JAKARTA
4. Kode/Ruang Kerja	: (0100)	DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR
Seluruh	: Rp.	12.940.000.000 (DUA BELAS MILIAR DUA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU)

URA Kegiatan/Program sebagai berikut:

Kode dan Nama Program dan Sub-Program

04 EKONOMI

04.01 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan

002.11.00 Program Pembiayaan Pemukiman

002.11.00.2000 Pembiayaan Pemukiman Perkotaan

Jumlah Uang
Rp. 12.940.000.000
Rp. 12.940.000.000

C. Sumber Dana Rincian Ter:

1. Anggaran Mula	Rp.	12.940.000.000	4. Program Hibah Dana Negara	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Program Dana Negara	Rp.	0
- PNBP TA Bayaran	Rp.	0	- Hibah Dana Negara	Rp.	0
3. Program Hibah Luar Negara	Rp.	0	- Hibah Langsung	Rp.	0
- Rinyan Luar Negara	Rp.	0	- Hibah Luar Negara Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negara	Rp.	0	- Hibah Dana Negara Langsung	Rp.	0
	Rp.	0	- Hibah PMS	Rp.	0

D. Penerima Dana Ditukarkan melalui:

1. DIPA JAKARTA I (100) Rp. 12.940.000.000

E. Maksud dan Tujuan dari Pelaksanaan Anggaran

1. DIPA Pelikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Instansi Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga
2. DIPA Pelikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan basis pengantar berupa digital yang sebagai pengganti atau untuk penggantian identitas
3. DIPA Pelikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan dan pengendalian anggaran yang Berbasis Urutan Anggaran/Urutan Berbasis Urutan Negara
4. Maksud dan Tujuan DIPA dan Penerima Pembiayaan yang ditukarkan melalui DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan
5. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Pelikan sepenuhnya berada pada Pimpinan Anggaran/Instansi Program Anggaran
6. DIPA ini berlaku sejak pembekalan data DIPA Pelikan dengan database RIA-VOL DIPA dan berakhir keakhir bulan yang berlaku sesuai DIPA yang tercantum di dalam database RIA-VOL DIPA dan berakhir keakhir bulan pembekalan basis data yang ada
7. DIPA Pelikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

Jakarta, 27 Desember 2015
A. H. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

di
AGD/DAIR
NO: 1880/011/1602/2015



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
JAKARTTA, Desember 2015

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016**
NOMOR : SP DIPA. 033.13.1.013/12/2016



Revisi ke 02
Tanggal : 15 Maret 2016

A. Dasar Hukum

- 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara
- 3. UU No. 16 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016

B. Dengan Di-Sahkan Atas Anggaran URA:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (00)	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2. Unit Organisasi	: (01)	DIREKTORAT JENDERAL BINA KONGSTRUKSI
3. Pusat	: (01)	DIJ JAKARTA
4. Kode/Ruang Kerja	: (0100)	DIREKTORAT BINA INVESTASI DAN ANGGARAN JAWA KONGSTRUKSI
Seluruh	: Rp.	27.000.000.000 (DUA BELAS TUJUH MILIAR SERIBUAN RATUS AJTA ROPNRA)

URA Kegiatan/Program sebagai berikut:

Kode dan Nama Program dan Sub-Program

04 EKONOMI

04.01 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan

002.11.00 Program Pembiayaan Pemukiman

002.11.00.2000 Pembiayaan Pemukiman Perkotaan

Jumlah Uang
Rp. 27.000.000.000
Rp. 27.000.000.000

C. Sumber Dana Rincian Ter:

1. Anggaran Mula	Rp.	27.000.000.000	4. Program Hibah Dana Negara	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Program Dana Negara	Rp.	0
- PNBP TA Bayaran	Rp.	0	- Hibah Dana Negara	Rp.	0
3. Program Hibah Luar Negara	Rp.	0	- Hibah Langsung	Rp.	0
- Rinyan Luar Negara	Rp.	0	- Hibah Luar Negara Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negara	Rp.	0	- Hibah Dana Negara Langsung	Rp.	0
	Rp.	0	- Hibah PMS	Rp.	0

D. Penerima Dana Ditukarkan melalui:

1. DIPA JAKARTA I (100) Rp. 27.000.000.000

E. Maksud dan Tujuan dari Pelaksanaan Anggaran

1. DIPA Pelikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Instansi Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga
2. DIPA Pelikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan basis pengantar berupa digital yang sebagai pengganti atau untuk penggantian identitas
3. DIPA Pelikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan dan pengendalian anggaran yang Berbasis Urutan Anggaran/Urutan Berbasis Urutan Negara
4. Maksud dan Tujuan DIPA dan Penerima Pembiayaan yang ditukarkan melalui DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan
5. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Pelikan sepenuhnya berada pada Pimpinan Anggaran/Instansi Program Anggaran
6. DIPA ini berlaku sejak pembekalan data DIPA Pelikan dengan database RIA-VOL DIPA dan berakhir keakhir bulan yang berlaku sesuai DIPA yang tercantum di dalam database RIA-VOL DIPA dan berakhir keakhir bulan pembekalan basis data yang ada
7. DIPA Pelikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

Jakarta, 27 Desember 2015
A. H. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

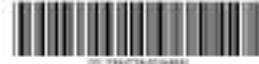
di
AGD/DAIR
NO: 1880/011/1602/2016



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN - Data dan DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR : SP DIPA - 833.13.1.613612/2016



Revisi ke 01

Tanggal : 19 Januari 2016

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara
3. UU No. 18 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016

B. Dengan ini disahkan Anggaran Unit:

1. Kementerian Keuangan	: 020	KEMENTERIAN PERUBAHAN UMUM DAN PERKOTAHAN RIWAYIT
2. Unit Organisasi	: 110	DIREKTORAT JENJRAL DAN KONTRAKSI
3. Posisi	: 011	DI JAKARTA
4. Kode Nama Sektor	: 010010	DIREKTORAT DAN PENYELAKSANAAN JASA KONTRAKSI
Saluran	Rp. 37.000.000,00	(TIGA PULUH TUJUH MILYAR SEBESARAN RIBU RUPIAH)

Unit Kegiatan Kegiatan sebagai berikut:

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi:

04 DIREKSI
0401 REKREASI DAN KONTRAKSI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan:

031 0301 Program Pembinaan/Manajemen
031 0301 0011 Pemeliharaan Penyelenggaraan Perumahan

Jumlah Uang

Rp. 37.000.000,00
Rp. 37.000.000,00

C. Sumber Dana berasal dari:

1. Pajuk Man	Rp.	37.000.000,00	4. Program/Unit Dalam Negeri	Rp.	0
2. MHP			- Program Dalam Negeri	Rp.	0
MHP TA Sejalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Languang	Rp.	0
3. Program/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Languang	Rp.	0
- Program Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Languang	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. DIPA PBI	Rp.	0

D. Penawar dan dialokasikan melalui:

1. KPRN JAKARTA / 1101 Rp. 37.000.000,00

E. Penjelasan Type dan Karakteristik (Deskripsi)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Unit (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga)
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode pengaman terpadu digital secara terpadu sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (sertifikasi)
3. DIPA Petikan ini dibuat sebagai salinan elektronik dengan kode dan penanda otentikasi/pengaman bagi Direktorat Utama Negara/Pusat/Bendahara Umum Negara
4. Rencana Pemenuhan Dana dan Pemenuhan Pemenuhan yang tercantum dalam Petikan DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan
5. Tanggung jawab terhadap pengalokasian anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan diserahkan kepada pihak Pengguna Anggaran/Bendahara/Pengelola Anggaran
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RPA-GL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RPA-GL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan data yang valid)
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

Jakarta, 17 Desember 2015
A/H MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENJRAL ANGGARAN

Dr.
AGUSLAN
NP. 19600111962001001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN - Data dan DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR : SP DIPA - 833.13.1.613633/2016

Revisi ke 01

Tanggal : 28 Mei 2016

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara
3. UU No. 18 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016

B. Dengan ini disahkan Anggaran Unit:

1. Kementerian Keuangan	: 020	KEMENTERIAN PERUBAHAN UMUM DAN PERKOTAHAN RIWAYIT
2. Unit Organisasi	: 110	DIREKTORAT JENJRAL DAN KONTRAKSI
3. Posisi	: 020	JANGKA TERUS
4. Kode Nama Sektor	: 010010	SALURAN DAN PERUBAHAN KONTRAKSI ALYKONDI SURABAYA
Saluran	Rp. 25.700.000,00	(LIMA PULUH LIMA MILYAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH TIGA RUTA DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH)

Unit Kegiatan Kegiatan sebagai berikut:

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi:

04 DIREKSI
0401 REKREASI DAN KONTRAKSI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan:

Terlampir

Jumlah Uang

1. Pajuk Man	Rp.	25.700.000,00	4. Program/Unit Dalam Negeri	Rp.	0
2. MHP			- Program Dalam Negeri	Rp.	0
MHP TA Sejalan	Rp.	13.400.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Languang	Rp.	0
3. Program/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Languang	Rp.	0
- Program Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Languang	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. DIPA PBI	Rp.	0

D. Penawar dan dialokasikan melalui:

1. KPRN SURABAYA / 0210 Rp. 25.700.000,00

E. Penjelasan Type dan Karakteristik (Deskripsi)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Unit (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga)
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode pengaman terpadu digital secara terpadu sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (sertifikasi)
3. DIPA Petikan ini dibuat sebagai salinan elektronik dengan kode dan penanda otentikasi/pengaman bagi Direktorat Utama Negara/Pusat/Bendahara Umum Negara
4. Rencana Pemenuhan Dana dan Pemenuhan Pemenuhan yang tercantum dalam Petikan DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan
5. Tanggung jawab terhadap pengalokasian anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan diserahkan kepada pihak Pengguna Anggaran/Bendahara/Pengelola Anggaran
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RPA-GL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RPA-GL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan data yang valid)
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

Jakarta, 27 Desember 2015
A/H MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENJRAL ANGGARAN

Dr.
AGUSLAN
NP. 19600111962001001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN - Satu ke DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016**
NOMOR : SP DIPA - 033.13.1.648209/2016



Revisi ke 02
Tanggal : 12 April 2016

- A. Dasar Hukum:**
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara;
3. UU No. 19 Tahun 2015 tentang APBN TA 2015.

B. Dengan ini dibekukan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	(003)	KEMENTERIAN PERDIKTIAN UMUM DAN PERUBAHAN NEGARA
2. Unit Organisasi	(110)	DIREKTORAT JENDERAL BINA KONGSTRUKSI
3. Pos/nomor	(11)	SUMATERA SELATAN
4. Kode/nama subter	(24020)	PELAYANAN PERBANGUNAN KONGSTRUKSI RELATIF PALDIKABO
Detail	Rp.	10.014.842.000 - (SEPULUH DELAPAN BELAS EMPAT RIBU DUA RATUS DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Unit/Agensi/Kelembagaan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi:
04 DOKUMEN
0401 KEGIATAN DAN KONGSTRUKSI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan:

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari:

1. Rupaiah Murni	Rp.	10.014.842.000	4. Penerimaan Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Penerimaan Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Gejagra	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Penerimaan Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Languang	Rp.	0
- Penerimaan Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Languang	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Languang	Rp.	0
4. Penerimaan dana hibahan melalui:			6. Hibah FDI	Rp.	0
1. KPPI PALEMBANG	(04)	Rp.	10.014.842.000		

D. Penjelasan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain yang dianggap dengan cara pengisian berupa digital atau sebagai pengganti cetak tanpa persetujuan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan subter dan penanaman dana/pengeluaran bagi Direktorat Utama Negara/Tuasa Direktorat Utama Negara.
- Rencana Penanaman Dana dan Penanaman Penerimaan yang tercantum dalam DIPA ini berlaku dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap pengisian anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Instansi/Pengguna Anggaran.
- Daftar ini berlaku sebatas data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maknanya yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (tentukan baik-bud yang pasti).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Jakarta, 07 Desember 2015
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
ASOJLAM
MP 1660911102021001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN - Satu ke DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016**
NOMOR : SP DIPA - 033.13.1.648209/2016



Revisi ke 01
Tanggal : 26 Maret 2016

- A. Dasar Hukum:**
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara;
3. UU No. 19 Tahun 2015 tentang APBN TA 2015.

B. Dengan ini dibekukan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	(003)	KEMENTERIAN PERDIKTIAN UMUM DAN PERUBAHAN NEGARA
2. Unit Organisasi	(11)	DIREKTORAT JENDERAL BINA KONGSTRUKSI
3. Pos/nomor	(11)	SUMATERA SELATAN
4. Kode/nama subter	(24020)	PELAYANAN PERBANGUNAN KONGSTRUKSI RELATIF PALDIKABO
Detail	Rp.	10.014.842.000 - (SEPULUH DELAPAN BELAS EMPAT RIBU DUA RATUS DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Unit/Agensi/Kelembagaan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi:
04 DOKUMEN
0401 KEGIATAN DAN KONGSTRUKSI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan:

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari:

1. Rupaiah Murni	Rp.	10.014.842.000	4. Penerimaan Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Penerimaan Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Gejagra	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Penerimaan Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Languang	Rp.	0
- Penerimaan Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Languang	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Languang	Rp.	0
4. Penerimaan dana hibahan melalui:			6. Hibah FDI	Rp.	0
1. KPPI PALEMBANG	(04)	Rp.	10.014.842.000		

D. Penjelasan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain yang dianggap dengan cara pengisian berupa digital atau sebagai pengganti cetak tanpa persetujuan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan subter dan penanaman dana/pengeluaran bagi Direktorat Utama Negara/Tuasa Direktorat Utama Negara.
- Rencana Penanaman Dana dan Penanaman Penerimaan yang tercantum dalam DIPA ini berlaku dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap pengisian anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Instansi/Pengguna Anggaran.
- Daftar ini berlaku sebatas data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maknanya yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (tentukan baik-bud yang pasti).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Jakarta, 07 Desember 2015
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
ASOJLAM
MP 1660911102021001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Data dan DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR : SP DIPA- 833.13.1.644209/2016



83 833131 644209

A. Dasar Hukum:

- 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara
- 3. UU No. 16 Tahun 2000 tentang APBN TA 2000

Revisi ke 01

Tanggal : 28 Maret 2016

B. Dengan isian dan/atau Nilai Anggaran untuk:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(001)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	(01)	DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
3. Provinsi	(11)	JAWABARA BARAT
4. Kode/Rincian Sektor	(94000)	PELAKSANAAN PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN MELAKUKAN PELADANGAN
Seluruh	Rp.	10.114.942.000 (DERSALAN BELAK MELAKUKAN RATUS EMPAT BELAS JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPAH)

Unit Anggaran kegiatan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub-Fungsi:
04 - AKRIBUM
0407 - INFRASTRUKTUR DAN KONSTRUKSI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan:

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Revisi dan:					
1. Pajuh Mula	Rp.	10.014.942.000	4. Program/Hubung Dalam Negara	Rp.	0
2. PMP			- Kegiatan Dalam Negara	Rp.	0
PMP TA Bermanfaat	Rp.	0	- Hibah Dalam Negara	Rp.	0
3. Program/Hubung Luar Negara	Rp.	0	3. Hibah Langsung	Rp.	0
- Program Luar Negara	Rp.	0	- Hibah Luar Negara Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negara	Rp.	0	- Hibah Dalam Negara Langsung	Rp.	0
4. Penyaluran dana dibelikan melalui:			5. Hibah PMS	Rp.	0
1. KIPRI - PALMBAK	(044)	Rp.			
2. Penyediaan Sympul dan Penelitian (Disaster)					

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode anggaran berbasis digital yang sebagai pengganti buku dengan menggunakan sistem (RPL).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan setelah dan pemantauan dan pengendalian bagi Direktorat Umum Negara/Rincian Direktorat Umum Negara.
4. Rencana Perbaikan Data dan Pelaporan Pelaksanaan yang tercantum dalam Halaman 01 DIPA, akan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggal yang berlaku untuk pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan apabila berada pada Pengantar Anggaran/Rincian Pengantar Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perubahan data antara DIPA Petikan dengan database RPL-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang tercantum di dalam database RPL-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan buku induk yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Jakarta, 27 Desember 2015
A. M. HENDRIK HULUWAN
DIREKTOR JENDERAL AKBID/ASB

RI
KORIDUM
NP 1800011190221001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Data dan DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR : SP DIPA- 833.13.1.639801/2016



83 833131 639801

A. Dasar Hukum:

- 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara
- 3. UU No. 16 Tahun 2000 tentang APBN TA 2000

Revisi ke 01

Tanggal : 20 April 2016

B. Dengan isian dan/atau Nilai Anggaran untuk:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(001)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	(01)	DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
3. Provinsi	(01)	DI JAKARTA
4. Kode/Rincian Sektor	(93000)	DIREKTORAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Seluruh	Rp.	87.875.000.000 (DERSALAN BELAK MELAKUKAN BELAS TUJUH PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPAH)

Unit kegiatan kegiatan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub-Fungsi:
04 - AKRIBUM
0407 - INFRASTRUKTUR DAN KONSTRUKSI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan:

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Revisi dan:					
1. Pajuh Mula	Rp.	87.875.000.000	4. Program/Hubung Dalam Negara	Rp.	0
2. PMP			- Program Dalam Negara	Rp.	0
PMP TA Bermanfaat	Rp.	0	- Hibah Dalam Negara	Rp.	0
3. Program/Hubung Luar Negara	Rp.	0	3. Hibah Langsung	Rp.	0
- Program Luar Negara	Rp.	0	- Hibah Luar Negara Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negara	Rp.	0	- Hibah Dalam Negara Langsung	Rp.	0
4. Penyaluran dana dibelikan melalui:			5. Hibah PMS	Rp.	0
1. KIPRI - JAWABARA	(116)	Rp.			
2. Penyediaan Sympul dan Penelitian (Disaster)					

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode anggaran berbasis digital yang sebagai pengganti buku dengan menggunakan sistem (RPL).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan setelah dan pemantauan dan pengendalian bagi Direktorat Umum Negara/Rincian Direktorat Umum Negara.
4. Rencana Perbaikan Data dan Pelaporan Pelaksanaan yang tercantum dalam Halaman 01 DIPA, akan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggal yang berlaku untuk pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan apabila berada pada Pengantar Anggaran/Rincian Pengantar Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perubahan data antara DIPA Petikan dengan database RPL-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang tercantum di dalam database RPL-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan buku induk yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Jakarta, 27 Desember 2015
A. M. HENDRIK HULUWAN
DIREKTOR JENDERAL AKBID/ASB

RI
KORIDUM
NP 1800011190221001

LAMPIRAN 9 | Dokumentasi



Presiden RI bersama Menteri PUPR
Mengunjungi Booth Konstruksi Indonesia 2017



Pembahasan Rancangan Undang-undang
tentang Jasa Konstruksi bersama DPR



Lomba Pemasangan Ubin pada Kegiatan
Konstruksi Indonesia 2017



Pelaksanaan Bimbingan Teknis SMK3



Serah Terima *Mobile Training Unit* (MTU) kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu



Serah Terima *Mobile Training Unit* (MTU) kepada Pemerintah Provinsi Lampung



Serah Terima *Mobile Training Unit* (MTU) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara



Serah Terima *Mobile Training Unit* (MTU) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



Serah Terima *Mobile Training Unit* (MTU) kepada Pemerintah Provinsi Bali



Uji Kompetensi Mandor dan Kepala Tukang BUMN-BUMS Sumatera Barat



Pemberian Selamat kepada Pemenang Lomba Tukang



Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Serentak di Se-Sulawesi



Pelatihan dan Sertifikasi Tukang Plester dengan Mobile Training Unit (MTU)



Delegasi Indonesia foto bersama Bauer pada kegiatan Pameran BAUMA 2016



Direktur Jenderal Bina Konstruksi bersama Menteri PUPR pada Pembukaan Konstruksi Indonesia 2017



Lomba Operator Excavator



Pelatihan Training of Trainer Mobile Training Unit



Direktur Jenderal Bina Konstruksi Membuka Kegiatan ESQ DJBK



Dirjen Bina Konstruksi pada kegiatan Uji Kepututan dan Kelayakan Calon Pengurus Lembaga Tk. 2016-2020



Peninjauan Pembangunan Proyek Jalan Layang



Peninjauan Pembangunan Proyek MRT



Direktur Jenderal Bina Konstruksi Menggaungkan Skema KPBU pada Program Metro Plus Siang, Metro TV



Direktur Jenderal Bina Konstruksi Membuka Kegiatan Sertifikasi Serentak pada Proyek Pondok Indah Residence



Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Memperoleh Juara pada Kompetisi Pelayanan Publik PUPR

LAMPIRAN 10 | Sasaran Kerja Pegawai
(SKP)

Lampiran 10. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN PERIKANAN, UYUHAN DAN PERUMAHAN RIWAYAT

NO	A. PELAKSI PUSKAS		NO	B. PELAKSI PUSKAS SPS YANG BERJALAN			
	1	2		1	2		
1	Nama	M. Basuki Hadriatuningsih	1	Nama	M. Yuli Yuli, M. Candi		
2	NIP	19700312196001003	2	NIP	19700312196001003		
3	Pangkat/Gol. Ruang	Pembina Utama Madya / PVM	3	Pangkat/Gol. Ruang	Pembina Utama Madya / PVM		
4	UNSIK	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4	UNSIK	Direktur Jenderal Bina Konstruksi		
5	Jenis Kerja	Kementerian Dalamnegeri, UYUHAN dan Perumahan Rakyat	5	Jenis Kerja	Direktoral Jenderal Bina Konstruksi		
NO	II. INDIKATOR TUGAS JARAKAN		AK	TABEL 1			
	1	2		KUANTITAS	KUALITAS	WAKTU	BANK
1	2	3	4	5	6	7	
1	Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di bidang teknik sipil		18	%	100	11	Kaya
2	Menyelenggarakan pembinaan penyelenggaraan konstruksi sipil yang berkaitan dengan		3	%	100	11	Kaya
3	Menyelenggarakan pembinaan penyelenggaraan teknik perancangan sipil		4	%	100	11	Kaya
4	Menyelenggarakan pembinaan penyelenggaraan SPM Persepsi dan Konstruksi yang berkaitan		3	%	100	11	Kaya
5	Menyelenggarakan pembinaan penyelenggaraan SPM Persepsi dan Konstruksi yang berkaitan		15	%	100	11	Kaya

PELAKSI PUSKAS

M. Basuki Hadriatuningsih

PELAKSI PUSKAS SPS YANG BERJALAN

M. Yuli Yuli, M. Candi
19700312196001003

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN PERIKANAN, UYUHAN DAN PERUMAHAN RIWAYAT

NO	A. PELAKSI PUSKAS		NO	B. PELAKSI PUSKAS SPS YANG BERJALAN			
	1	2		1	2		
1	Nama	M. Yuli Yuli, M. Candi	1	Nama	M. Yuli Yuli, M. Candi		
2	NIP	19700312196001003	2	NIP	19700312196001003		
3	Pangkat/Gol. Ruang	Pembina Utama Madya / PVM	3	Pangkat/Gol. Ruang	Pembina Utama Madya / PVM		
4	UNSIK	Direktoral Jenderal Bina Konstruksi	4	UNSIK	Subditansi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		
5	Jenis Kerja	Subditansi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	5	Jenis Kerja	Subditansi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		
NO	II. INDIKATOR TUGAS JARAKAN		AK	TABEL 1			
	1	2		KUANTITAS	KUALITAS	WAKTU	BANK
1	2	3	4	5	6	7	
1	Menyelenggarakan Pelayanan Teknis dan Administrasi Dalam rangka penyelenggaraan, program dan anggaran, dan kegiatan teknis sipil		6	Diikuti	100	12	Buruk
2	Menyelenggarakan Pelayanan Teknis dan Administrasi kegiatan teknis sipil, pengendalian anggaran, dan penyelenggaraan usaha		3	Lengkap	100	12	Buruk
3	Menyelenggarakan Pelayanan Teknis dan Administrasi akurasi dan pengawasan, pelaksanaan SPM dan layanan teknis rumah tinggal dan perencanaannya		3	Lengkap	100	12	Buruk
4	Menyelenggarakan Pelayanan Teknis dan Administrasi layanan informasi dan komunikasi publik		4	Diikuti	100	12	Buruk
5	Menyelenggarakan Pelayanan Teknis dan Administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis sipil dan pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis sipil dan perencanaannya		3	Lengkap	100	12	Buruk
6	Menyelenggarakan pembinaan teknis sipil		36	Lengkap	100	12	Buruk
7							
8							
9							
10							

PELAKSI PUSKAS

M. Yuli Yuli, M. Candi
19700312196001003

PELAKSI PUSKAS SPS YANG BERJALAN

M. Yuli Yuli, M. Candi
19700312196001003

Lampiran 10. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

FORMULIR SASARAN KERJA PEKAWAI
KEWILAYAHAN PEGAWAI LINGKUP DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. PEJABAT PENILAI		B. PEKAWAI NEGRI SIPIL YANG DINILAI	
1. Nama	Ir. Yudi Tedy, M. Eng. Sc	1. Nama	Dr. Dedi Suryobroto, MM
2. NIP	198708031990031000	2. NIP	1954010119451000
3. Pangkat/Gol. Ruang	Penjabat Utama Madya (PUM)	3. Pangkat/Gol. Ruang	Penjabat Utama Muda (PUM)
4. Jabatan	Direktur Investasi dan Konstruksi	4. Jabatan	Direktur Investasi dan Konstruksi
5. Unit Kerja	Divisi Investasi dan Konstruksi	5. Unit Kerja	Divisi Investasi dan Konstruksi

NO	A. KEGIATAN YANG DIHARAPKAN	AK	TARGET				
			KUANTITAS/OUTPUT	KUALITAS	WAKTU	BIAYA (Rp)	
1	Menyediakan Pengadaan Perumahan Investasi Infrastruktur	4	Draft RPPK	100	11	Bulan	Rp. 8.200.000
2	Melaksanakan Penilaian dan Evaluasi Investasi Infrastruktur dan Pengadaan Tanah	5	Profil	100	11	Bulan	Rp. 14.870.407
3	Melaksanakan Layanan Managemen	1	Dokumen	100	12	Bulan	Rp. 1.128.898
4	Melaksanakan Pelayanan secara Elektronik (E-Procurement)	1	Dokumen	100	12	Bulan	Rp. 108.498
5	Melaksanakan Layanan Perbaikan	10	Ruang Layanan	100	12	Bulan	Rp. 2.870.442
6	Menyediakan Prangkat Pengarah Duta dan Pemukim Baru	25	Unit	100	12	Bulan	Rp. 170.808

Jakarta, Januari 2023

PEJABAT PENILAI,

PEKAWAI NEGRI SIPIL YANG DINILAI

Ir. Yudi Tedy, M. Eng. Sc
198708031990031000


Dr. Dedi Suryobroto, MM
1954010119451000

FORMULIR SASARAN KERJA PEKAWAI
KEMENTERIAN PERUMAHAN LINGKUP DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. PEJABAT PENILAI		B. PEKAWAI NEGRI SIPIL YANG DINILAI	
1. Nama	Ir. Yudi Tedy, M. Eng. Sc	1. Nama	Dr. Dedi Suryobroto, MM
2. NIP	198708031990031000	2. NIP	1954010119451000
3. Pangkat/Gol. Ruang	Penjabat Utama Madya (PUM)	3. Pangkat/Gol. Ruang	Penjabat Utama Muda (PUM)
4. Jabatan	Direktur Investasi dan Konstruksi	4. Jabatan	Direktur Investasi dan Konstruksi
5. Unit Kerja	Divisi Investasi dan Konstruksi	5. Unit Kerja	Divisi Investasi dan Konstruksi

NO	A. KEGIATAN YANG DIHARAPKAN	AK	TARGET				
			KUANTITAS/OUTPUT	KUALITAS	WAKTU	BIAYA	
1	Melaksanakan survey standar dan pedoman dalam penyediaan perumahan kincir laut	2	RPPK	100	11	Bulan	5.180.000.000
2	Melaksanakan survey standar dan pedoman landfall kincir laut	2	RPPK	100	11	Bulan	5.180.000.000
3	Melaksanakan survey standar dan pedoman kincir laut berdasarkan	2	RPPK	100	11	Bulan	5.180.000.000
4	Melaksanakan survey standar dan pedoman perumahan kincir laut	2	RPPK	100	11	Bulan	5.180.000.000
5	Melaksanakan draft perencanaan anggaran kincir laut	2	Profil	100	11	Bulan	5.200.000.000
6	Melaksanakan draft perencanaan anggaran kincir laut	2	Profil	100	11	Bulan	5.200.000.000
7	Melaksanakan draft perencanaan anggaran kincir laut	2	Profil	100	11	Bulan	5.200.000.000
8	Melaksanakan draft perencanaan anggaran kincir laut	2	Profil	100	11	Bulan	5.200.000.000
9	Melaksanakan layanan manajemen	1	Dokumen	100	12	Bulan	4.170.000.000
10	Melaksanakan pelayanan standar perumahan kincir laut	1	Dokumen	100	12	Bulan	80.000.000
11	Melaksanakan layanan perumahan kincir laut	10	Dokumen	100	12	Bulan	1.000.000.000
12	Melaksanakan pelayanan standar perumahan kincir laut	10	Dokumen	100	12	Bulan	800.000.000
13	Melaksanakan pelayanan standar perumahan kincir laut	1	Dokumen	100	12	Bulan	200.000.000
14	Melaksanakan pelayanan standar perumahan kincir laut	10	Dokumen	100	12	Bulan	1.000.000.000
15	Melaksanakan pelayanan standar perumahan kincir laut	2	Dokumen	100	12	Bulan	1.000.000.000
16	Melaksanakan pelayanan standar perumahan kincir laut	2	Dokumen	100	12	Bulan	1.000.000.000
17	Melaksanakan pelayanan standar perumahan kincir laut	5	Dokumen	100	12	Bulan	1.000.000.000
18	Melaksanakan pelayanan standar perumahan kincir laut	5	Dokumen	100	12	Bulan	1.000.000.000

Jakarta, Januari 2023

PEJABAT PENILAI,

Ir. Yudi Tedy, M. Eng. Sc
198708031990031000

PEKAWAI NEGRI SIPIL YANG DINILAI

Dr. Dedi Suryobroto, MM
1954010119451000

Lampiran 10. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

I. PEJABAT PENILAI		NO		II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI				
1	Nama	Dr. Yusid Toyib, M.Eng.Sc.	1	Nama	Dr. Yaya Supriyatra S., M.Eng.Sc.			
2	NIP	195708311986031003	2	NIP	195903211986031003			
3	Pangkat/Gol. Ruang	Pembina Utama/Madya / IV/e	3	Pangkat/Gol. Ruang	Pembina Utama Muda / IV/c			
4	Jabatan	Direktur Jendral Bina Konstruksi	4	Jabatan	Direktur Bina Kelengkapan Dan Sumber Daya Jasa Konstruksi			
5	Unit Kerja	Direktorat Jendral Bina Konstruksi	5	Unit Kerja	Direktorat Bina Kelengkapan Dan Sumber Daya Jasa Konstruksi			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET					
			KUANT/OUTPUT	KUAL/INTU	WAKTU	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Menyelenggarakan Pembinaan/Kelengkapan		4	Dokumen	100	12	bulan	Rp. 11.534.670.000
2	Menyelenggarakan Pembinaan/Material dan Perawatan Konstruksi		4	Dokumen	100	12	bulan	Rp. 5.438.969.000
3	Menyelenggarakan Pembinaan/Teknologi dan Produkul Dalam Negeri		4	Dokumen	100	12	bulan	Rp. 4.343.093.000
4	Menyelenggarakan Pembinaan/Utaha		4	Dokumen	100	12	bulan	Rp. 5.371.807.000
5	Menyelenggarakan Dukung Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BAKD/B		1	Dokumen	100	12	bulan	Rp. 5.385.703.000
6	Menyelenggarakan keterkaitan Data dan Informasi		1	Dokumen	100	12	bulan	Rp. 342.060.000
7	Menyelenggarakan Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Saluran Urah Febet 11 - 200		1	Dokumen	100	12	bulan	Rp. 84.074.000
8	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perbaikan		1	Dokumen	100	12	bulan	Rp. 3.325.000.000
9	Pengadaan Pengolah Data		1	Dokumen	100	12	bulan	Rp. 487.450.000
10	Pengadaan/Perawatan dan Fasilitas Perkantoran		1	Dokumen	100	12	bulan	Rp. 13.000.000
11	Menetapkan Penetapan Kinerja/RAK Direktorat Bina Kelengkapan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi		1	Dokumen	100	12	bulan	
12	Menetapkan Rencana Direktorat Bina Kelengkapan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi		1	Dokumen	100	12	bulan	
13	Menetapkan Pelaporan USP 2015		1	Dokumen	100	12	bulan	
14	Menetapkan Pelaporan Kinerja/RAK Negeri		1	Dokumen	100	12	bulan	
15	Menetapkan Pelaporan Keuangan		1	Dokumen	100	12	bulan	

Pejabat Penilai

Dr. Yusid Toyib, M.Eng.Sc.
195708311986031003

Jakarta, Januari 2016
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Dr. Yaya Supriyatra S., M.Eng.Sc.
195903211986031003

SASARAN KERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

I. PEJABAT PENILAI		NO		II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI				
1	Nama	Dr. Yusid Toyib, M. Eng.Sc	1	Nama	Dr. Ir. Masrianto, MT.			
2	NIP	195708311986031003	2	NIP	195907161985031003			
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina Utama, IV/e	3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina Utama Muda, IV/c			
4	Jabatan	Direktur Jendral Bina Konstruksi	4	Jabatan	Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi			
5	Unit Kerja	Direktorat Jendral Bina Konstruksi	5	Unit Kerja	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET					
			KUANT/OUTPUT	KUAL/INTU	WAKTU	BIAYA		
1	Menetapkan Pengaturan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Kerja Konstruksi	0	30	Dokumen	100	12	bln	19.094.903,000
2	Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Kompetensi dan Produktivitas Kerja Konstruksi	0	3	Dokumen	100	12	bln	9.707.623,000
3	Menyelenggarakan Layanan Manajemen	0	1	Dokumen	100	12	bln	4.426.764,000
4	Menyelenggarakan Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	0	1	Laporan	100	12	bln	82.700,000
5	Menyelenggarakan Layanan Perkantoran	0	12	laporan	100	12	bln	3.806.048,000
6	Menyelenggarakan pengadaan perangkat pengolahan data dan fasilitas perkantoran	0	2	Unit	100	12	bln	500,000,000

Pejabat Penilai

Dr. Yusid Toyib, M. Eng.Sc
NIP. 195708311986031003

Jakarta, Januari 2016
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Dr. Ir. Masrianto, MT.
NIP. 195907161985031003

Lampiran 10. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

**FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGARA SIPIL
UNIT KERJA DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBENDAYAAN
TAHUN 2016**

PELAKSIT PENILAI		NO		A. PEGAWAI NEGARA SIPIL YANG DINILAI					
1. Nama	Ir. Yusuf Teguh, M.Eng. Sc	1	Nama	Ir. R.M. Dudi Suryabrata, MM					
2. NIP	19870311198031003	2	NIP	19681031198031004					
3. Pangkat/Gol. Ruang	Pembina Utama / IVb	3	Pangkat/Gol. Ruang	Pembina Utama Madya / IVa					
4. Jabatan	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	4	Jabatan	Direktur Kerja Sama dan Pembudayaan					
5. Unit Kerja	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	5	Unit Kerja	Direktorat Kerja Sama dan Pembudayaan					
NO		B. HECEKAN TUGAS JADWAL		AK					
				1	2	3	4		
				QUANTITATIVE	QUALITATIVE	WAKTU	BILAI		
				4	5	6	7		
1	Meningkatkan Kerja Sama Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi			1	ProW	100	7	BL	10.100.122.000
2	Meningkatkan Pembudayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Wilayah I			1	ProB	100	7	BL	6.272.060.000
3	Meningkatkan Pembudayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Wilayah II			1	ProB	180	7	BL	5.052.230.000
4	Meningkatkan Pembudayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Wilayah III			1	ProB	190	7	BL	6.420.490.000
5	Menyelenggarakan Layanan Manajemen			1	Dakumen	100	7	BL	3.046.141.000
6	Menyelenggarakan Layanan Perbaikan			12	Bahan Layanan	100	7	BL	2.486.452.000
7	Meningkatkan Pempetaan Perangkat Perangkat Data dan Konstruksi			100	Unit	100	7	BL	680.000.000
8	Meningkatkan Pempetaan Perangkat Perangkat dan Fasilitas Kantor			100	Unit	100	7	BL	200.000.000

Jakarta, Juni 2016
PEGAWAI NEGARA SIPIL YANG DINILAI

PELAKSIT PENILAI

Ir. Yusuf Teguh, M.Eng. Sc
19870311198031003

Ir. R.M. Dudi Suryabrata, MM
19681031198031004

Catatan:
* AK Bagi PNS yang memiliki jabatan fungsional tertentu

LAMPIRAN 11 | **Penghargaan**



LAMPIRAN 12 | **Daftar Satker Tertib Penyelenggaraan**

Lampiran 12. Daftar Satker Tertib Penyelenggaraan

No.	Wilayah	Nama Satker	Satminkal	Nilai
1	3	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta	BM	86%
2	3	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cimanuk-Cisanggarung	SDA	83%
3	3	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah	BM	82%
4	6	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pompegan-Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan	SDA	82%
5	3	Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Jakarta	BM	81%
6	6	Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Makasar	BM	79%
7	7	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua	BM	79%
8	6	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi IV Prov. Sulawesi Tenggara	SDA	79%
9	6	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Sultra	BM	78%
10	3	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah	BM	78%
11	3	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Bengawan Solo	SDA	78%
12	7	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Papua Barat (Bintuni)	BM	77%
13	2	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung	BM	77%
14	3	SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ciliwung-Cisadane	SDA	76%
15	3	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten	BM	76%
16	7	SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Papua Provinsi Papua Barat	SDA	76%
17	4	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Bali-Penida	SDA	76%
18	2	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu	SDA	76%
19	5	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat	BM	76%
20	2	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi	BM	76%
21	3	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Serayu-Opak	SDA	76%
22	5	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalteng	BM	76%
23	2	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Mesuji-Sekampung	SDA	75%
24	5	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Tengah	CK	75%
25	3	Penyediaan Rumah Susun Strategis	PP	75%
26	6	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulteng	BM	75%
27	5	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Tengah	SDA	75%
28	3	Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus	CK	75%

Lampiran 12. Daftar Satker Tertib Penyelenggaraan

No.	Wilayah	Nama Satker	Satminkal	Nilai
29	2	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumsel	BM	75%
30	6	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi III Provinsi Sulawesi Tengah	SDA	75%
31	2	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII Provinsi Bangka Belitung	SDA	75%
32	5	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Kalimantan III Provinsi Kalimantan Timur	SDA	75%
33	5	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Timur	CK	75%
34	3	SNVT Pembangunan Waduk Jatigede	SDA	75%
35	5	Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	CK	75%
36	2	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	CK	75%
37	3	Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	CK	75%
38	3	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jabar	BM	74%
39	4	Penataan Bangunan & Lingkungan Prov. Bali	CK	75%
40	5	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Utara	CK	75%
41	4	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Brantas	SDA	75%
42	2	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Babel	BM	75%
43	5	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan	SDA	75%
44	5	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat	SDA	75%
45	4	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jatim	BM	75%
46	5	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalbar	BM	75%

LAMPIRAN 13 | **Daftar BUJK Kualifikasi B2**

Lampiran 13. Daftar BUJK Kualifikasi B2

1	ASAHI SYNCHROTECH INDONESIA	51	KERTABUMI TEKINDO	101	CITEC ENGINEERING INDONESIA
2	THIESS CONTRACTORS INDONESIA	52	REKAKARYA GEOTEKNIK	102	KAZAKON INDONESIA
3	ADHI PERSADA GEDUNG	53	TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA	103	SUMI GITA JAYA
4	BANGUN CIPTA KONTRAKTOR	54	BUMI REJO	104	ANEKA JARINGAN INDONESIA
5	TAIYO SINAR RAYA TEKNIK	55	WASKITA BETON PRECAST TBK	105	MARINE INDUSTRIAL ELECTRICAL
6	TAKENAKA INDONESIA	56	ADHI PERSADA BETON	106	HEIN GLOBAL UTAMA
7	ZUG INDUSTRY INDONESIA	57	ARTAWA INDONESIA	107	WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG
8	AULIA MULTI SARANA	58	MULTIBANGUN ADHITAMA KONSTRUKSI	108	PAL INDONESIA (PERSERO)
9	LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA	59	SUMBER MITRA JAYA	109	ADIL UTAMA
10	INTI KARYA PERSADA TEKNIK	60	NEXUS ENGINEERING INDONESIA	110	PENTA OCEAN CONSTRUCTION
11	SMOE INDONESIA	61	HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR	111	HYPEC INTERNATIONAL
12	NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING TBK	62	WAHANAKARSA SWANDIRI	112	GE OPERATIONS INDONESIA
13	TRUBA JAYA ENGINEERING	63	MENCAST OFFSHORE AND MARINE	113	ALAM DUNIA ENGINEERING AND CONSTRUCTION
14	BINTAI KINDENKO ENGINEERING INDONESIA	64	SYARIF MAJU KARYA	114	DUTA KARSACIPTA BUANA
15	INDO STRAITS TBK	65	WARTSILA INDONESIA	115	THE SIXTH CHEMICAL ENGINEERING CONSTRUCTION
16	GRAMA BAZITA	66	ENVITECH PERKASA	116	HAECHANG DEVELOPMENT INDONESIA
17	BMH TECHNOLOGIES	67	PEN INDONESIA	117	DONGYANG INDONESIA
18	TRIKENCANA SAKTI UTAMA	68	DUTA MARINE	118	SWING INDONESIA
19	MCC20 INDONESIA CONSTRUCTION	69	ABADI PRIMA INTIKARYA	119	JEWIBATAN MAS ENGINEERING
20	SULUH ARDHI ENGINEERING	70	PEOPLE MEC	120	NAVIGAT ENERGY INDONESIA
21	WASKITA KARYA (PERSERO), TBK	71	ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA	121	INDO SUTECH SEJAHTERA
22	GUNUNG STEEL CONSTRUCTION	72	INDONAKANO	122	SMCC UTAMA INDONESIA
23	TEKNIKO INDONESIA	73	ACSET INDONESIA TBK	123	FABS INDONESIA
24	PRAMBANAN DWIPAKA	74	SWI JETTY NUSANTARA	124	MAINTEK CONTRACTING SERVICES
25	MEGA ELTRA	75	SARENS HEAVY LIFTING AND TRANSPORTATION INDONESIA	125	INSEMA SUNLY ENGINEERING
26	BERINGIN	76	APECO KENCANA	126	BAUER PRATAMA INDONESIA
27	SHIMIZU BANGUN CIPTA KONTRAKTOR	77	INDOPORLEN SAKTI	127	JAY OKI INFRA INDONESIA
28	CHINA COMSERVICE INDONESIA	78	HILLCONJAYA SAKTI	128	TAKISHA INDONESIA ENGINEERING
29	POSCO ICT INDONESIA	79	MCCONNELL DOWELL INDONESIA	129	INDOKOR
30	CITRA TUBINDO ENGINEERING	80	CHINA RAILWAY ENGINEERING INDONESIA	130	MUTIARA INDAH CONSTRUCTION
31	KBR INDONESIA	81	ADIPROTEK ENVIRODUNIA	131	NAN YANG TECHNOLOGY INDONESIA
32	BERDIKARI PONDASI PERKASA	82	KHALISTA ARTA BUANA	132	JAYA DAIDO CONCRETE
33	JURONG ENGINEERING LESTARI	83	BANGUN SARANA BAJA	133	MCC17 KONSTRUKSI INDONESIA
34	MAXPOWER INDONESIA	84	COGINDO DAYABERSAMA	134	IVAN OORD INDONESIA
35	CONBLOC INFRA TECNO	85	INFRA TECH INDONESIA	135	HANS JAYA UTAMA
36	MARKINAH	86	SSANGYONG KONSTRUKSI INDONESIA	136	HASRAT TATA JAYA
37	THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS INDONESIA	87	OFFSHORE SERVICES INDONESIA	137	GEOTEKINDO
38	KINDEN INDONESIA	88	INDONESIA DHUHA NAMASKARA	138	BETA PRAMESTI ASIA
39	THE SECOND CONST ENG THIRD ENG BUREAU	89	AKI MICHINDO UTAMA	139	JOONGSAN INDONESIA
40	KOIN PRATAMA	90	TOKYU CONSTRUCTION INDONESIA	140	FUJI FURUKAWA E & C INDONESIA
41	CB POLAINDO	91	E TEC INDONESIA	141	KOKA INDONESIA
42	MODERN WIDYA TEHNIKAL	92	DELTA BATARAJAYA JASA KONSTRUKSI	142	KOON CONSTRUCTION INDONESIA
43	PP-TAISEI INDONESIA CONSTRUCTION	93	KORINDO KONSTRUKSI	143	DAE HYUK INDONESIA
44	BOSKALIS INTERNATIONAL INDONESIA	94	CHUNGMA ENGINEERING AND CONSTRUCTION	144	STRADA MULTIPERKASA
45	ELJINDO KONSTRUKSI ABADI	95	VICTORY UTAMA KARYA	145	BUMI SENTOSA DWI AGUNG
46	BERLIAN AMAL PERKASA	96	SCHNEIDER INDONESIA	146	JAYA OBAYASHI
47	TING TAI KONSTRUKSI INDONESIA	97	FLSMIDTH CONSTRUCTION INDONESIA	147	GLOBAL LINK PONDASI
48	ANDRITZ HYDRO	98	BAIJING CONSTRUCTION INDONESIA	148	HAZAMA ANDO MURINDA
49	SUBSEA 7 INDONESIA	99	PERISAI PRIBUMI	149	CHINA ELEVENTH CHEMICAL CONSTRUCTION
50	ELEKTRINDO PERKASA UTAMA	100	IOT EPC INDONESIA	150	KAEFER

Lampiran 13. Daftar BUJK Kualifikasi B2

151	EPC-M FABRICATORS PERKASA	186	TRIOLOGI SURYAWISESA
152	SANDIN ENGINEERING	187	SEO HEUNG JAYA INDONESIA
153	SUNRAY GLOBAL	188	PELANGI ENGINEERING INDONESIA
154	BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA	189	PIEE INTERNASIONAL
155	NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA	190	SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS INDONESIA
156	TAKENAKADOBOKU INDONESIA	191	SINOCONST CONSTRUCTION INDONESIA
157	KAJIMA INDONESIA	192	TERAS TEKNIK SEJAHTERA
158	CG INTERNATIONAL CONSTRUCTION	193	TOBA JAYA SENTOSA
159	BIMA GOLDEN POWERINDO	194	DAIWA TETRA MANUNGGAL KONSTRUKSI
160	WOOJIN CONSTRUCTION INDONESIA	195	HANDAL ENERGI INDONESIA
161	INDOTEL GRAHA PRATAMA	196	KARABHA GRYAMANDIRI
162	DAIFUKU INDONESIA	197	INDO CHANGHAI KONSTRUKSI
163	TEKNIKO E & C	198	CHINA DRAZ ENGINEERING INDONESIA
164	NERIN INTERNATIONAL INDONESIA	199	AVIP INTERIORS
165	PLANT SAMYOUNG INDONESIA	200	JGC INDONESIA
166	TOKO ENGINEERING INDONESIA	201	TECHNIP INDONESIA
167	INDONESIA RIVER ENGINEERING	202	SAIPEM INDONESIA
168	GLOBAL JAYA MARITIMINDO	203	ADHI KARYA (PERSERO) TBK
169	BAGUS KARYA	204	BAKRIE CONSTRUCTION
170	ANEKA KARYA KONSTRUKSI	205	BAM DECORIENT INDONESIA
171	HIDAYAH TEKNIK INDOMAS	206	ENCONA INTI INDUSTRI
172	IADECCO	207	GUNANUSA UTAMA FABRICATORS
173	ITO TAKA CONSTRUCTION	208	HUTAMA KARYA (PERSERO)
174	TAIHEI DENGYO INDONESIA	209	MCDERMOTT INDONESIA
175	GEOCEAN INDONESIA	210	MERLASAKTI ABADI
176	GLOBAL INDUSTRIES ASIA PASIFIC	211	ADIQUATRO ELEKTRIKINDO PERKASA
177	TOYO KANETSU INDONESIA	212	PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO)TBK
178	DINAMIKARAYA CIPTASELARAS	213	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
179	CHINA RAILWAY NINETEEN BUREAU	214	TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS
180	BUANA JASA TEHNIKINDO	215	NINDYA KARYA (PERSERO)
181	ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	216	TOTALINDO EKA PERSADA
182	MURINDA IRON STEEL	217	PP PRACETAK
183	TOYO HITEC INDONESIA	218	WIJAYA KARYA (PERSERO), TBK
184	HSING LOONG INDONESIA	219	PAESA PASINDO ENGINEERING
185	SEPULUH SUMBER ANUGERAH		